



LAPORAN AKHIR

Kajian Pengembangan Kawasan Ekonomi Daerah Berbasis Komoditas Unggulan Melalui Skema Pembangunan Kawasan Perdesaan

Penulis:

Hadi Prayitno

Dwinda Rahman

Dita Nurul Aini

Nurun Najib

Arief Yudansha

2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Laporan akhir **“Kajian Pengembangan Kawasan Ekonomi Daerah Berbasis Komoditas Unggulan melalui Skema Pembangunan Kawasan Perdesaan”** ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini sebagai bagian dari proses perencanaan yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai konteks, urgensi program, tujuan, sasaran, ruang lingkup, serta pendekatan kerja yang diambil dalam pengembangan kawasan ekonomi daerah berbasis komoditas unggulan di Kabupaten Lampung Timur.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih dapat diperbaiki dan disempurnakan lebih lanjut. Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk pengembangan laporan ini di masa yang akan datang. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi, dan bimbingan yang sangat berarti dalam penyusunan laporan akhir ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pijakan yang kokoh dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Daerah Berbasis Komoditas Unggulan melalui Skema Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Lampung Timur.

Sukadana, Desember 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2 Maksud, Tujuan, dan Sasaran	8
1.2.1 Maksud	8
1.2.2 Tujuan.....	8
1.2.3 Sasaran	9
1.3 Landasan Hukum	9
1.4 Ruang Lingkup	10
1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah	10
1.4.2 Ruang Lingkup Kegiatan	11
1.5 Keluaran.....	11
1.6 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Analisis Kebijakan	15
2.1.1 Definisi Analisis Kebijakan.....	15
2.1.2 Pendekatan Analisis Kebijakan	16
2.1.3 Bentuk-Bentuk Analisis Kebijakan.....	17
2.2 Kebijakan Publik.....	18
2.2.1 Definisi Kebijakan Publik	18
2.2.2 Proses Kebijakan Publik.....	20
2.2.3 Jenis-Jenis Kebijakan Publik	21
2.2.4 Kriteria Kebijakan Publik	22
2.3 Konsep Barang Publik.....	22

2.3.1 Definisi Barang Publik	22
2.3.2 Tipe Barang atau Pelayanan	24
2.4 Pembangunan Daerah.....	25
2.4.1 Pembangunan Kawasan Perdesaan	26
2.4.2 Kriteria Kawasan Perdesaaan.....	33
2.4.3 Desa Perbatasan.....	35
2.4.4 Komoditas Unggulan.....	38
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH	40
3.1 Aspek Fisik Dasar Lahan.....	40
3.2 Aspek Kependudukan dan Sosial	42
3.2.1 Kependudukan	42
3.2.2 Tenaga Kerja Lampung Timur	44
3.3 Aspek Ekonomi.....	45
3.3.1 Struktur Ekonomi Lampung Timur	45
3.3.2 Komoditas Unggulan Subsektor Pertanian dan Perkebunan Lampung Timur	49
3.4 Aspek Status Perkembangan Desa	54
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN	59
4.1 Tahapan Penelitian.....	59
4.1.1 Tahap Persiapan.....	59
4.1.2 Tahap Pelaksanaan	59
4.1.3 Tahap Pelaporan	63
4.2 <i>Output</i>	64
4.3 Teknik Analisis Data	65
4.3.1 Jenis dan Sumber Data	65
4.3.2 Teknik Analisis Data	68
BAB V ARAH PEMBANGUNAN WILAYAH KAWASAN PERDESAAN BERBASIS UNGGULAN DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	70
BAB VI DELINIASI DAN POTENSI PRODUK KAWASAN PERDESAAN	76
6.1 Deliniasi Kawasan Perdesaan.....	76
6.2 Analisis Potensi Produk Unggulan Kawasan Perdesaan	81
6.2.1 Hasil Analisis LQ	82

6.2.2 Hasil Analisis <i>Shift Share</i>	88
6.2.3 Analisis Tipologi Klassen.....	95
BAB VII PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS	
PRODUK UNGGULAN DAN PENDUKUNG.....	97
7.1 Tujuan dan Sasaran Klaster.....	97
7.2 Analisis Klaster Unggulan Dan Pendukung	99
7.2.1 Klaster Agroindustri: Kopi, Kelapa sawit, Ubi kayu, Kelapa ..	100
7.2.2 Klaster Swasembada Pangan: Tanaman Pangan dan Hortikultura	121
7.2.3 Klaster Perikanan atau Minapolitan	136
7.3 Analisis Skala Prioritas	155
7.3.1 Matriks Program dan Indikasi Kegiatan Per Desa	159
BAB VIII PETA JALAN KAWASAN PERDESAAN.....	169
8.1 Peta Jalan Kawasan Perdesaan Klaster Agroindustri	169
8.2 Peta Jalan Kawasan Perdesaan Klaster Swasembada Pangan	175
8.3 Peta Jalan Kawasan Perdesaan Klaster Minapolitan	180
BAB IX PENUTUP	185
9.1 Kesimpulan.....	185
9.2 Rekomendasi	187

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 dalam ton	4
Tabel 2. Luas Peruntukkan Lahan Kabupaten Lampung Timur	41
Tabel 3. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang bekerja Selama seminggu yang lalu menurut lapangan pekerjaan utama dan jenis kelamin di Kabupaten Lampung Timur, 2024	44
Tabel 4. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Lampung Timur, 2024	45
Tabel 5. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Lampung Timur (miliar rupiah), 2020–2024	48
Tabel 6. Produksi Komoditas Perkebunan dan Tanaman Pangan (dalam ton) Menurut Kecamatan di Lampung Timur Tahun 2024	50
Tabel 7. Produksi Buah-Buahan dan Sayuran di Kabupaten Lampung Timur dalam Kuintal	52
Tabel 8. Klasifikasi Daerah menurut Tipologi Klassen	63
Tabel 9. Metodologi	65
Tabel 10. Kebutuhan Data dan Informasi	66
Tabel 11. Produk Domestik Bruto Regional atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lima Lapangan Usaha yang Memiliki Kontribusi Terbesar Kabupaten Lampung Timur	71
Tabel 12. Produksi Komoditas Unggulan Tanaman Pangan, Perkebunan dan Perikanan Lampung Timur dan Kontribusi Produksi di Provinsi Lampung tahun 2022-2024	72
Tabel 13. Hasil Perhitungan LQ Komoditas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura Menurut Kecamatan di Lampung Timur Tahun 2024	83
Tabel 14. Komoditas Basis Kecamatan Perbatasan	87
Tabel 15. Hasil Perhitungan <i>Shift Share</i> Komoditas Tanaman Pangan, Perkebunan, Hortikultura dan Perikanan tahun 2023-2024 di Kecamatan Lampung Timur	89
Tabel 16. Komoditas Unggulan Kecamatan Perbatasan	94

Tabel 17. Klasifikasi Kecamatan Perbatasan Berdasarkan Tipologi Klassen	95
Tabel 18. Deliniasi Klaster Agroindustri	103
Tabel 19. Jenis Industri yang Telah Beroperasi di Klaster Agroindustri	108
Tabel 20. Arah Strategi Pembangunan Berbasis Komoditas Unggulan	114
Tabel 21. Sub Sistem Rantai Nilai.....	118
Tabel 22. Deliniasi Kawasan Perdesaan Klaster Swasembada Pangan	124
Tabel 23. Hilirisasi Berdasarkan Komoditas Unggulan	130
Tabel 24. Pembagian Peran Aktor Secara Ringkas Dan Operasional .	133
Tabel 25. Deliniasi Kawasan Perdesaan Klaster Minapolitan	139
Tabel 26. Kesiapan Hilirisasi Klaster Minapolitan	145
Tabel 27. Sub-sistem Rantai Pasok Klaster Perikanan	149
Tabel 28. Matriks Program dan Indikasi Kegiatan Per Desa Kabupaten Lampung Timur Berbasis LFA	161
Tabel 29. Peran Desa dalam Kawasan Perdesaan.....	165
Tabel 30. Peta Jalan Kawasan Perdesaan Klaster Agroindustri.....	170
Tabel 31. Peta Jalan Kawasan Perdesaan Klaster Swasembada Pangan	176
Tabel 32. Peta Jalan Kawasan Perdesaan Klaster Minapolitan	181

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Persentase Angka Kemiskinan Kabupaten Lampung Timur dan Provinsi Lampung.....	3
Gambar 2. Struktur PDRB atas Harga Berlaku Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020-2024	3
Gambar 3. Alur Proses Pengusulan dan Penetapan Kawasan Perdesaan Berdasarkan Usulan Beberapa Desa (<i>Bottom-Up</i>)	29
Gambar 4. Alur Proses Pengusulan dan Penetapan Kawasan Perdesaan Berdasarkan Prakarsa Bupati/Walikota (<i>Top Down</i>)	31
Gambar 5. Peta Wilayah Administrasi Lampung Timur	40
Gambar 6. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Timur dalam ribu orang, 2024 ..	42
Gambar 7. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Lampung Timur Tahun 2025	43
Gambar 8. Pertumbuhan Ekonomi Lampung Timur, Provinsi Lampung dan Nasional 2020-2024	46
Gambar 9. Jumlah Desa Mandiri, Maju dan Berkembang di 5 Kabupaten Provinsi Lampung	54
Gambar 10. Proporsi Desa Mandiri, Desa Maju dan Desa Berkembang di Lampung Timur	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Perkebunan Hortikultura dan Perikanan Tahun 2024.....	196
Lampiran 2. Data Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Perkebunan Hortikultura dan Perikanan Tahun 2023.....	199
Lampiran 3. Acuan Harga Komoditas.....	202
Lampiran 4. Nilai Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Perkebunan Hortikultura dan Perikanan Tahun 2024 (Dalam Rupiah).....	204
Lampiran 5. Nilai Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Perkebunan Hortikultura dan Perikanan Tahun 2023 (Dalam Rupiah).....	207
Lampiran 6. Pertumbuhan Komoditas Tanaman Pangan, Perkebunan Hortikultura dan Perikanan Tahun 2023-2024.....	210
Lampiran 7. Perubahan Nilai Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Perkebunan Hortikultura dan Perikanan yang Disebabkan oleh Pertumbuhan Nilai Produksi Kab. Lampung Timur Tahun 2023-2024	213
Lampiran 8. Perubahan Nilai Produksi di Kabupaten Lampung Timur (<i>Shift Share</i>) Tahun 2023-2024.....	223

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan dokumen ini bertujuan mendukung pengembangan kawasan ekonomi daerah berbasis komoditas unggulan melalui skema pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Lampung Timur. Kondisi perekonomian daerah masih didominasi sektor primer, khususnya pertanian, perkebunan, dan perikanan, yang belum terintegrasi secara optimal dengan industri pengolahan dan sistem pemasaran. Ketimpangan antarwilayah perdesaan serta keterbatasan infrastruktur dan akses pasar menjadi tantangan utama pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan arah kebijakan yang mampu mengoptimalkan potensi lokal secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Landasan konseptual pembangunan kawasan perdesaan menekankan penguatan potensi lokal, peningkatan nilai tambah, dan keterkaitan antarsektor. Pembangunan kawasan perdesaan diposisikan sebagai instrumen strategis untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komoditas unggulan dipahami sebagai komoditas yang memiliki keunggulan relatif, daya saing, dan kontribusi signifikan terhadap perekonomian wilayah. Pendekatan kebijakan diarahkan pada integrasi hulu-hilir serta penguatan kelembagaan ekonomi lokal.

Kabupaten Lampung Timur memiliki karakteristik wilayah perdesaan dengan basis ekonomi utama pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Wilayah pesisir dan perbatasan desa berperan strategis, terutama dalam pengembangan perikanan dan komoditas kelapa. Struktur ekonomi daerah menunjukkan ketergantungan tinggi pada sektor primer dengan nilai tambah yang masih terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan peluang besar bagi pengembangan kawasan perdesaan berbasis komoditas unggulan yang terarah.

Analisis dilakukan menggunakan metode Location Quotient, Shift Share, dan Tipologi Klassen pada tingkat kecamatan. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi komoditas basis, mengukur daya saing wilayah, serta mengelompokkan kecamatan berdasarkan kontribusi dan laju pertumbuhan ekonomi. Data produksi komoditas tahun 2023–2024 menjadi dasar penghitungan nilai ekonomi dan keunggulan relatif wilayah. Hasil analisis memberikan gambaran spasial mengenai potensi dan dinamika komoditas unggulan antarkecamatan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa komoditas unggulan utama di Kabupaten Lampung Timur meliputi padi, ubi kayu, kelapa, dan perikanan. Nilai Location Quotient yang tinggi pada komoditas tersebut menandakan perannya sebagai sektor basis di sejumlah kecamatan. Analisis Shift Share memperlihatkan adanya keunggulan kompetitif

pada wilayah pesisir dan perdesaan tertentu, khususnya pada subsektor perikanan dan perkebunan. Sementara itu, Tipologi Klassen menunjukkan masih adanya kecamatan yang tergolong relatif tertinggal akibat keterbatasan infrastruktur dan akses pasar.

Pengembangan kawasan perdesaan diarahkan melalui pembentukan klaster agroindustri, klaster swasembada pangan, dan klaster perikanan atau minapolitan. Setiap klaster dianalisis berdasarkan kesiapan hilirisasi, peran aktor, serta skala prioritas pengembangan. Hasil analisis menunjukkan masih lemahnya keterkaitan antara sektor produksi dan industri pengolahan. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penguatan rantai nilai dan kelembagaan ekonomi kawasan.

Peta jalan pembangunan kawasan perdesaan disusun secara bertahap hingga tahun 2030. Tahap awal difokuskan pada penguatan produksi, penataan kawasan, dan penguatan kelembagaan masyarakat. Tahap berikutnya diarahkan pada peningkatan penanganan pascapanen, pembangunan infrastruktur pendukung, serta pengembangan hilirisasi berbasis UMKM. Tahap akhir menekankan konsolidasi kawasan dan peningkatan daya saing produk di pasar regional dan nasional.

Kabupaten Lampung Timur memiliki potensi besar dalam pengembangan kawasan perdesaan berbasis komoditas unggulan, khususnya padi, ubi kayu, kelapa, dan perikanan. Potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan nilai tambah optimal akibat lemahnya integrasi hulu-hilir dan keterbatasan infrastruktur pendukung. Ketimpangan antarkecamatan masih terlihat dalam hasil Tipologi Klassen dan analisis daya saing wilayah. Pengembangan kawasan perdesaan berbasis klaster menjadi strategi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur perlu memperkuat integrasi kebijakan pembangunan kawasan perdesaan dari tingkat kabupaten hingga desa. Prioritas kebijakan diarahkan pada peningkatan infrastruktur, pengembangan industri pengolahan, dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat. Sinergi antardesa dan antarkecamatan, khususnya di wilayah pesisir dan perbatasan, perlu ditingkatkan untuk memperkuat rantai nilai komoditas unggulan. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong kawasan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.

BAB I

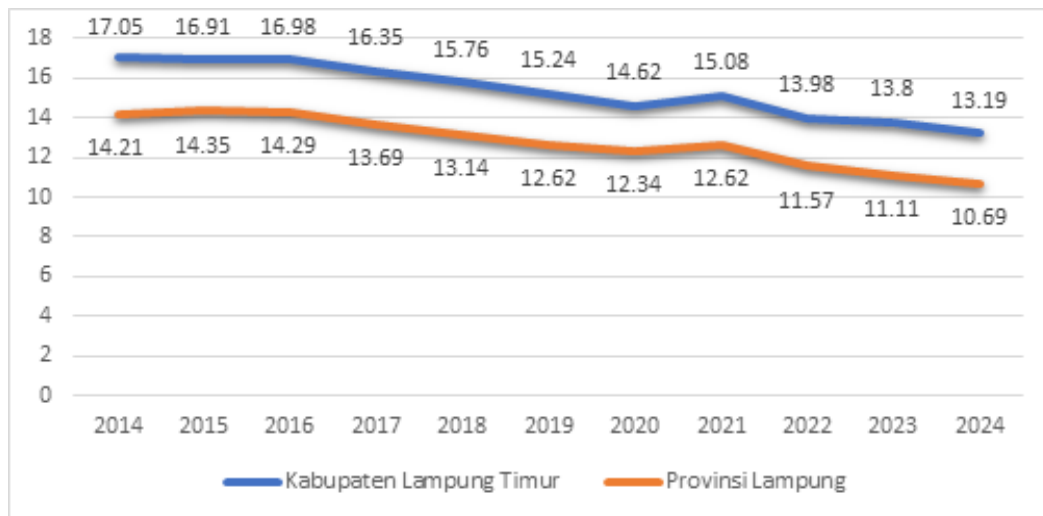
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Lampung Timur menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai pembangunan yang merata, terutama di wilayah perdesaan. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, salah satu isu strategis yang diidentifikasi adalah rendahnya kualitas infrastruktur perdesaan dan belum berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang dapat mendorong kemajuan daerah.

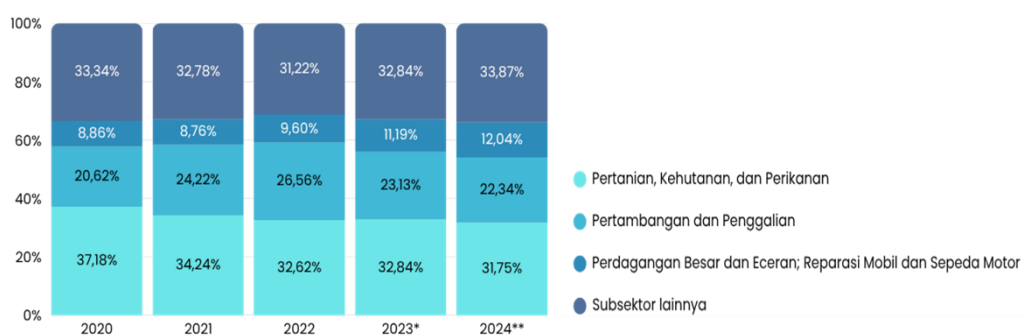
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Tercatat pertumbuhan ekonomi mencapai 4,62% pada 2024, meningkat dari 3,51% pada 2023 dan 2022 sebesar 2,02%. Pada 2024, kontribusi terbesar dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yakni sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, dengan kontribusi sebesar 31,75%.

Pertumbuhan ekonomi mengalami perbaikan, namun meninggalkan tantangan pembangunan pada aspek lain, terutama kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan pada 2024 tercatat mencapai 13,19%. Angka kemiskinan ini masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi Lampung sebesar 10,69%. Penting bagi pemerintah daerah untuk terus mengembangkan kebijakan yang dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 1. Persentase Angka Kemiskinan Kabupaten Lampung Timur dan Provinsi Lampung
Sumber: BPS, 2025

Struktur PDRB Kabupaten Lampung Timur berdasarkan lapangan usaha menunjukkan kontribusi sektoral yang didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam 5 tahun terakhir. Komposisi ekonomi daerah ini masih didominasi oleh tiga kelompok utama, yakni pertanian, pertambangan dan penggalian serta perdagangan, yang secara keseluruhan membentuk fondasi aktivitas ekonomi masyarakat. Melalui analisis distribusi persentase PDRB, dapat terlihat bagaimana dinamika struktur ekonomi daerah bergerak, baik akibat perkembangan sektor unggulan maupun penyesuaian terhadap kondisi makroekonomi.



Gambar 2. Struktur PDRB atas Harga Berlaku Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020-2024
Sumber: BPS, 2025

Grafik di atas memperlihatkan perubahan proporsi kontribusi tiga sektor utama terhadap PDRB Lampung Timur dari tahun 2020 hingga 2024. Pada bagian terbawah batang grafik terlihat sektor

pertanian sebagai kontributor terbesar, meskipun porsinya perlahan menurun dari 37,18% (2020) menjadi 31,75% (2024). Sektor perdagangan (warna biru tengah) menunjukkan fluktuasi dengan tren peningkatan pada awal periode, sementara sektor pertambangan dan penggalian menampilkan kecenderungan naik dari 20,62% menjadi sekitar 22,34% pada akhir periode. Sementara itu, kelompok sektor lainnya berada pada kisaran 33%, relatif stabil sepanjang lima tahun. Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan pergeseran menuju struktur ekonomi yang lebih berimbang, meskipun pertanian tetap memegang peranan strategis bagi perekonomian Lampung Timur.

Struktur PDRB Lampung Timur secara konsisten didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, menjadikan komoditas unggulan dari sektor-sektor ini sebagai penopang utama perekonomian daerah. Berbagai komoditas unggulan tersebut meliputi kelapa sawit, kelapa, kopi, padi sawah, pisang, serta perikanan budidaya, yang tersebar di hampir seluruh kecamatan. Menariknya, sebagian besar komoditas unggulan ini justru terkonsentrasi di kecamatan perbatasan sehingga menjadikan wilayah-wilayah tersebut sebagai lokus strategis bagi pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam. Pola sebaran ini mencerminkan kekuatan ekonomi primer Lampung Timur sekaligus membuka peluang besar untuk pengembangan sentra produksi dan penataan kawasan perdesaan yang lebih terarah dan berbasis potensi lokal.

Tabel 1. Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 dalam ton

Kecamatan	Kelapa Sawit	Kelapa	Kopi	Padi Sawah	Pisang	Udang Vanname
Metro Kibang	172	121	3	1.727	91	
Batanghari	297	369	9	45.237	282	
Sekampung	284	250	19	34.029	679	
Marga Tiga	615	717	28	11.847	715	
Sekampung Udik	556	876	5	23.826	292	
Jabung	870	443	10	67.207	182	
Pasir Sakti	437	203	0	44.406	179	2.773,17
Waway Karya	1.071	167	3	30.673	0	

Kecamatan	Kelapa Sawit	Kelapa	Kopi	Padi Sawah	Pisang	Udang Vanname
Marga Sekampung	70	200	7	530	10	
Labuhan Maringgai	885	121	11	29.035	426	2.268,96
Mataram Baru	160	496	0	17.563	22	
Bandar Sribhawono	78	1.075	14	15.087	1.626	
Melinting	263	980	43	7.598	372	
Gunung Pelindung	160	567	6	14.205	802	
Way Jepara	245	550	7	23.553	4.764	
Braja Selebah	85	348	3	18.769	53	
Labuhan Ratu	99	804	15	9.612	42	
Sukadana	348	447	17	20.066	14	
Bumi Agung	110	445	0	8.861	1	
Batanghari Nuban	155	694	35	32.088	59	
Pekalongan	83	815	0	21.697	11	
Raman Utara	232	448	1	32.319	5	
Purbolinggo	61	259	0	7.420	27	
Way Bungur	43	183	0	4.248	108	
Total	7.379	11.578	236	521.603	10.761	5.042,13
Perbatasan	2.814	3.428	55	203.902	1.022	2.773
Kontribusi Perbatasan	38,14%	29,61%	23,31%	39,09%	9,49%	54,99%

Keterangan:



= Kecamatan Perbatasan



= 5 kecamatan dengan Produksi terbesar

Sumber: BPS, 2025

Tabel di atas menggambarkan sebaran komoditas unggulan di setiap kecamatan di Lampung Timur sekaligus menunjukkan kontribusi kecamatan perbatasan terhadap total produksi kabupaten. Warna merah menandai kecamatan perbatasan, yang dalam banyak komoditas terlihat memiliki peran dominan, terutama pada sektor perikanan budidaya, kelapa sawit, dan padi sawah. Warna biru menunjukkan lima kecamatan dengan produksi terbesar pada masing-masing komoditas, mencerminkan sentra-

sentra produksi yang menjadi tulang punggung distribusi komoditas di tingkat kabupaten. Beberapa kecamatan, seperti Waway Karya, Labuhan Maringgai, Jabung, dan Pasir Sakti tampil sebagai penyumbang utama untuk beberapa komoditas unggulan secara bersamaan. Komoditas padi sawah ditopang oleh kecamatan-kecamatan, seperti Batanghari, Sekampung, Sekampung Udik, dan Jabung, sementara komoditas kelapa dan kopi menunjukkan konsentrasi produksi di wilayah tertentu, seperti Melinting dan Batanghari Nuban. Yang paling mencolok adalah kontribusi sangat tinggi kecamatan perbatasan pada budidaya Udang Vanname, mencapai 54,99% dari total kabupaten. Secara keseluruhan, pola warna dalam tabel ini mempertegas bahwa kecamatan perbatasan maupun kecamatan dengan produksi terbesar merupakan lokus strategis komoditas unggulan Lampung Timur yang dapat menjadi fokus pengembangan kawasan perdesaan dan penguatan ekonomi wilayah.

Posisi geografis Kabupaten Lampung Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Kota Metro menghadirkan sejumlah tantangan dalam konteks pembangunan desa. Pertama, arus migrasi dan perubahan struktur tenaga kerja di desa-desa perbatasan. Akses yang lebih mudah ke Kota Metro mendorong urbanisasi parsial, di mana sebagian tenaga kerja produktif desa beralih ke sektor jasa dan industri. Dampaknya, sektor pertanian sebagai basis ekonomi utama desa mengalami kekurangan tenaga kerja dan penurunan produktifitas. Kedua, belum optimalnya pengembangan produk unggulan desa menyebabkan nilai tambah sebagian besar produk unggulan masih dinikmati oleh wilayah kota. Ketiga, permasalahan pengelolaan tata ruang dan lingkungan yang muncul alibat tekanan pembangunan dari arah perkotaan. Ekspansi permukiman, alih fungsi lahan pertanian, dan meningkatnya kebutuhan ruang komersial di wilayah perbatasan memunculkan konflik kepentingan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan perdesaan. Terakhir, rendahnya kualitas infrastruktur perdesaan. Kondisi jalan Lampung Timur hanya 28,74% yang memiliki kondisi baik dan 37,65% dalam kondisi rusak berat (BPS, 2025). Kondisi ini tentunya akan menghambat perkembangan distribusi dan mobilitas ekonomi di perdesaan Lampung Timur. Jika ditinjau dari infrastruktur irigasi dikutip dari RPJMD Lampung Timur 2025-2029, penilaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) kewenangan kabupaten tahun

2023 menunjukkan nilai sebesar 47,32% yang termasuk kategori jelek dan memerlukan penanganan segera. Kualitas irigasi yang jelek akan berdampak pada produktifitas komoditas pertanian yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Lampung Timur. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan kawasan perdesaan perbatasan di Kabupaten Lampung Timur perlu diarahkan secara terpadu untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan infrastruktur, dan pelestarian sumber daya alam.

Pendekatan pembangunan desa yang selama ini cenderung bersifat individual (desa per desa) mengakibatkan fragmentasi perencanaan dan tidak tercapainya skala ekonomi. Pendekatan pengembangan ekonomi daerah berbasis komoditas unggulan melalui skema kawasan perdesaan dibutuhkan agar mampu mengonsolidasikan potensi lintas desa secara tematik dan spasial, guna mempercepat pembangunan wilayah tertinggal, meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pengembangan kawasan perdesaan dipandang sebagai alternatif strategis untuk mengoptimalkan potensi antardesa dan perbatasan dengan kabupaten/kota lainnya yang memiliki kesamaan geografis, sosial, dan ekonomi.

Salah satu praktik baik kawasan perdesaan berbasis komoditas unggulan berada di Kabupaten Pamekasan. Di kabupaten ini terdapat tiga desa, yaitu Desa Toket, Desa Rangperang Daya dan Desa Klampar yang telah membentuk Kawasan Perdesaan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa Toket, Desa Klampar Nomor 95,265,221 Tahun 2017 tentang Kerja Sama antarDesa dan Bumdesa Bersama Kampung Batik. Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) diarahkan untuk mengembangkan batik tulis sebagai potensi lokalnya. Masing-masing desa memiliki peran dalam pengembangan batik tulis. Desa Klampar memiliki potensi produksi bahan baku batik tulis, Desa Rangperang Daya dan Toket memiliki pengrajin batik yang memiliki kualitas yang sangat baik, namun jumlah produksinya masih minim. Kebijakan Kerjasama antarDesa ini memberikan berbagai manfaat bagi pelaku UKM, seperti sarana dan prasarana bangunan untuk menampung pengrajin batik, bangunan pameran, bangunan untuk menampung bahan baku dan tempat

hasil UKM (Nasution dan Kurniawan, 2023). Selain itu, kerjasama ini juga akan mengurangi persaingan antarDesa, meningkatkan efisiensi biaya, dan meningkatkan skala produksi batik secara kolektif.

Kajian Pengembangan Kawasan Ekonomi Daerah Berbasis Komoditas Unggulan Melalui Skema Pembangunan Kawasan Perdesaan Lampung Timur dimaksudkan untuk menyediakan kerangka perencanaan teknokratik yang mampu mengidentifikasi, mengarahkan, dan mengakselerasi pembangunan lintas desa berbasis potensi unggulan kawasan. Hal itu tertuang di Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan. Penetapan kawasan perdesaan berdasarkan klaster atau tematik hendaknya perlu disesuaikan dengan beberapa arah kebijakan pembangunan kewilayahan dalam RTRW, RPJPD, PRPJMD Kabupaten Lampung Timur dan RPJMD Lampung Timur.

1.2 Maksud, Tujuan, dan Sasaran

1.2.1 Maksud

Maksud dari kegiatan Kajian Pengembangan Kawasan Ekonomi Daerah Berbasis Komoditas Unggulan Melalui Skema Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah menyediakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat spasial, tematik, dan strategis dalam rangka mendorong percepatan pembangunan perdesaan yang berbatasan dengan Kabupaten/Kota lain secara terpadu dan berkelanjutan.

1.2.2 Tujuan

Adapun tujuan dari Kegiatan Kajian Pengembangan Kawasan Ekonomi Daerah Berbasis Komoditas Unggulan Melalui Skema Pembangunan Kawasan Perdesaan ini adalah:

1. mengidentifikasi dan mengintegrasikan potensi unggulan, permasalahan, serta kebutuhan pembangunan dari beberapa desa di Kabupaten Lampung Timur yang berbatasan dengan Kabupaten/Kota lain yang memiliki keterkaitan geografis dan sosial ekonomi untuk membentuk satu kawasan perdesaan yang saling mendukung dan berdaya saing;

2. mengarahkan pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Lampung Timur yang berbatasan dengan Kabupaten/Kota lain untuk menciptakan simpul-simpul ekonomi berbasis komoditas unggulan, dan kegiatan produktif masyarakat desa yang mampu mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat; dan
3. menyediakan peta jalan pengembangan kawasan terintegrasi, mencakup pengembangan komoditas unggulan, peta jalan pengembangan kawasan, penataan ruang partisipatif dan inklusif, serta pembentukan pusat pertumbuhan antardesa.

1.2.3 Sasaran

Sasaran dari kegiatan Kegiatan Kajian Pengembangan Kawasan Ekonomi Daerah Berbasis Komoditas Unggulan Melalui Skema Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah untuk:

1. tersusunnya arah kebijakan pembangunan kawasan perdesaan yang berbatasan dengan Kabupaten/Kota lain yang mampu meningkatkan keterkaitan ekonomi antardesa, mengurangi kesenjangan pembangunan, dan mendorong aktivitas produktif masyarakat; dan
2. tersedianya peta jalan pengembangan kawasan perdesaan yang berbatasan dengan Kabupaten/Kota lain yang komprehensif dan aplikatif tahun 2026 hingga 2030.

1.3 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari Kegiatan Kajian Pengembangan Kawasan Ekonomi Daerah Berbasis Komoditas Unggulan Melalui Skema Pembangunan Kawasan Perdesaan ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
6. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP);
7. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 194 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Lokasi dari kegiatan Kajian Pengembangan Kawasan Ekonomi Daerah Berbasis Komoditas Unggulan Melalui Skema Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah di Kabupaten Lampung Timur. Secara spesifik, wilayah yang diteliti adalah wilayah kecamatan yang berbatasan dengan Kota Metro, Lampung Tengah dan Lampung Selatan. Adapun desa dan kecamatan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Wilayah Perbatasan dengan Kota Metro:
 1. Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan
 2. Desa Kalibening Kecamatan Pekalongan
 3. Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari
 4. Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari
 5. Desa Sumber Agung Kecamatan Metro Kibang
 6. Desa Kibang Kecamatan Metro Kibang
 7. Desa Marga Jaya Kecamatan Metro Kibang
- b. Wilayah Perbatasan dengan Lampung Tengah:
 1. Desa Wonosari Kecamatan Pekalongan

2. Desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari Nuban
 3. Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur
 4. Desa Tambah Subur Kecamatan Way Bungur
 5. Desa Kali Pasir Kecamatan Way Bungur
 6. Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban
- c. Wilayah Perbatasan dengan Lampung Selatan:
1. Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari
 2. Desa Purbosembodo Kecamatan Metro Kibang
 3. Desa Jaya Asri Kecamatan Metro Kibang
 4. Desa Purwodadi Mekar Kecamatan Batanghari
 5. Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik
 6. Desa Tri Tunggal Kecamatan Waway Karya
 7. Desa Jembrana Kecamatan Waway Karya
 8. Desa Tanjung Wangi Kecamatan Waway Karya
 9. Desa Ngesti Karya Kecamatan Waway Karya
 10. Desa Karya Basuki Kecamatan Waway Karya
 11. Desa Marga Batin Kecamatan Waway Karya
 12. Desa Karang Anom Kecamatan Waway Karya
 13. Desa Sidorahayu Kecamatan Waway Karya
 14. Desa Sumur Kucing Kecamatan Pasir Sakti
 15. Desa Labuhan Ratu Kecamatan Pasir Sakti
 16. Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik

1.4.2 Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Kajian Pengembangan Kawasan Ekonomi Daerah Berbasis Komoditas Unggulan Melalui Skema Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Ekonomi Daerah Berbasis Komoditas Unggulan dan rancangan kebijakan Kepala Daerah yang mendukung terbentuknya kawasan ekonomi perdesaan terintegrasi berupa peraturan Kepala Daerah.

1.5 Keluaran

Keluaran dari kegiatan Kajian Pengembangan Kawasan Ekonomi Daerah Berbasis Komoditas Unggulan Melalui Skema Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Lampung Timur adalah dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Daerah Berbasis Komoditas Unggulan Kabupaten Lampung Timur yang berbatasan dengan Kabupaten/Kota lain tahun 2026-2030, dan

dilengkapi dengan laporan kegiatan. Beberapa tahapan laporan sebagai berikut:

- a. Laporan Pendahuluan sebanyak 5 (lima) buku laporan
- b. Laporan Akhir + *Executive Summary* sebanyak 5 (lima) buku laporan
- c. Laporan yang terdiri dari Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir dimasukkan kedalam bentuk *softcopy (Flash Disc)*

1.6 Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan yang terstruktur untuk laporan pendahuluan Kajian Pengembangan Kawasan Ekonomi Daerah Berbasis Komoditas Unggulan Melalui Skema Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Lampung Timur.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, maksud, tujuan, dan sasaran, referensi hukum, ruang lingkup, keluaran, sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan kebijakan yang relevan dan literatur yang digunakan sebagai dasar penyusunan Kajian Pengembangan Kawasan Ekonomi Daerah Berbasis Komoditas Unggulan Melalui Skema Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Lampung Timur.

BAB III: GAMBARAN UMUM WILAYAH

Bab ini menguraikan tentang wilayah studi dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah, aspek ekonomi, serta potensi potensi komoditas unggulan yang disusun.

BAB IV: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam Kajian Pengembangan Kawasan Ekonomi Daerah Berbasis Komoditas Unggulan Melalui Skema Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Lampung Timur.

BAB V: ARAH PEMBANGUNAN WILAYAH KAWASAN PERDESAAN BERBASIS UNGGULAN DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Bab ini menjelaskan arah pembangunan wilayah kawasan perdesaan berbasis unggulan di Kabupaten Lampung timur disesuaikan dengan kebijakan tingkat nasional dan Provinsi Lampung mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2025-2029, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur 2025-2029.

BAB VI: DELINIASI DAN POTENSI PRODUK KAWASAN PERDESAAN

Menguraikan potensi produk unggulan yang dikembangkan berdasarkan karakteristik produksi, keterkaitan antarwilayah, dan perannya dalam mendukung pengembangan klaster ekonomi perdesaan

BAB VII: PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS PRODUK UNGGULAN DAN PENDUKUNG

Menguraikan pengembangan kawasan perdesaan berbasis produk unggulan sebagai penggerak utama dan produk pendukung sebagai penopang ekonomi, melalui pendekatan klaster yang terintegrasi dari produksi hingga hilirisasi dan pemasaran.

BAB VIII: PETA JALAN KAWASAN PERDESAAN

Menguraikan Peta jalan pengembangan kawasan Tahun 2026-2030 yang meliputi tahapan pengembangan, jenis komoditas, indikasi kegiatan, *stakeholder* dan target pasar masing-masing klaster.

BAB IX: PENUTUP

Memuat kesimpulan hasil analisis pengembangan kawasan perdesaan dan arahan rekomendasi strategis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Analisis Kebijakan

2.1.1 Definisi Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan merupakan proses sistematis yang dirancang untuk menghasilkan, mengevaluasi, dan mengomunikasikan informasi relevan bagi pengambilan keputusan publik (Dunn, 2017). Proses ini menggunakan pendekatan multidisipliner sehingga peneliti dan praktisi dapat menghubungkan data empiris dengan pertimbangan nilai dan tujuan sosial (Smith & Larimer, 2009). Dengan demikian, analisis kebijakan tidak hanya sekadar menggambarkan keadaan, tetapi juga menilai alternatif dan memberikan rekomendasi tindakan konkret (Cairney, 2019). Analisis kebijakan bertindak sebagai jembatan antara teori akademik dan praktik pemerintahan sehingga keputusan publik dapat dipandu oleh bukti dan logika (Howlett, 2014). Pendekatan ini menjadi penting karena kebijakan publik menghadapi kompleksitas yang tinggi, baik dari sisi aktor, institusi, maupun dinamika sosial.

Analisis kebijakan mencakup kegiatan, seperti pemetaan masalah, evaluasi alternatif kebijakan, dan penilaian dampak potensial sebelum atau setelah implementasi (Dunn, 2017). Analisis mengidentifikasi secara kritis “apa yang dilakukan pemerintah, mengapa dilakukan, dan apa pengaruhnya” bagi masyarakat (Sanderson, 2002). Kajian ini membedakan analisis deskriptif (apa yang terjadi) dan normatif (apa yang sebaiknya terjadi) sebagai bagian dari kerangka kerja analitis (Dunn, 2017). Karena itu, kemampuan untuk menerjemahkan hasil penelitian ke dalam rekomendasi dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan publik (Akdoğan, 2015). Sebagai rangkaian tindakan, analisis kebijakan menjadi instrumen strategis bagi pemerintahan yang ingin meningkatkan efektivitas dan keadilan kebijakan publik.

Organisasi pemerintah atau non-profit dapat menghindari keputusan yang kurang berbasis bukti dan respon yang reaktif. Analisis yang baik menuntut pengumpulan data yang tepat,

pengukuran hasil yang relevan, serta analisis alternatif yang realistis (Dye, 2013). Nilai-nilai sosial dan politik turut memengaruhi proses analisis sehingga tidak sekadar teknis atau netral (Dunn, 2017). Metode analisis kebijakan meliputi kombinasi kualitatif dan kuantitatif, evaluasi, simulasi, serta pemodelan—sesuai karakter permasalahan yang dihadapi (Pal, 2014). Analisis kebijakan menjadi landasan penting dalam merancang kebijakan publik yang adaptif dan responsif terhadap tantangan kompleks.

2.1.2 Pendekatan Analisis Kebijakan

Pendekatan normatif dalam analisis kebijakan menilai kebijakan publik berdasarkan nilai-nilai dan tujuan sosial yang ingin dicapai oleh masyarakat. Di sisi lain, pendekatan empiris menggunakan data dan metode ilmiah, seperti statistik dan studi kasus untuk mengevaluasi dampak kebijakan secara objektif (Dunn, 2017). Pendekatan politis meninjau dinamika kekuasaan, aktor, jaringan, dan konflik kepentingan yang muncul dalam proses kebijakan publik (Howlett & Ramesh, 2003). Sementara itu, pendekatan partisipatif menekankan keterlibatan pemangku kepentingan dan masyarakat sipil agar kebijakan lebih inklusif dan memiliki legitimasi demokratis (Treib, Meyer, & Maggetti, 2021). Dengan mengkombinasikan keempat pendekatan tersebut, analisis kebijakan dapat menghasilkan desain intervensi yang lebih kuat dan relevan bagi konstelasi sosial-politik yang nyata.

Pendekatan integratif atau *policy integration* mengajak pembuat kebijakan menggabungkan instrumen lintas sektor agar intervensi tidak bekerja secara terpisah. Misalnya, kebijakan kesehatan, kebijakan lingkungan, dan kebijakan ekonomi dapat saling mendukung bila dikelola secara terpadu (Treib et al., 2021). Pendekatan ini juga memungkinkan adaptasi instrumen kebijakan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal seperti globalisasi atau krisis ekonomi (Howlett, 2014). Analisis kebijakan memerlukan pemilihan metode berdasarkan konteks, skala, dan sumber daya yang tersedia dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan yang tepat dapat meningkatkan peluang kebijakan berjalan dengan efektif, efisien, dan adil.

Pendekatan partisipatif maupun politis semakin penting dalam konteks pemerintahan modern yang menuntut transparansi

dan akuntabilitas. Keterlibatan masyarakat tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan tetapi juga memperkaya evaluasi kebijakan dengan perspektif langsung dari penerima manfaat. Analisis empiris tetap memegang peran kuat dalam menghasilkan bukti kuantitatif dan kualitatif, namun pendekatan normatif memberikan landasan nilai bagi keputusan kebijakan (Pal, 2014). Para pembuat kebijakan pada dasarnya harus melakukan pemilihan pendekatan yang sangat bergantung pada karakteristik masalah publik dan ekosistem institusional yang ada. Pendekatan yang tepat akan memperkuat kualitas rekomendasi kebijakan dan meningkatkan peluang keberhasilan implementasi.

2.1.3 Bentuk-Bentuk Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan memiliki beberapa bentuk utama, yaitu deskriptif, evaluatif, prediktif, dan preskriptif. Bentuk deskriptif fokus pada pemetaan proses, aktor dan dinamika kebijakan publik yang sedang berjalan (Weimer & Vining, 2024). Analisis evaluatif kemudian mengukur sejauh mana kebijakan yang dilaksanakan berhasil mencapai tujuannya, serta menilai efisiensi dan dampak kebijakan tersebut. Analisis prediktif memperkirakan konsekuensi alternatif kebijakan sebelum diterapkan, sedangkan analisis preskriptif memberikan rekomendasi kebijakan terbaik berdasarkan kriteria yang ditetapkan (Dunn, 2017). Kombinasi dari keempat bentuk ini memungkinkan pembuat kebijakan untuk memahami masalah secara komprehensif dan merancang opsi yang informatif.

Analisis deskriptif membantu memahami bagaimana kebijakan terbentuk, siapa saja aktor yang terlibat, dan bagaimana alur pengambilan keputusan berlangsung. Analisis evaluatif sering menggunakan indikator kinerja, studi kasus, dan survei untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi kebijakan (Fischer, Miller, & Sidney, 2007). Analisis prediktif memanfaatkan model simulasi, skenario, dan proyeksi untuk meramalkan dampak kebijakan alternatif sebelum keputusan dibuat (Dunn, 2017). Sementara itu, analisis preskriptif menuntut penetapan kriteria evaluasi yang jelas (efektivitas, efisiensi, keadilan) agar rekomendasi kebijakan dapat diterapkan secara konkret (Weimer & Vining, 2024). Dengan demikian, pemilihan bentuk-analisis harus sinkron dengan tujuan

penelitian atau evaluasi kebijakan dan karakteristik konteks publik yang dihadapi.

Ketika memilih bentuk analisis, analis harus mempertimbangkan keterbatasan data, waktu, dan kapasitas institusi yang tersedia. Terkadang hasil dari analisis prediktif atau preskriptif sulit diimplementasikan bila institusi belum siap atau kondisi politik berubah cepat (Dunn, 2017). Dalam banyak kasus, evaluasi kebijakan juga harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan adaptasi kebijakan terhadap perubahan lingkungan sosial-ekonomi (Fischer et al., 2007). Pembuat kebijakan harus merencanakan siklus analisis yang mencakup tahap deskriptif hingga preskriptif agar kebijakan dapat terus diperbaiki.

2.2 Kebijakan Publik

2.2.1 Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan konsep utama dalam ilmu administrasi dan ilmu politik yang berhubungan langsung dengan peran pemerintah dalam mengelola kepentingan masyarakat. Pemerintah merancang kebijakan publik untuk mencapai tujuan bersama dan menyelesaikan masalah publik yang membutuhkan intervensi negara. Menurut Anderson (2003), kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang berorientasi pada tujuan tertentu dan diikuti oleh pelaku atau kelompok pelaku pemerintah dalam menangani persoalan publik. Anderson menegaskan bahwa kebijakan publik bukan keputusan sesaat, tetapi suatu rangkaian tindakan yang berkelanjutan untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh pemerintah.

Dye (2013) menjelaskan bahwa kebijakan publik mencakup apa pun yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam pandangan ini, pemerintah bertindak secara aktif ketika mengeluarkan regulasi, menetapkan program, atau mengalokasikan sumber daya publik. Keputusan untuk tidak bertindak juga menjadi bagian dari kebijakan karena berdampak pada masyarakat. Definisi Dye menegaskan bahwa kebijakan publik selalu memiliki konsekuensi sosial, ekonomi, dan politik bagi warga negara. Pemerintah menetapkan kebijakan melalui pilihan-pilihan

strategis yang mencerminkan prioritas nasional dan kebutuhan masyarakat.

Selain teori klasik, teori kontemporer juga memperluas pemahaman tentang kebijakan publik. Kebijakan publik didefinisikan sebagai tindakan dan keputusan pemerintah yang dirancang untuk mempengaruhi kondisi sosial melalui instrumen hukum, ekonomi, dan administratif. Pemerintah bertindak melalui kebijakan untuk menciptakan perubahan yang terukur dan berkelanjutan di tingkat masyarakat. Helper, Gray, Hughes, dan Roman (2021) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah mekanisme aktif pemerintah untuk mengarahkan perilaku organisasi dan individu menuju tujuan sosial yang lebih besar. Pemerintah menggunakan kebijakan untuk mengatur, mendorong, atau mengendalikan tindakan para pelaku ekonomi dalam sistem publik.

Li, Taeihagh, de Jong, dan Klinke (2020) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan hasil dari proses keputusan yang kompleks, melibatkan banyak aktor, dan memerlukan koordinasi lintas sektor. Pemerintah berperan aktif dalam merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan sosial dan risiko global. Koutras (2019) juga menambahkan bahwa kebijakan publik memainkan peran penting dalam mendukung keterbukaan informasi dan akses terhadap sumber daya pengetahuan, khususnya dalam kebijakan akses terbuka (*open access policy*). Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan publik berkembang sebagai instrumen dinamis yang menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat modern dan perkembangan teknologi informasi.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik bukan sekadar produk hukum, melainkan proses strategis yang mengintegrasikan nilai, tujuan, dan tindakan pemerintah. Pemerintah berperan sebagai pengambil keputusan utama yang menentukan arah pembangunan sosial dan ekonomi melalui kebijakan. Dalam konteks modern, kebijakan publik menuntut kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan bukti ilmiah untuk memastikan efektivitasnya. Kebijakan publik menjadi alat utama pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara

2.2.2 Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik biasanya diuraikan melalui beberapa tahap, yakni identifikasi masalah, formulasi agenda, perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi (Kingdon, 2014). Pada tahap identifikasi masalah, pembuat kebijakan mengamati kondisi sosial atau ekonomi yang membutuhkan intervensi, kemudian menetapkan isu yang akan dimasukkan ke agenda (Kingdon, 2014). Selanjutnya, tahap formulasi kebijakan memerlukan perumusan alternatif, analisis biaya-manfaat, serta konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait (Pressman & Wildavsky, 1973). Tahap implementasi melibatkan berbagai institusi yang menjalankan program dan mengalokasikan sumber daya agar kebijakan berjalan di lapangan. Tahap evaluasi menilai hasil kebijakan, mengidentifikasi hambatan, dan memberikan masukan untuk kebijakan generasi berikutnya (Treib et al., 2021).

Pemahaman siklus proses kebijakan publik penting untuk merancang strategi intervensi yang tepat waktu dan efektif. Proses tersebut tidak bersifat linier melainkan dinamis, karena perubahan sosial, politik, dan ekonomi dapat mengubah prioritas agenda secara cepat (Dunn, 2017). Misalnya, dalam situasi darurat seperti pandemi, tahap identifikasi dan formulasi bisa berjalan bersamaan dengan implementasi karena tekanan waktu tinggi. Kebijakan publik harus tersedia fleksibilitas agar respon pemerintah dapat adaptif terhadap kondisi yang berubah cepat. Memahami siklus ini juga membantu pembuat kebijakan dalam menempatkan titik intervensi yang strategis pada setiap tahap.

Aktor dan institusi memainkan peran penting dalam proses kebijakan publik. Legislator, birokrat, masyarakat sipil, dan sektor swasta saling berinteraksi dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan (Easton, 1953). Faktor seperti kapasitas institusi, sumber daya manusia, struktur birokrasi, dan konteks politik sering menentukan keberhasilan tahapan implementasi (Pressman & Wildavsky, 1973). Evaluasi tidak hanya melihat hasil *output* (program selesai) tetapi juga *outcome* dan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Pengembangan dan evaluasi kebijakan publik memerlukan koordinasi antarsektor dan mekanisme umpan balik yang kuat agar kebijakan dapat diperbaiki secara berkelanjutan.

2.2.3 Jenis-Jenis Kebijakan Publik

Para akademisi dan praktisi membagi kebijakan publik ke dalam beberapa jenis utama, seperti, distributif, regulatif, redistributif, dan konstituen (Lowi, 1964). Kebijakan distributif mengalokasikan sumber daya kepada segmen masyarakat atau wilayah tertentu untuk mendorong pembangunan. Kebijakan regulatif menetapkan aturan dan standar perilaku agar tercapai tujuan publik seperti keamanan, kesehatan, dan lingkungan. Kebijakan redistributif memindahkan sumber daya dari kelompok yang lebih mampu ke kelompok yang kurang mampu guna mengurangi ketimpangan. Kebijakan konstituen berkaitan dengan pembentukan struktur lembaga pemerintahan, prosedur, dan tata kelola yang lebih luas.

Klasifikasi jenis kebijakan publik membantu pembuat dan analis kebijakan memahami mekanisme, distribusi manfaat, dan konsekuensi dari instrumen kebijakan. Kebijakan redistributif sering mengundang konflik politik karena melibatkan perubahan alokasi sumber daya, sedangkan kebijakan distributif cenderung kurang kontroversial karena bersifat lebih tersebar (Howlett, 2014). Kebijakan regulatif membutuhkan kapasitas institusional yang kuat untuk mengawasi dan menegakkan aturan. Analisis jenis kebijakan memungkinkan untuk menetapkan pendekatan yang paling sesuai untuk evaluasi dan implementasi kebijakan. Pembuat kebijakan dapat meningkatkan relevansi dan efektivitas intervensi publik.

Analisis jenis kebijakan publik juga mengarah pada cara setiap jenis memengaruhi distribusi kekuasaan dan akses sumber daya dalam masyarakat. Kebijakan konstituen biasanya membuka kesempatan untuk reformasi institusional yang dapat memengaruhi partisipasi demokratis dan tata kelola pemerintahan. Kebijakan distributif dan regulatif pada dasarnya memerlukan pengukuran dampak langsung terhadap penerima manfaat atau yang diatur. Pemahaman yang baik terhadap jenis kebijakan publik memperkuat kemampuan pembuat kebijakan dalam merancang dan mengevaluasi intervensi yang adil dan tepat sasaran.

2.2.4 Kriteria Kebijakan Publik

Pembuat kebijakan dan analis menyepakati bahwa kebijakan publik yang berkualitas harus memenuhi sejumlah kriteria, seperti efektivitas, efisiensi, keadilan, responsivitas, dan legitimasi. Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan menyelesaikan masalah publik (Weimer & Vining, 2024). Efisiensi menunjukkan sejauh mana sumber daya digunakan secara optimal untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Keadilan menuntut bahwa distribusi manfaat dan beban dari kebijakan publik dilakukan secara proporsional dan tidak diskriminatif (OECD, 2024). Responsivitas artinya kebijakan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang berubah, sedangkan legitimasi tercapai ketika kebijakan memperoleh dukungan sosial dan institusional yang luas.

Penilaian atas kriteria tersebut memungkinkan pembuat kebijakan melakukan evaluasi internal dan eksternal terhadap kebijakan yang diterapkan. Analisis kebijakan yang baik menggabungkan indikator kuantitatif (seperti biaya, waktu, cakupan) dengan aspek normatif (seperti keadilan dan legitimasi) dalam evaluasi (Fischer, Miller, & Sidney, 2007). Dengan melakukan pengukuran berdasar kriteria tersebut, pembuat kebijakan dapat melakukan revisi secara tepat waktu atau mengembangkan kebijakan baru. Kriteria tersebut juga menjadi dasar penyusunan standar monitoring dan evaluasi kebijakan publik pada tingkat nasional maupun daerah. Selaras dengan perubahan sosial dan teknologi, kriteria evaluasi kebijakan publik juga terus berkembang agar tetap relevan dalam konteks pemerintahan modern.

2.3 Konsep Barang Publik

2.3.1 Definisi Barang Publik

Barang publik merupakan konsep penting dalam ekonomi dan kebijakan publik yang menjelaskan bentuk barang atau jasa yang dapat digunakan oleh semua orang tanpa menurunkan manfaat bagi pengguna lainnya. Pemerintah dan masyarakat menganggap barang publik sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial karena sifatnya yang non-rival dan non-eksklusif. Para ekonom menekankan bahwa tidak ada individu yang dapat dikecualikan dari penggunaannya, dan penggunaan oleh satu

orang tidak mengurangi ketersediaan untuk orang lain (Buchholz & Sandler, 2021). Pemerintah menyediakan barang publik untuk mengoreksi kegagalan pasar, sebab pasar sering tidak efisien dalam menyediakan layanan dengan karakteristik tersebut. Barang publik menjadi instrumen utama dalam memastikan keadilan akses terhadap sumber daya kolektif.

Barang publik dikategorikan pada beberapa tingkat, yaitu lokal, nasional, dan global, tergantung pada jangkauan manfaatnya. Barang publik lokal, seperti taman kota dan penerangan jalan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam wilayah tertentu. Barang publik nasional, seperti pertahanan dan pendidikan dasar berfungsi menjaga stabilitas dan kesejahteraan negara (Chin, 2021). Barang publik global, seperti pengendalian perubahan iklim dan kesehatan dunia memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia tanpa batas wilayah. Pembagian ini membantu pemerintah dan lembaga internasional dalam menentukan tanggung jawab serta mekanisme pembiayaan yang tepat.

Era ekonomi modern, para ilmuwan mengamati bahwa penyediaan barang publik sering menghadapi tantangan *free-rider*. Masyarakat cenderung menikmati manfaat tanpa ikut menanggung biaya penyediaan, yang menyebabkan kurangnya insentif untuk berkontribusi (Halonen-Akatwijuka & Pafilis, 2020). Pemerintah harus merancang kebijakan yang mendorong partisipasi kolektif agar penyediaan barang publik dapat berkelanjutan. Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa kombinasi regulasi dan mekanisme insentif dapat mengurangi perilaku *free-riding* secara signifikan. Keberhasilan penyediaan barang publik sangat bergantung pada kejelasan struktur kelembagaan dan tata kelola.

Selain barang publik konvensional, perkembangan teknologi digital telah memperluas definisi barang publik ke ranah data dan pengetahuan. Para peneliti menyebut sumber daya digital, seperti perangkat lunak *open-source*, data terbuka, dan standar digital sebagai *digital public goods* karena bersifat non-rival dan non-eksklusif (Nicholson, 2022; Ogonjo, 2024). Pemerintah dan organisasi global mulai menganggap infrastruktur digital sebagai barang publik baru yang penting bagi inklusi sosial dan pembangunan berkelanjutan. Upaya internasional seperti *Digital Public Goods Alliance* mendukung penyediaan sumber daya digital terbuka untuk masyarakat dunia. Dengan demikian, konsep barang

publik kini berkembang melampaui batas ekonomi tradisional menuju ruang digital yang lebih kolaboratif.

Para akademisi juga menekankan bahwa penyediaan barang publik memerlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan akses merata dan keberlanjutan barang publik melalui kebijakan dan anggaran publik (Reed et al., 2023). Sektor swasta dapat berperan melalui kemitraan publik-swasta untuk efisiensi dalam pembiayaan dan pengelolaan. Sementara itu, masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mengawasi serta memastikan transparansi penyediaan barang publik. Kolaborasi lintas sektor akan mendorong penyediaan barang publik dapat lebih efektif dan berdampak positif terhadap kesejahteraan sosial.

2.3.2 Tipe Barang atau Pelayanan

Para ekonom membedakan tipe barang atau pelayanan ke dalam kategori, seperti *pure public goods*, *impure public goods*, *club goods*, dan *common goods* berdasarkan kombinasi karakter non-rival dan non-excludable (Musgrave & Musgrave, 1989). *Pure public goods* adalah barang yang sepenuhnya tidak bisa dikecualikan dan tidak saling bersaing dalam konsumsi, seperti udara bersih dan pertahanan nasional. Sementara *impure public goods* memiliki elemen rivalitas atau eksklusivitas terbatas; *club goods* bersifat eksklusif namun tidak saling bersaing dalam konsumsi; dan *common goods* tidak dikecualikan tetapi mengalami persaingan dalam konsumsi, seperti sumber daya alam bersama (Ostrom, 1990). Klasifikasi ini membantu pembuat kebijakan menentukan instrumen penyediaan dan mekanisme regulasi yang paling sesuai. Dengan mengenali jenis barang atau pelayanan, pemerintah dapat merancang kerangka institusi dan pembiayaan yang lebih efisien serta adil.

Pemilihan instrumen kebijakan untuk tiap tipe barang publik harus disesuaikan dengan karakteristiknya. Misalnya, penyediaan *club goods* dapat dilakukan melalui mekanisme berlangganan atau keanggotaan, sedangkan *common goods* memerlukan regulasi ketat agar tidak mengalami over-use atau kerusakan (Kaul et al., 1999). Analisis tipe barang publik juga menuntut penilaian risiko, seperti *free-rider problem* atau *tragedy of the commons* serta mekanisme pemeriksaan akses dan efektivitas penyediaan. Dengan demikian, analisis kebijakan harus menggabungkan perspektif ekonomi,

institusi, dan sosial agar penyediaan barang publik tidak hanya efisien tetapi juga berkelanjutan. Pendekatan semacam ini meningkatkan kemungkinan hasil kebijakan yang bermanfaat secara luas dan tahan lama.

2.4 Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi, sosial, dan kelembagaan di tingkat lokal. Para ahli menekankan bahwa pembangunan daerah bukan hanya tentang peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang pemerataan hasil pembangunan dan peningkatan kualitas hidup penduduk. Pemerintah daerah berperan penting dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi aktivitas ekonomi lokal dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada. Kajian teoritis menyebutkan bahwa pembangunan daerah membutuhkan integrasi antara kapasitas lokal, struktur industri, dan kebijakan publik yang adaptif. Konsep ini memperlihatkan bahwa dinamika pembangunan selalu terkait dengan kemampuan daerah dalam memanfaatkan peluang dan mengelola tantangan yang muncul. (Kielesińska, 2021)

Teori pembangunan *endogenous* menjelaskan bahwa kemajuan ekonomi suatu wilayah bergantung pada kemampuan internal wilayah tersebut dalam mengelola sumber dayanya. Daerah yang memiliki sumber daya manusia berkualitas, jaringan inovasi yang kuat, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan akan tumbuh lebih cepat. Penelitian menunjukkan bahwa lembaga pendidikan tinggi dan riset memainkan peran strategis dalam mendorong inovasi dan memperkuat basis ekonomi lokal. Pemerintah daerah perlu membangun sistem kolaboratif antara sektor publik, swasta, dan akademik untuk menciptakan sinergi pembangunan. Dengan demikian, teori ini menegaskan bahwa ketergantungan terhadap investasi luar saja tidak cukup untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. (Rodionov, Rudskaia, Krasnova, & Zhogova, 2024)

Teori spesialisasi pintar (*smart specialisation*) menekankan pentingnya fokus pembangunan pada sektor unggulan yang sesuai dengan keunggulan komparatif suatu wilayah. Pendekatan ini mendorong daerah untuk menentukan bidang prioritas yang dapat

meningkatkan daya saing dan memperkuat kapasitas inovasi. Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam mengidentifikasi potensi unggulan dan mengarahkan kebijakan untuk mendukungnya. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa strategi spesialisasi pintar dapat mempercepat transformasi ekonomi daerah dan menciptakan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Teori ini membantu daerah dalam merancang strategi pembangunan berbasis potensi lokal dan kebutuhan global. (Ferreira, Marques, & Farinha, 2025)

Teori pembangunan daerah juga menyoroti pentingnya tata kelola yang baik dan efisiensi penggunaan anggaran publik. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap belanja publik diarahkan untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan produktivitas wilayah. Studi empiris menunjukkan bahwa efisiensi fiskal dan kualitas institusi publik berpengaruh langsung terhadap keberhasilan pembangunan regional. Daerah yang memiliki tata kelola transparan dan partisipasi masyarakat yang kuat cenderung mencapai hasil pembangunan yang lebih baik. Teori pembangunan daerah modern menegaskan perlunya kombinasi antara inovasi, tata kelola yang efektif, dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan (Paidi et al., 2025).

2.4.1 Pembangunan Kawasan Perdesaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan landasan hukum utama dalam pengaturan pemerintahan desa dan pembangunan kawasan perdesaan di Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 8, kawasan perdesaan didefinisikan sebagai wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, serta kegiatan ekonomi. Undang-undang ini menegaskan bahwa pembangunan kawasan perdesaan dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif. Pasal 83 menjelaskan bahwa kawasan perdesaan dibentuk berdasarkan kesamaan potensi sumber daya alam, kegiatan ekonomi, adat istiadat, sosial budaya, dan/atau kondisi geografis. Ketentuan ini menempatkan kawasan perdesaan sebagai bagian penting dari strategi pembangunan

nasional yang berbasis pada kemandirian desa dan pemerataan hasil pembangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menjabarkan secara lebih rinci ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Desa, termasuk mekanisme pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan. Pemerintah melalui regulasi ini menegaskan bahwa pembangunan kawasan perdesaan dapat dilaksanakan lintas desa dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kesesuaian tata ruang wilayah. Peraturan ini mengatur kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam menetapkan dan mengoordinasikan pembangunan kawasan perdesaan serta mekanisme kerja sama antardesa. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memperkuat koordinasi antardesa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi potensi ekonomi lokal. Dengan demikian, regulasi ini menjadi jembatan antara konsep dalam Undang-Undang Desa dan implementasi teknis di tingkat daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 memperbarui beberapa ketentuan dalam PP 43/2014 dengan menyesuaikan kebutuhan pelaksanaan Undang-Undang Desa, khususnya dalam aspek perencanaan dan pengawasan pembangunan kawasan perdesaan. Pemerintah mempertegas bahwa pengelolaan kawasan perdesaan harus terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) serta kebijakan nasional. PP ini juga memperkuat peran pemerintah kabupaten/kota dalam memfasilitasi kerja sama antardesa untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selain itu, peraturan ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat desa dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan. Dengan perubahan ini, pemerintah berupaya menciptakan tata kelola pembangunan kawasan perdesaan yang lebih responsif, partisipatif, dan berorientasi pada hasil.

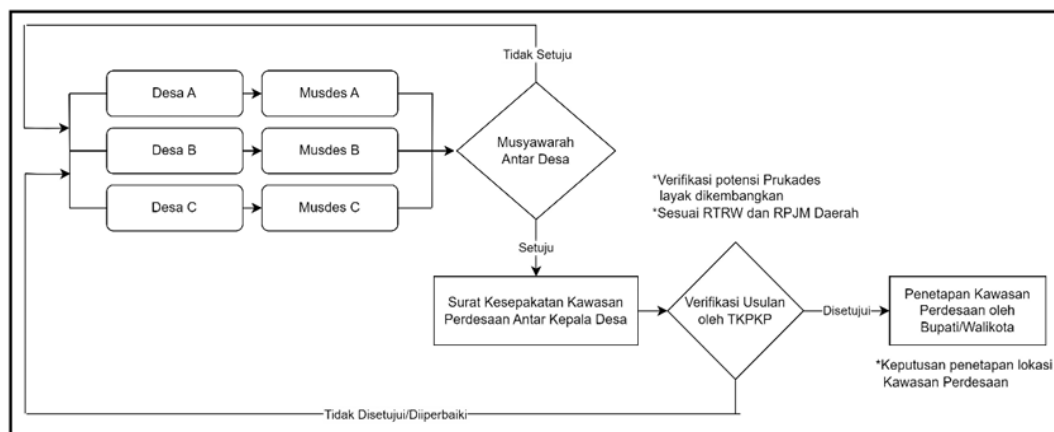
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 menetapkan daerah tertinggal secara nasional setiap lima tahun sekali dengan mempertimbangkan kriteria ekonomi masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, serta karakteristik daerah. Pemerintah pusat melakukan evaluasi berkala terhadap status daerah tertinggal

melalui usulan dari kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah. Ketentuan ini penting karena wilayah perdesaan sering kali termasuk dalam kategori daerah tertinggal dan oleh karena itu pembangunan kawasan perdesaan juga terhubung dengan kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Regulasi ini memfokuskan pada pengukuran dan penetapan wilayah yang memerlukan prioritas pembangunan, termasuk kawasan perdesaan di dalam satu kabupaten/kota. Dengan demikian, kebijakan ini menjadi salah satu dasar perencanaan strategis bagi kementerian dan pemerintah daerah dalam mengarahkan intervensi pembangunan di wilayah pedesaan.

Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2016 menjadi regulasi turunan yang pertama secara khusus mengatur penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan. Dalam peraturan ini, dijelaskan bahwa pembangunan kawasan perdesaan merupakan upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif serta pengelolaan potensi ekonomi lokal. Regulasi ini menetapkan tahapan pembangunan kawasan perdesaan, meliputi penetapan kawasan, perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Selain itu, peraturan ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat desa, dan sektor swasta dalam mengembangkan potensi ekonomi perdesaan. Peraturan ini menjadi dasar operasional bagi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan yang berorientasi pada kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keputusan Menteri Nomor 194 Tahun 2023 mengatur penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan dengan memuat unsur kelembagaan, pengusulan dan penetapan kawasan perdesaan, perencanaan pembangunan kawasan, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Regulasi ini ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dalam regulasi ini ditegaskan bahwa pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif. Keputusan Menteri ini memberikan pedoman operasional kepada pemerintah pusat,

pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, masyarakat desa, serta pihak lainnya terhadap penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan. Dengan adanya pedoman ini, proses mulai dari pengusulan, penetapan hingga evaluasi kawasan perdesaan dapat dilakukan lebih sistematis, transparan, dan akuntabel.



Gambar 3. Alur Proses Pengusulan dan Penetapan Kawasan Perdesaan Berdasarkan Usulan Beberapa Desa (*Bottom-Up*)

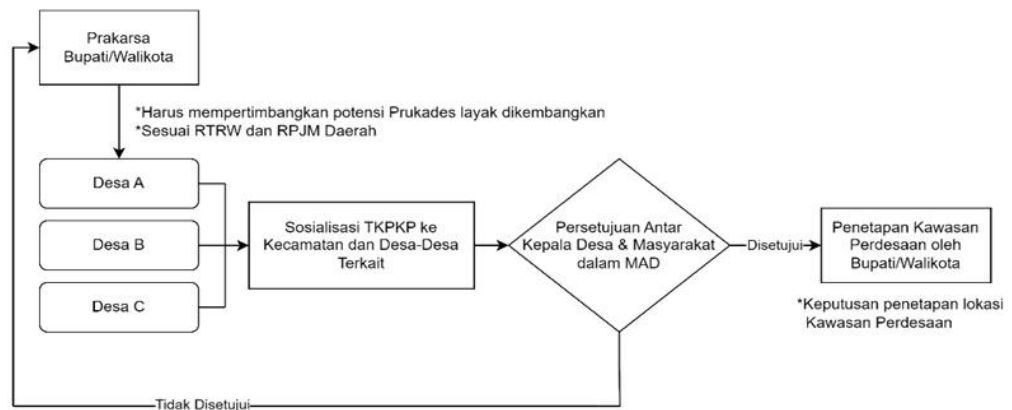
Gambar di atas menunjukkan alur proses pengusulan Kawasan Perdesaan secara bottom-up sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 194 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penetapan Kawasan Perdesaan. Proses ini berangkat dari inisiatif desa-desa yang memiliki kedekatan geografis maupun kesamaan potensi untuk dikembangkan secara terpadu. Setiap desa—misalnya Desa A, Desa B, dan Desa C—melakukan Musyawarah Desa (Musdes) untuk mengidentifikasi potensi, menentukan rencana kerja sama, serta merumuskan usulan pembentukan Kawasan Perdesaan yang mengacu pada kebutuhan dan karakteristik lokal. Hasil Musdes dari masing-masing desa kemudian dibawa ke tahap Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk menyatukan usulan dan memastikan bahwa arah pengembangan kawasan telah sesuai dengan potensi unggulan Prukades, RTRW kabupaten, serta RPJM Daerah.

Apabila dalam Musyawarah antar Desa dicapai kesepakatan, para kepala desa menyusun Surat Kesepakatan Kawasan Perdesaan antar Kepala Desa dan selanjutnya desa-desa di dalam kawasan perdesaan akan membentuk Badan Kerjasama Antar Desa

(BKAD) melalui Keputusan Bersama Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa yang akan mewakili Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa. BKAD ini akan menjadi motor tata kelola pembangunan kawasan perdesaan dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Membantu Pemerintah Desa dalam menyusun data inventarisasi dan identifikasi kualitatif dan kuantitatif tentang mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk serta sarana dan prasarana Desa;
2. Melakukan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pemerintah desa, masyarakat desa dan lembaga ekonomi yang ada di Desa dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan;
3. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kawasan Perdesaan sebagai bahan pelaporan TKPKP Kabupaten/Kota;
4. Melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan berkelanjutan.

BKAD akan menyampaikan dokumen formal pengusulan kawasan diajukan kepada Tim Koordinasi Kabupaten/Kota untuk Percepatan Pembangunan Perdesaan (TKPKP) guna dilakukan proses verifikasi kelayakan, kesesuaian dokumen, dan penapisan terhadap potensi kawasan. Jika usulan dinyatakan memenuhi kriteria, maka pemerintah daerah melalui Bupati/Wali Kota menerbitkan Keputusan Penetapan Lokasi Kawasan Perdesaan sebagai pengesahan akhir. Sebaliknya, apabila pada tahapan Musyawarah Antar Desa atau verifikasi TKPKP usulan belum disetujui, desa-desa pengusul diberikan kesempatan untuk memperbaiki atau menyempurnakan dokumen hingga memenuhi standar yang ditetapkan.



Gambar 4. Alur Proses Pengusulan dan Penetapan Kawasan Perdesaan Berdasarkan Prakarsa Bupati/Walikota (*Top Down*)

Gambar di atas menggambarkan alur penetapan Kawasan Perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati/Walikota, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 194 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penetapan Kawasan Perdesaan. Mekanisme ini merupakan pendekatan *top-down*, di mana pemerintah daerah terlebih dahulu mengidentifikasi desa-desa yang berpotensi membentuk sebuah kawasan berdasarkan pertimbangan teknokratik. Pada tahap awal, Bupati/Walikota menetapkan prakarsa pengembangan kawasan dengan memperhatikan potensi Prukades yang layak dikembangkan, serta memastikan kesesuaian dengan dokumen tata ruang (RTRW) dan arah pembangunan daerah (RPJM Daerah).

Selanjutnya, desa-desa yang berada dalam prakarsa kawasan—misalnya Desa A, Desa B, dan Desa C—mendapatkan penjelasan dan pemahaman melalui proses sosialisasi yang dilakukan oleh TKPKP kepada kecamatan dan desa-desa terkait. Sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan rencana kawasan, ruang lingkup kerja sama, serta manfaat ekonomi-sosial yang diharapkan. Setelah proses pemahaman bersama terbentuk, desa-desa kemudian mengikuti Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk memberikan persetujuan antara kepala desa dan masyarakat terkait usulan Kawasan Perdesaan. Apabila persetujuan dicapai, Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Penetapan Lokasi Kawasan Perdesaan sebagai bentuk legalisasi kawasan. Namun, apabila tidak terjadi kesepakatan, usulan kawasan tersebut dapat ditolak atau dikembalikan untuk perbaikan.

Pembangunan kawasan perdesaan merupakan strategi penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan. Menurut Dewi (2020), pembangunan kawasan perdesaan bukan sekadar pengembangan desa secara individual, tetapi merupakan upaya membangun keterpaduan antarwilayah desa dengan potensi yang serupa untuk mendorong pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan desa-kota. Dalam konteks Indonesia, hal ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan pengakuan terhadap hak asal-usul dan otonomi desa dalam menentukan arah pembangunan. Pendekatan ini menempatkan desa sebagai subjek pembangunan, bukan lagi sebagai objek kebijakan pemerintah pusat.

Secara konseptual, pembangunan kawasan perdesaan memiliki fungsi sebagai jembatan antara wilayah desa dan kota. Dengan membentuk pusat pertumbuhan baru di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), kawasan perdesaan berperan dalam memperkuat konektivitas ekonomi dan sosial antarwilayah (Dewi, 2020). Pendekatan ini juga membuka ruang kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan di tingkat lokal dan regional untuk menciptakan tata kelola ekonomi berbasis potensi lokal. Dengan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas masyarakat, serta kebijakan fiskal berupa dana desa, pembangunan kawasan perdesaan terbukti efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Lebih lanjut, pembangunan kawasan perdesaan juga diarahkan untuk menciptakan *economies of scale* yang dapat meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan biaya operasional. Hal ini diwujudkan melalui penggabungan beberapa desa yang memiliki kesamaan sumber daya dan komoditas unggulan untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi (Ambrose et al., 2019; Dewi, 2020). Dengan demikian, pembangunan kawasan perdesaan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan ekonomi berbasis komunitas yang berkelanjutan. Sinergi antara teknologi, inovasi, dan pelestarian kearifan lokal menjadi kunci utama agar pembangunan tidak menggerus identitas budaya masyarakat desa.

2.4.2 Kriteria Kawasan Perdesaaan

Kriteria pembangunan kawasan perdesaaan bersifat multidimensi dan kontekstual, mencakup dimensi ekonomi, sosial, kelembagaan, infrastruktur, dan lingkungan. Menurut Abreu et al. (2020), pembangunan kawasan perdesaaan tidak dapat diukur hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keterpaduan sosial, kapasitas kelembagaan, dan keberlanjutan lingkungan. Kriteria yang baik harus mampu menangkap kompleksitas wilayah perdesaaan, termasuk hubungan antara potensi sumber daya alam dan kemampuan masyarakat dalam mengelolanya. Pendekatan penilaian kawasan perdesaaan perlu menekankan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keberlanjutan sosial-lingkungan. Indikator yang digunakan harus mampu mengukur proses transformasi desa menuju kawasan yang mandiri dan produktif secara berkelanjutan.

Dimensi ekonomi lokal menjadi kriteria utama dalam berbagai penelitian karena mencerminkan kemampuan kawasan perdesaaan dalam menghasilkan pertumbuhan yang inklusif. Liu et al. (2021) menekankan bahwa peningkatan produktivitas, diversifikasi ekonomi, dan keterhubungan dengan pasar merupakan komponen penting dari kemandirian ekonomi perdesaaan. Aktivitas ekonomi yang beragam memperkuat ketahanan desa terhadap guncangan eksternal dan memperluas peluang kerja di luar sektor pertanian. Menurut Ramadhani (2024), keberhasilan pembangunan kawasan perdesaaan juga sangat bergantung pada kemampuan desa dalam mengembangkan rantai nilai lokal dan memanfaatkan potensi unggulan daerah. Kriteria ekonomi tidak hanya diukur melalui tingkat pendapatan, tetapi juga kemampuan kawasan dalam mendorong nilai tambah lokal dan distribusi manfaat ekonomi yang adil.

Aspek infrastruktur dan aksesibilitas juga menjadi fokus utama dalam pembangunan kawasan perdesaaan. Fitrianti (2022) menunjukkan bahwa akses terhadap jalan, air bersih, energi, transportasi, dan jaringan komunikasi memiliki dampak langsung terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Keterhubungan wilayah perdesaaan dengan pusat layanan publik meningkatkan mobilitas tenaga kerja, memperluas akses pasar, dan memperkuat integrasi antara desa dan kota. Menurut

Liu et al. (2024), pembangunan infrastruktur perdesaan harus memperhatikan prinsip keterjangkauan, keberlanjutan, dan pemerataan antardesa agar tidak menciptakan kesenjangan spasial. Indikator infrastruktur harus mencerminkan tingkat akses masyarakat terhadap layanan dasar dan konektivitas antarwilayah.

Dimensi modal manusia dan kesejahteraan sosial mencakup faktor-faktor, seperti pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan kualitas tenaga kerja. Abreu et al. (2020) menegaskan bahwa peningkatan kapasitas manusia merupakan prasyarat untuk membangun daya saing perdesaan secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan mendorong produktivitas serta kemampuan masyarakat dalam mengadopsi teknologi baru. Ramadhani (2024) menambahkan bahwa kesejahteraan sosial yang meningkat memperkuat kohesi sosial dan memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dimensi sosial menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana pembangunan kawasan perdesaan berorientasi pada manusia dan kesejahteraan bersama.

Selanjutnya, kelembagaan dan tata kelola berperan penting dalam menjamin efektivitas implementasi kebijakan pembangunan kawasan perdesaan. Menurut Mladenović (2025), tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Kelembagaan lokal yang kuat, termasuk organisasi desa dan lembaga ekonomi masyarakat, dapat mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan menjaga kesinambungan hasilnya. Liu et al. (2021) menekankan bahwa kolaborasi antardesa serta kemitraan dengan sektor swasta merupakan strategi kelembagaan yang efektif untuk memperkuat kapasitas kawasan perdesaan. Dimensi kelembagaan perlu dijadikan kriteria utama dalam menilai keberhasilan pembangunan kawasan perdesaan yang berkelanjutan.

Dimensi terakhir adalah lingkungan dan sumber daya alam, yang menjadi dasar bagi keberlanjutan pembangunan kawasan perdesaan. Liu et al. (2024) menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang bijak untuk menjaga keseimbangan antara produksi dan konservasi. Pembangunan kawasan perdesaan yang berorientasi pada keberlanjutan harus memperhitungkan daya dukung lingkungan, risiko bencana, dan adaptasi terhadap

perubahan iklim. Abreu et al. (2020) menjelaskan bahwa pendekatan pembangunan berbasis ekosistem dapat meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat perdesaan dalam jangka panjang. Kriteria lingkungan perlu diintegrasikan dalam setiap tahap perencanaan pembangunan kawasan perdesaan agar mampu menjamin keberlanjutan antar-generasi.

Secara keseluruhan, kriteria pembangunan kawasan perdesaan harus mencerminkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, kelembagaan, infrastruktur, dan lingkungan. Pendekatan multidimensi ini memungkinkan pengukuran yang lebih akurat terhadap kemajuan perdesaan sekaligus membantu perumusan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Mladenović (2025) menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan kawasan perdesaan sangat ditentukan oleh sejauh mana indikator-indikator tersebut diukur secara sistematis dan disesuaikan dengan konteks lokal. Pengembangan kriteria yang komprehensif dan terukur menjadi prasyarat penting dalam membangun kawasan perdesaan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

2.4.3 Desa Perbatasan

Desa perbatasan merupakan wilayah perdesaan yang berada pada batas administrasi antardaerah dan memiliki peran strategis dalam sistem pembangunan wilayah, khususnya dalam konteks pengembangan ekonomi regional. Dalam banyak kasus, desa perbatasan menghadapi kondisi ketertinggalan relatif akibat keterbatasan infrastruktur dasar, rendahnya akses pelayanan publik, serta lemahnya integrasi dalam sistem ekonomi daerah. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa desa perbatasan juga menyimpan potensi besar sebagai simpul produksi dan distribusi komoditas unggulan apabila dikembangkan melalui pendekatan kawasan yang terencana dan terintegrasi (Kuswara, 2008; Hidayah et al., 2024).

Dalam perspektif pengembangan kawasan ekonomi daerah, desa perbatasan tidak dapat diposisikan semata sebagai wilayah administratif pinggiran, melainkan sebagai bagian dari sistem ekonomi lintas wilayah yang saling terhubung. Setiawan et al. (2025) menjelaskan bahwa desa perbatasan memiliki peluang untuk berkembang sebagai pusat pertumbuhan baru berbasis sumber

daya lokal, terutama ketika didukung oleh konektivitas antardesa, penguatan rantai nilai komoditas, dan kelembagaan ekonomi desa yang efektif. Tanpa intervensi kebijakan berbasis kawasan, desa perbatasan cenderung mengalami kebocoran ekonomi ke wilayah tetangga yang lebih maju.

Kondisi tersebut relevan dengan karakteristik desa-desa perbatasan di Kabupaten Lampung Timur yang berbatasan langsung dengan Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Lampung Selatan. Desa-desa pada wilayah perbatasan dengan Kota Metro, seperti Desa Adirejo dan Kalibening di Kecamatan Pekalongan, Desa Adiwarno di Kecamatan Batanghari, serta Desa-desa di Kecamatan Metro Kibang, menunjukkan pola keterkaitan ekonomi yang kuat dengan wilayah perkotaan. Aktivitas pemasaran hasil pertanian, distribusi komoditas, dan mobilitas tenaga kerja lebih banyak terarah ke Kota Metro sebagai pusat jasa dan perdagangan. Pola ini mencerminkan fungsi desa perbatasan sebagai wilayah penyangga (*hinterland*) perkotaan, yang belum sepenuhnya memberikan nilai tambah ekonomi optimal bagi desa itu sendiri (Resti et al., 2025).

Sementara itu, desa-desa perbatasan Kabupaten Lampung Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah, khususnya di Kecamatan Pekalongan, Batanghari Nuban, dan Way Bungur, memiliki karakteristik perdesaan agraris dengan dominasi komoditas pertanian dan perkebunan. Desa-desa, seperti Wonosari, Trisnomulyo, Purwosari, Sritejo Kencono, serta desa-desa di Way Bungur menunjukkan potensi komoditas unggulan yang relatif homogen, namun masih dikelola secara parsial dan skala usaha kecil. Hidayah et al. (2024) menegaskan bahwa desa perbatasan agraris memerlukan pendekatan pembangunan kawasan untuk meningkatkan efisiensi produksi, memperkuat akses pasar, serta mendorong peningkatan nilai tambah melalui pengolahan dan hilirisasi komoditas.

Pada wilayah perbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan, yang meliputi desa-desa di Kecamatan Batanghari, Metro Kibang, Sekampung Udik, Waway Karya, dan Pasir Sakti, pola pembangunan perdesaan cenderung tersebar dan belum terintegrasi dalam satu kesatuan ekonomi kawasan. Desa-desa seperti Sumber Rejo, Purwodadi Mekar, Tri Tunggal, Jembrana, Labuhan Ratu, hingga Sindang Anom memiliki potensi sumber daya

lahan dan komoditas unggulan yang cukup besar, namun belum didukung oleh infrastruktur ekonomi kawasan dan kelembagaan bersama antar desa. Perbedaan arah kebijakan dan prioritas pembangunan antar kabupaten menyebabkan desa perbatasan berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam sistem pembangunan regional (Kuswara, 2008).

Pendekatan pembangunan kawasan perdesaan menjadi instrumen strategis dalam pengembangan kawasan ekonomi daerah di desa perbatasan. Pembangunan kawasan perdesaan dipahami sebagai pengintegrasian beberapa desa dalam satu kesatuan wilayah fungsional berbasis komoditas unggulan, keterkaitan ekonomi, dan konektivitas spasial. Sujito dan Ghofur (2025) menekankan bahwa pendekatan kawasan mampu memperkuat struktur ekonomi perdesaan melalui pengelolaan komoditas secara kolektif, penguatan rantai nilai, serta pengembangan kelembagaan ekonomi desa seperti BUMDes dan UMKM berbasis lokal.

Dalam konteks kajian ini, pembangunan kawasan perdesaan di desa perbatasan Kabupaten Lampung Timur diarahkan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap wilayah tetangga sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Putri (2025) menegaskan bahwa tata kelola desa yang partisipatif dan kolaboratif merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pengembangan kawasan perdesaan, terutama di wilayah perbatasan yang memiliki keterkaitan sosial dan ekonomi lintas kabupaten. Oleh karena itu, sinergi antar desa, antar kecamatan, dan antar kabupaten menjadi prasyarat penting dalam pembentukan kawasan ekonomi perdesaan yang berkelanjutan.

Desa-desanya perbatasan di Kabupaten Lampung Timur memiliki peran strategis dalam pengembangan kawasan ekonomi daerah berbasis komoditas unggulan. Tantangan utama yang dihadapi meliputi fragmentasi pembangunan, keterbatasan infrastruktur pendukung ekonomi, serta belum optimalnya integrasi rantai nilai komoditas. Dengan penerapan skema pembangunan kawasan perdesaan yang terencana, terintegrasi, dan berbasis potensi unggulan, desa-desanya perbatasan berpotensi menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat konektivitas dan keseimbangan pembangunan antarwilayah.

2.4.4 Komoditas Unggulan

Komoditas unggulan merupakan faktor strategis dalam pembangunan kawasan pedesaan karena berperan sebagai penggerak utama perekonomian lokal. Menurut Anggarawati dan Suwarnata (2021), komoditas unggulan didefinisikan sebagai produk atau hasil pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi, kontribusi besar terhadap pendapatan masyarakat, dan potensi untuk dikembangkan secara berkelanjutan di wilayah tertentu. Komoditas ini menjadi tumpuan utama aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan, terutama karena kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja serta menghasilkan nilai tambah yang signifikan bagi daerah. Pengembangan komoditas unggulan menjadi kunci dalam memperkuat basis ekonomi kawasan pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan komoditas unggulan tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penciptaan nilai tambah melalui inovasi dan diversifikasi produk. Anggarawati dan Suwarnata (2021) menegaskan bahwa strategi pembangunan kawasan pedesaan harus diarahkan pada upaya memperkuat rantai nilai komoditas, mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat pedesaan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar karena komoditas tidak lagi dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi sudah melalui proses pengolahan yang meningkatkan daya saing dan harga jual. Selain itu, dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan kebijakan pemerintah daerah menjadi elemen penting dalam memastikan keberhasilan pengembangan komoditas unggulan di tingkat lokal.

Identifikasi dan pengembangan komoditas unggulan merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi pedesaan yang berkelanjutan. Komoditas seperti padi, cabai, kelapa sawit, dan sapi tidak hanya memiliki nilai ekonomi tinggi, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat daya saing daerah. Pembangunan kawasan pedesaan yang berbasis pada penguatan komoditas unggulan menjadi pendekatan yang relevan dan efektif dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif di wilayah pedesaan Indonesia.

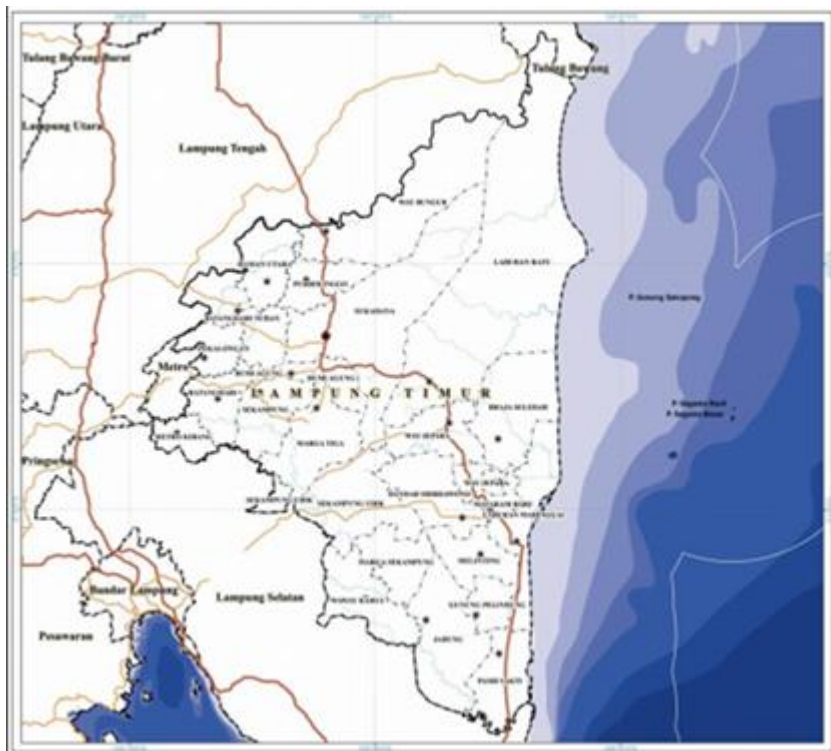


BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH

3.1 Aspek Fisik Dasar Lahan

Kabupaten Lampung Timur terletak pada posisi: 105015' BT-106020' BT dan 4037' LS-5037' LS, dengan luas wilayah kurang lebih 3.860,92 km². Kabupaten Lampung Timur berbatasan dengan beberapa daerah dan Laut Jawa. Kabupaten Lampung Timur memiliki daerah administrasi sebanyak 264 desa yang tersebar di 24 kecamatan serta memiliki wilayah perairan/laut di sebelah timur.



Gambar 5. Peta Wilayah Administrasi Lampung Timur
Sumber: Badan Geospasial Indonesia dalam RPJMD Lampung Timur 2025-2029, 2025

Pada gambar peta wilayah di atas dapat dilihat batas administrasi Kabupaten Lampung Timur. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Tulang Bawang, sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Selatan berbatasan dengan Lampung Selatan dan sebelah Barat

berbatasan dengan Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah. Kondisi Topografi di Kabupaten Lampung Timur secara umum meliputi kelas kelerengan datar, berombak, bergelombang dan berbukit kecil yang sebagian besar wilayah berada pada ketinggian rendah <200 mdpl.

Tabel 2. Luas Peruntukkan Lahan Kabupaten Lampung Timur

No	Peruntukkan Lahan	Luas (Ha)
1	Hutan Lahan Kering Sekunder	15.340,46
2	Hutan Mangrove Primer	2,46
3	Hutan Mangrove Sekunder	2.460,75
4	Hutan Rawa Sekunder	37.328,94
5	Lahan Terbuka	49,44
6	Perkebunan	4.924,17
7	Permukiman	46.069,28
8	Pertanian Lahan Kering	66.277,07
9	Pertanian Lahan Kering Campur	95.265,89
10	Rawa	4.461,5
11	Sawah	35.308,16
12	Semak Belukar Rawa	69.249,75
13	Tambak	7.886,08
14	Tubuh Air	1.188,83

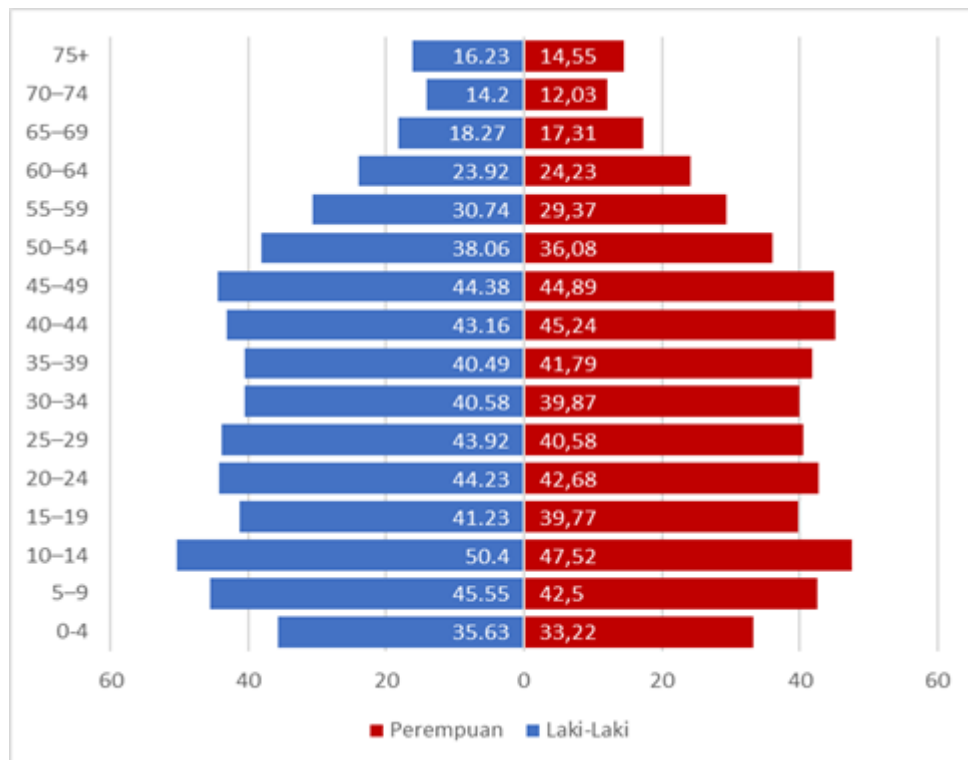
Sumber: BPKHTL.XX/SDHTL.2.3/10/2024 dala RPJMD Lampung Timur 2025-2029, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat Kabupaten Lampung Timur memiliki struktur penggunaan lahan yang mencerminkan karakter wilayah agraris dan perdesaan dengan tingkat produktivitas lahan yang tinggi. Berdasarkan data peruntukan lahan, sebagian besar wilayah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, baik berupa lahan kering, lahan kering campuran, maupun lahan sawah, yang secara keseluruhan mencakup lebih dari setengah luas wilayah kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung utama perekonomian masyarakat di Kabupaten Lampung Timur.

3.2 Aspek Kependudukan dan Sosial

3.2.1 Kependudukan

Kabupaten Lampung Timur memiliki sebaran penduduk yang relatif merata. Berdasarkan data BPS (2025), Kabupaten Lampung Timur memiliki penduduk sebesar 1,22 juta orang. Terdapat 3 Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 75 ribu orang, yaitu Kecamatan Labuhan Manggarai sebanyak 79,97 ribu orang, kecamatan sekampung udik dengan jumlah 79,70 ribu orang, dan kecamatan Sukadana 78,67 ribu orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsentrasi penduduk di Kabupaten Lampung Timur berada di wilayah pesisir dan dataran rendah. Wilayah ini umumnya memiliki akses lebih baik terhadap sarana ekonomi, pendidikan dan transportasi.

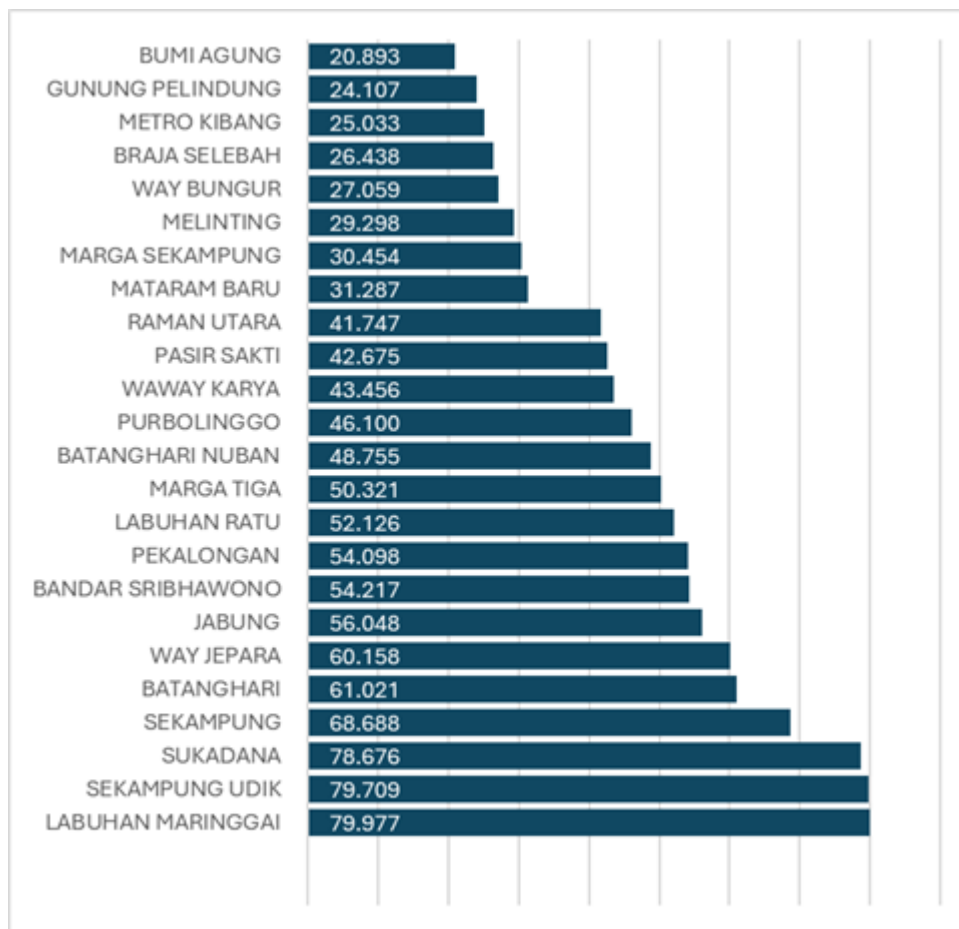


Gambar 6. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Timur dalam ribu orang, 2024

Sumber: BPS, 2025

Berdasarkan gambar di atas, struktur penduduk Kabupaten Lampung Timur yang didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 tahun). Kelompok Usia 10-14 tahun memiliki porsi tertinggi, menandakan bahwa kabupaten Lampung Timur memiliki struktur

muda dan potensi pertumbuhan penduduk masih tinggi. Sementara itu, kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas) mulai menunjukkan peningkatan yang mencerminkan membaiknya tingkat kesehatan dan angka harapan hidup masyarakat. Selain itu jika dilihat dari jenis kelamin, secara umum terlihat relatif seimbang.



Gambar 7. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Lampung Timur Tahun 2025

Sumber: Dinas Dukcapil Lampung Timur, 2025

Berdasarkan Gambar di atas dapat dilihat bahwa distribusi penduduk di Kabupaten Lampung Timur menunjukkan kesenjangan antarwilayah dengan kecenderungan konsentrasi di pusat administrasi dan kawasan pesisir produktif. Tiga kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Labuhan Maringgai dengan populasi sebesar 79.977 jiwa, Sekampung Udik sebanyak

79.709 jiwa dan Sukadana sebesar 78.676 jiwa. Ketiganya merupakan wilayah yang memiliki posisi strategis — Sukadana sebagai ibu kota kabupaten, Sekampung Udik sebagai wilayah agraris produktif, dan Labuhan Maringgai sebagai kawasan pesisir dengan aktivitas ekonomi perikanan dan perdagangan.

3.2.2 Tenaga Kerja Lampung Timur

Tenaga Kerja merupakan salah satu faktor pendukung untuk mengembangkan kawasan perdesaan. Selain itu, data tenaga kerja juga menunjukkan bagaimana ketersediaan sumber daya manusia untuk mendorong ekonomi di suatu wilayah. Dari beberapa indikator tenaga kerja, dapat dilihat pondasi ekonomi Kabupaten Lampung Timur yang ditinjau berdasarkan sektor lapangan pekerjaan dan pendidikan.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang bekerja Selama seminggu yang lalu menurut lapangan pekerjaan utama dan jenis kelamin di Kabupaten Lampung Timur, 2024

Sektor	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pertanian	209.286	81.221	290.507
Manufaktur	61.520	17.010	78.530
Jasa	105.597	115.333	220.930
Jumlah	376.403	213.564	589.967

Sumber: BPS, 2025

Struktur ekonomi Lampung Timur masih didominasi oleh sektor primer, tentunya hal ini juga mencerminkan struktur tenaga kerja yang masih terkonsentrasi di sektor pertanian. Berdasarkan data BPS 2025, pada 2024 terdapat 290.507 orang (49,2%) yang bekerja di sektor pertanian khususnya di subsektor tanaman pangan, perkebunan dan perikanan. Setelah sektor pertanian, sektor jasa juga memiliki penyerapan tenaga kerja yang tinggi di Lampung Timur, yaitu sebesar 220.930 orang (37,5%). Perkembangan penyerapan tenaga kerja di sektor jasa ini menunjukkan mulai berkembangnya aktifitas perdagangan, pendidikan, kesehatan dan layanan lainnya yang mendukung perekonomian lokal.

Tabel 4. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Lampung Timur, 2024

Pendidikan	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Tenaga Kerja	Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja
≤SD	202.209	1.617	203.826	99,21
SMP	146.889	1.738	148.627	98,83
SMA	194.842	15.004	209.846	92,85
Perguruan Tinggi	46.027		46.027	100
Jumlah	589.967	18.359	608.326	96,98

Sumber: BPS, 2025

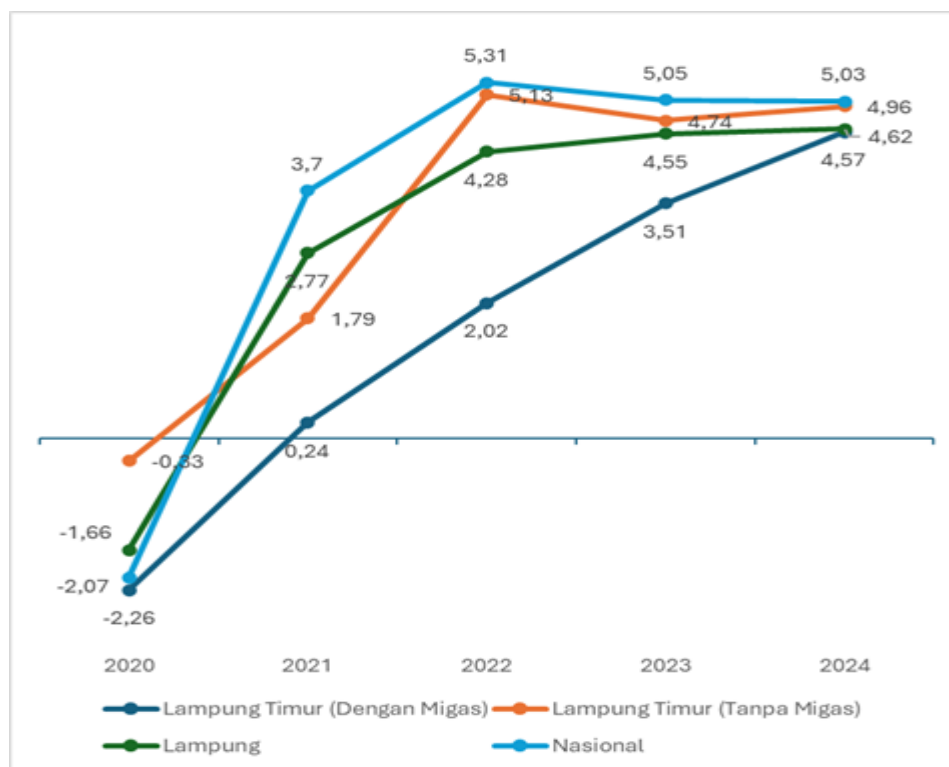
Jika dilihat dari tingkat pendidikan, proporsi angkatan kerja terdidik di Kabupaten Lampung Timur masih kecil dan proporsi tenaga kerja berpendidikan SD masih cukup tinggi. Berdasarkan data dari BPS (2025), pada 2024 jumlah angkatan kerja dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi sebesar 46.027 orang atau 7,6% dari total tenaga kerja. Hal ini dapat mengindikasikan keterbatasan peluang kerja formal di Kabupaten Lampung Timur sehingga minat untuk melanjutkan pendidikan tinggi menjadi rendah karena peluang kerja tidak sebanding. Sebanyak 203.826 orang (33,5%) angkatan kerja memiliki pendidikan SD. Data ini menggambarkan masih banyaknya angkatan kerja dengan keterampilan dasar, biasanya angkatan kerja ini berada di sektor pertanian yang memerlukan keterampilan dasar.

3.3 Aspek Ekonomi

3.3.1 Struktur Ekonomi Lampung Timur

Perekonomian Kabupaten Lampung Timur dalam lima tahun terakhir memperlihatkan tren pertumbuhan yang positif setelah sempat tertekan akibat pandemi. Pada 2020, ekonomi daerah

mengalami kontraksi sebesar 2,26 persen sebagai dampak dari penurunan aktivitas ekonomi secara nasional. Meski demikian, sejak 2021 hingga 2024, pertumbuhan ekonomi kembali bergerak ke arah positif, mencerminkan proses pemulihan yang konsisten dan peningkatan produktivitas masyarakat. Capaian ini tidak terlepas dari peran pemerintah daerah yang terus mendorong pembangunan ekonomi melalui peningkatan investasi, penguatan sektor-sektor unggulan berbasis sumber daya lokal, pengembangan nilai tambah produk daerah, serta percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi dan mendorong terciptanya pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.



Gambar 8. Pertumbuhan Ekonomi Lampung Timur, Provinsi Lampung dan Nasional 2020-2024
Sumber: BPS, 2025

Perbandingan pertumbuhan ekonomi Lampung Timur, Provinsi Lampung dan Nasional 2020–2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Timur mengalami dinamika yang cukup signifikan, terutama dalam perbedaan antara sektor migas dan nonmigas. Pada 2020, seluruh wilayah mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19, di mana Lampung Timur mencatat penurunan paling dalam (-2,26% dengan migas dan -2,07% tanpa migas).

Memasuki 2021, perekonomian mulai pulih, meskipun pertumbuhan Lampung Timur (0,24%) masih tertinggal dibandingkan rata-rata Provinsi Lampung (2,77%) dan nasional (3,70%). Puncak pemulihan terjadi pada 2022 dengan pertumbuhan Lampung Timur tanpa migas mencapai 5,13%, hampir setara dengan rata-rata nasional (5,31%), menunjukkan kekuatan sektor pertanian dan perdagangan lokal dalam mendorong ekonomi daerah. Namun, pertumbuhan dengan migas tetap lebih rendah (2,02%), mengindikasikan fluktuasi di sektor energi. Pada 2023–2024, pertumbuhan ekonomi daerah relatif stabil di kisaran 4,5–5%, dengan Lampung Timur tanpa migas tumbuh lebih baik daripada rata-rata provinsi, menandakan ketahanan ekonomi nonmigas yang semakin kuat. Secara keseluruhan, tren ini mencerminkan keberhasilan pemulihan pascapandemi sekaligus menunjukkan perlunya strategi diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor migas dan memperkuat fondasi pertumbuhan berbasis sektor produktif lokal.

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lampung Timur atas dasar harga berlaku selama periode 2020–2024 memperlihatkan arah pertumbuhan ekonomi yang positif di hampir seluruh lapangan usaha. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap menjadi motor utama perekonomian daerah, dengan nilai meningkat dari Rp15.121,99 miliar pada 2020 menjadi Rp18.051,66 miliar pada 2024. Sektor Pertambangan dan Penggalan menunjukkan lonjakan yang cukup signifikan pada tahun 2020–2022, meskipun sempat mengalami perlambatan pada 2023 sebelum kembali tumbuh di tahun berikutnya. Sementara itu, Industri Pengolahan memperlihatkan pertumbuhan yang konsisten, menandakan adanya peningkatan nilai tambah terhadap komoditas primer unggulan daerah.

Sektor jasa dan perdagangan mulai memainkan peran strategis dalam struktur ekonomi Lampung Timur. Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran tumbuh pesat dari Rp3.603,72 miliar pada 2020 menjadi Rp6.842,56 miliar pada 2024, yang sebagian besar didorong oleh meningkatnya konsumsi masyarakat dan pulihnya mobilitas ekonomi pasca-pandemi. Pertumbuhan yang signifikan juga terlihat pada sektor Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Informasi dan Komunikasi, seiring dengan perkembangan aktivitas

logistik, pariwisata lokal, dan proses digitalisasi layanan publik. Selain itu, peningkatan berkelanjutan pada sektor Konstruksi dan Real Estat menunjukkan percepatan pembangunan infrastruktur serta meningkatnya kebutuhan akan ruang hunian dan area komersial.

Sektor publik, seperti Administrasi Pemerintahan, Jasa Pendidikan, dan Jasa Kesehatan juga mengalami kenaikan nilai tambah, mencerminkan penguatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan alokasi belanja daerah untuk sektor sosial. Secara agregat, nilai PDRB Kabupaten Lampung Timur meningkat dari Rp40.673,06 miliar pada 2020 menjadi Rp56.851,33 miliar pada 2024, menandakan proses pemulihan ekonomi yang solid sekaligus diversifikasi struktur ekonomi daerah. Tren ini mengindikasikan bahwa perekonomian Lampung Timur semakin dinamis, dengan kontribusi sektor jasa dan perdagangan yang terus berkembang dan memperkuat dominasi sektor pertanian sebagai basis utama ekonomi wilayah.

Tabel 5. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Lampung Timur (miliar rupiah), 2020–2024

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15.121,99	15.003,78	16.216,37	17.360,48	18.051,66
B	Pertambangan dan Penggalian	8.385,44	10.614,45	13.203,12	12.228,09	12.700,75
C	Industri Pengolahan	3.435,17	3.739,61	3.953,75	4.272,76	5.008,21
D	Pengadaan Listrik dan Gas	265,2	200,82	227,56	225,71	168,74
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	23,23	25,18	26,63	28,63	30,42
F	Konstruksi	2.328,28	2.598,25	2.836,31	3.324,59	3.477,29
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.603,72	3.837,86	4.770,31	5.916,60	6.842,56

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023*	2024**
H	Transportasi dan Pergudangan	794,53	829,32	1.102,37	1.469,48	1.687,88
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	491,81	493,02	561,69	695,82	764,39
J	Informasi dan Komunikasi	1.623,97	1.710,21	1.743,34	1.905,04	2.077,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	558,18	596,98	625,43	697,12	763,18
L	Real Estat	897,37	916,37	966,36	997,31	1.102,26
M, N	Jasa Perusahaan	32,06	32,66	39,12	43,82	49,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.288,01	1.346,70	1.363,05	1.421,25	1.571,86
P	Jasa Pendidikan	1.125,75	1.163,01	1.231,88	1.319,66	1.456,76
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	304,56	322,79	327,69	344,7	380,56
R, S, T, U	Jasa Lainnya	393,79	386,58	514,88	619,31	718,41
Produk Domestik Regional Bruto		40.673,06	43.817,61	49.709,86	52.870,39	56.851,33

Sumber: BPS Lampung Timur, Daerah Dalam Angka 2025, diolah

3.3.2 Komoditas Unggulan Subsektor Pertanian dan Perkebunan Lampung Timur

Lampung Timur memiliki beberapa komoditas unggulan di sektor pertanian yang tercantum pada RPJMD 2025–2029. Di subsektor perkebunan, komoditas unggulan Lampung Timur meliputi lada, kakao, karet kelapa dan kelapa sawit. Komoditas subsektor perkebunan Lampung Timur tidak hanya menjadi tumpuan di provinsi Lampung, tetapi juga menjadi pengembangan prioritas di tingkat nasional yang dapat dilihat dari RPJMN 2025–2029. Selain subsektor perkebunan, subsektor tanaman pangan merupakan salah satu subsektor yang paling strategis di Kabupaten Lampung Timur. Subsektor ini merupakan penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan kategori pertanian dan sebagai subsektor yang memiliki lahan paling luas dibandingkan subsektor pertanian lainnya. Untuk lebih detil, berikut disampaikan produksi komoditas

unggulan pada subsektor perkebunan dan tanaman pangan menurut kecamatan di Lampung Timur tahun 2024.

Tabel 6. Produksi Komoditas Perkebunan dan Tanaman Pangan (dalam ton) Menurut Kecamatan di Lampung Timur Tahun 2024

Kecamatan	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kakao	Lada	Padi Sawah	Jagung
Metro Kibang	172	121	170	30		1.727	45
Batanghari	297	369	221	51		45.237	9
Sekampung	284	250	860	30		34.029	13
Marga Tiga	615	717	320	370	320	11.847	53
Sekampung Udik	556	876	471	736	63	23.826	82
Jabung	870	443	116	64	75	67.207	68
Pasir Sakti	437	203	79	4		44.406	11
Waway Karya	1.071	167	432	24		30.673	46
Marga Sekampung	70	200	200	75	91	530	90
Labuhan Maringgai	885	121	158	71	7	29.035	286
Mataram Baru	160	496	65	335	14	17.563	5
Bandar Sribhawono	78	1.075	153	509	60	15.087	157
Melinting	263	980	299	62	390	7.598	46
Gunung Pelindung	160	567	300	34	160	14.205	6
Way Jepara	245	550	512	362	48	23.553	18
Braja Selehah	85	348	255	53		18.769	9

Kecamatan	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kakao	Lada	Padi Sawah	Jagung
Labuhan Ratu	99	804	1.000	254	17	9.612	6
Sukadana	348	447	306	280	150	20.066	21
Bumi Agung	110	445	90	39	66	8.861	11
Batanghari Nuban	155	694	87	89	38	32.088	21
Pekalongan	83	815	153	82		21.697	13
Raman Utara	232	448	169	5		32.319	9
Purbolinggo	61	259	79	51		7.420	34
Way Bungur	43	183	107	7		4.248	17
Total	7.379	11.578	6.602	3.617	1.499	521.603	1.075

Sumber: BPS, 2025

Tabel di atas menggambarkan produksi beberapa komoditas unggulan perkebunan (Kelapa Sawit, Kelapa, Karet dan Lada) dan tanaman pangan (Jagung dan Padi Sawah). Komoditas padi sawah memiliki produksi tertinggi dibandingkan komoditas lainnya dengan nilai produksi sebesar 521.603 Ton. Produsen terbesar padi sawah adalah kecamatan Jabung dengan nilai produksi 67.207 Ton, Kecamatan Batanghari 45.237 Ton dan Pasir Sakti sebesar 44.406 Ton. Komoditas Kelapa merupakan komoditas yang paling tinggi ke-2 jumlah produksinya yaitu sebesar 10.504 Ton. Adapun produsen utama pada komoditas ini adalah Kecamatan Bandar Sribhawono 1.075 Ton, kecamatan Melinting dengan 980 ton, dan Kecamatan Sekampung Udik yang jumlah produksinya mencapai 876 ton. Produksi terbesar ke-3 adalah komoditas Kelapa Sawit dengan total produksi sebesar 7.379 ton. Adapun penghasil terbesar komoditas ini adalah kecamatan Waway Karya dengan jumlah produksi 1.071 ton, Kecamatan Labuhan Manggarai sebesar 885 Ton dan Kecamatan Jabung dengan total produksi sebesar 870 ton.

Dengan mempertimbangkan jumlah produksi dan arah kebijakan nasional (RPJMN 2025-2029) hingga kabupaten (RPJMD

2025-2029), maka komoditas kelapa adalah komoditas unggulan yang dimungkinkan untuk dikembangkan di Lampung Timur. Di RPJMN, Lampung Timur termasuk dalam kluster Kawasan Komoditas Unggulan Kopi dan Kelapa Lampung Barat-Selatan. Salah satu Isu Strategis pada RPJMD 2025-2029 adalah pengembangan kawasan sentra produksi perkebunan di mana kelapa adalah salah satu sasaran komoditasnya. Hal ini juga akan didukung oleh Kawasan Strategis dari sudut kepentingan ekonomi, yaitu kawasan pembibitan dan agribisnis di Kecamatan Pekalongan. Selain itu, pada RPJMD 2025-2029 terdapat Klaster II yang diarahkan menjadi Pusat Pertumbuhan Agribisnis Berdaya Saing dan Berkelanjutan. Klaster II terdiri dari Kecamatan Pekalongan, Raman Utara, Batanghari Nuban, Sekampung, Batanghari dan Metro Kibang. Lampung Timur juga telah memiliki Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah 2011-2031 yang telah menentukan komoditas unggulan di beberapa sektor.

Kabupaten Lampung Timur juga memiliki potensi besar pada bidang hortikultura, terutama komoditas buah-buahan. Salah satu komoditas unggulan pada sektor ini adalah pisang, yang memiliki volume produksi tinggi sekaligus daya saing yang kuat di pasar. Pada 2024, total produksi pisang di Kabupaten Lampung Timur tercatat mencapai 2.314.198,8 kuintal, dengan kontribusi terbesar berasal dari Kecamatan Way Jepara. Selain itu, jeruk siam juga mulai menonjol sebagai komoditas hortikultura yang prospektif dan berpotensi untuk terus dikembangkan guna memperkuat perekonomian lokal daerah tersebut.

Tabel 7. Produksi Buah-Buahan dan Sayuran di Kabupaten Lampung Timur dalam Kuintal

Jenis Tanaman	2020	2021	2022	2023	2024
Alpukat	10.756	40.891	57.883	291.186	193.973
Anggur	-	14	453	2.140	1.949,9
Belimbing	4.261	4.962	2.807	11.550	11.185,6
Buah Naga	-	21.612	19.309	20.485	16.880,6
Duku	8.315	9.062	30.588	52.391	69.856,25

Jenis Tanaman	2020	2021	2022	2023	2024
Durian	15.184	66.376	140.808	265.637	347.841,3
Jambu Air	14.153	20.513	103.837	284.838	235.746,3
Jambu Biji	10.362	54.851	53.917	82.913	153.189,9
Jeruk Besar	11.944	9	13	17	25,76
Lemon	-	42	576	3.855	6.138
Jeruk Siam	67.518	242.533	220.379	346.849	394.630,8
Lengkeng	-	16.062	31.629	60.974	32.275,9
Mangga	41.305	72.176	28.961	131.657	84.154,8
Manggis	960	3.135	388	4.022	2.150,6
Nanas	14.409	5.710	12.166	29.256	21.327,04
Nangka	31.614	542.286	255.217	107.525	180.580,12
Pepaya	419.114	198.233	115.720	668.743	531.960
Pisang	745.329	890.414	2.878.857	1.849.250	2.314.198,8
Rambutan	15.168	42.197	91.858	450.733	338.407,03
Salak	12.773	7.054	5.001	44.374	29.664,15
Sawo	22.432	28.510	24.482	137.597	176.603,32
Sirsak	5.161	8.452	5.671	18.437	18.537
Sukun	5.210	18.921	16.377	82.913	86.420,58
Jengkol	11.463	33.947	13.216	74.574	70.397
Melinjo	10.202	27.374	15.663	25.830	52.528,4
Petai	11.342	15.894	18.093	107.525	107.608,81

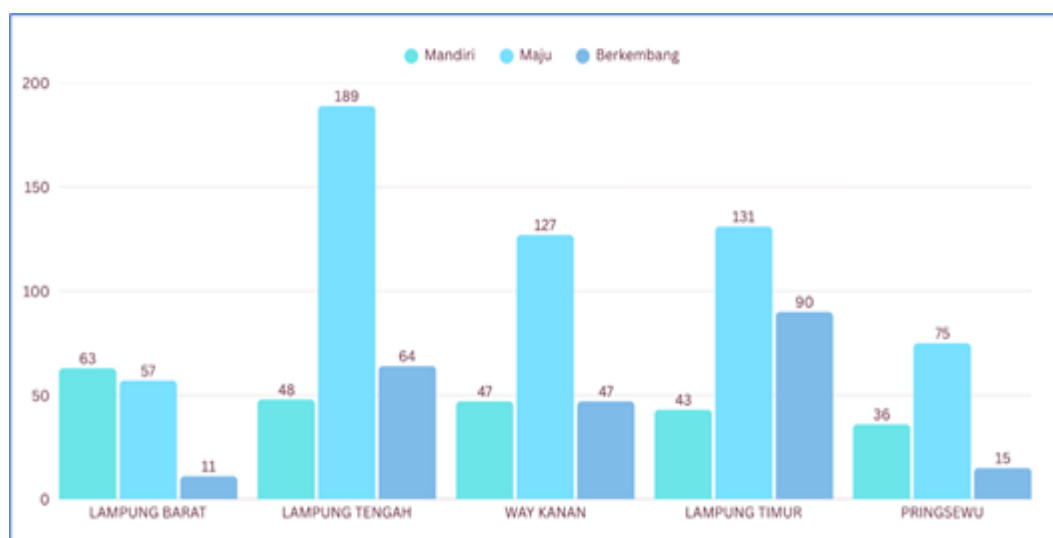
Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

Data menunjukkan bahwa sektor hortikultura di Kabupaten Lampung Timur mengalami perkembangan pesat selama periode 2020–2024, baik dari sisi diversifikasi komoditas maupun

peningkatan volume produksi. Beberapa komoditas utama mengalami lonjakan produksi yang signifikan, mencerminkan adanya peningkatan minat budidaya, perbaikan teknik pertanian, dan potensi pasar yang terus berkembang. Komoditas pisang menjadi penyumbang terbesar dengan tren produksi meningkat dari 745.329 kuintal pada 2020 menjadi 2.314.198,8 kuintal pada 2024, menegaskan posisinya sebagai komoditas unggulan hortikultura daerah. Diikuti oleh jeruk siam, yang melonjak dari 67.518 kuintal pada 2020 menjadi 394.630,8 kuintal pada 2024, menunjukkan potensi besar untuk pengembangan agribisnis berbasis buah-buahan tropis.

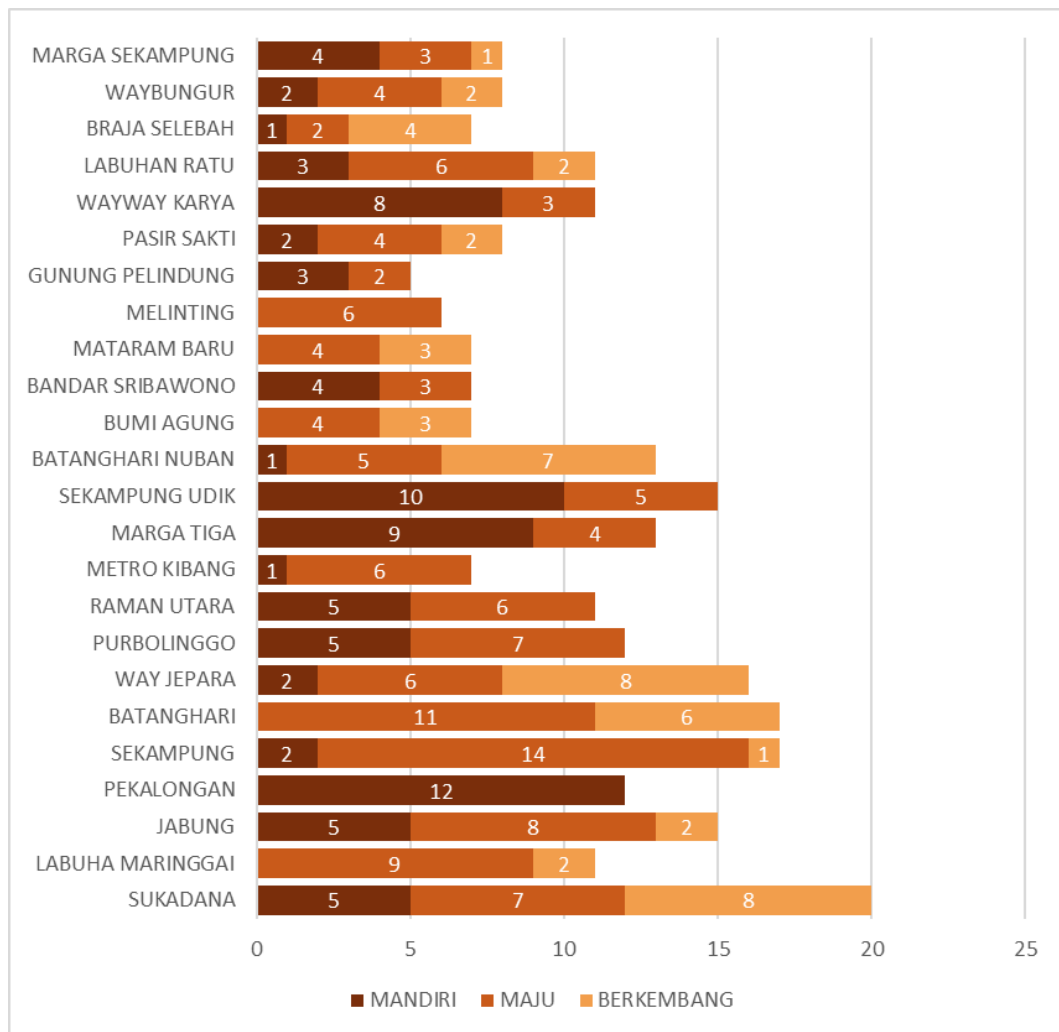
3.4 Aspek Status Perkembangan Desa

Kabupaten Lampung Timur memiliki Pembangunan desa yang baik. Hal ini dapat dilihat dari status Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2024 yang menunjukkan tidak ada dengan status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Kabupaten Lampung Timur. Dari 264 Desa terdapat 43 Desa mandiri, 131 Desa Maju dan 90 Desa Berkembang. Kabupaten Lampung Timur juga termasuk kabupaten yang unggul di bidang pembangunan desa di provinsi Lampung. Untuk lebih detil, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 9. Jumlah Desa Mandiri, Maju dan Berkembang di 5 Kabupaten Provinsi Lampung
Sumber: IDM 2024, diolah

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM), 5 kabupaten yang paling unggul dalam pembangunan desa di Provinsi Lampung, yaitu Lampung Barat, Lampung Tengah, Way Kanan, Lampung Timur dan Pringsewu. Hal ini dapat dilihat dari jumlah desa yang memiliki status mandiri, maju dan berkembang terbanyak di provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Barat merupakan kabupaten yang memiliki jumlah desa mandiri terbanyak yaitu sebanyak 63 Desa. Sementara itu, Lampung Timur memiliki jumlah desa mandiri sebanyak 43 Desa atau terbanyak ke-4 di provinsi Lampung. Jika dilihat dari jumlah desa maju, kabupaten Lampung Timur memiliki 131 desa atau terbanyak ke-2 di provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah memiliki Desa maju terbanyak yaitu sebanyak 189 desa. Untuk jumlah desa berkembang, Lampung Timur memiliki jumlah desa berkembang terbanyak diantara 4 kabupaten lainnya, yaitu sebanyak 90 desa. Pembangunan desa Kabupaten Lampung Timur pada tingkat kecamatan relatif merata. Berdasarkan data IDM 2025, Lampung Timur memiliki 84 desa mandiri, 129 desa maju dan 51 desa berkembang. Dari 24 kecamatan terdapat 19 kecamatan yang memiliki desa mandiri atau hanya 5 kecamatan yang belum memiliki desa mandiri, bahkan seluruh desa di kecamatan Pekalongan telah berstatus mandiri. Selain itu, 23 kecamatan sudah memiliki desa berstatus maju. Indikator status kemandirian desa ini menjadi signal yang baik bagi pembangunan desa di Lampung Timur yang menunjukkan perbaikan terus menerus dan memperlihatkan prioritas penganggaran dan kegiatan yang terukur.



Gambar 10. Proporsi Desa Mandiri, Desa Maju dan Desa Berkembang di Lampung Timur

Sumber: Dinas PMD Kab. Lampung Timur, 2025

Pada gambar di atas menunjukkan proporsi Desa Mandiri, Desa Maju dan Desa Berkembang di Kabupaten Lampung Timur. Secara umum sebagian besar didominasi oleh Desa Maju dengan rentang 0 hingga 14 desa. Pola ini menggambarkan bahwa Kabupaten Lampung Timur sedang berada pada tahap transisi menuju pembangunan desa yang lebih maju dan mandiri. Sementara Desa mandiri memiliki proporsi yang cukup besar, yaitu sebesar 84 desa atau 31,81% dari total desa di Kabupaten Lampung Timur. Hal ini menandakan baiknya kapasitas ekonomi, infrastruktur dan tata kelola pemerintahan desa di kabupaten. Kecamatan Pekalongan merupakan kecamatan paling menonjol, kecamatan ini memiliki Desa Mandiri terbanyak yaitu sebanyak 12 Desa. Kecamatan Sekampung Udik juga memiliki kemajuan yang

baik dengan memiliki 10 desa mandiri dan 5 desa maju. Pembangunan desa di Kecamatan Marga Tiga memperlihatkan tingkat perkembangan yang baik dengan memiliki 9 desa mandiri dan 4 desa maju.



BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Tahapan Penelitian

4.1.1 Tahap Persiapan

Tahap persiapan kegiatan Kajian Pengembangan Kawasan Ekonomi Daerah Berbasis Komoditas Unggulan Melalui Skema Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan dengan pembentukan tim, pengumpulan data, persiapan persuratan dan administrasi. Selain itu, pada tahap persiapan juga akan dilakukan koordinasi awal antara Tim Penyusun dan Tim Tenaga Ahli yang dapat dilakukan secara daring ataupun luring.

4.1.2 Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan Kajian Pengembangan Kawasan Ekonomi Daerah Berbasis Komoditas Unggulan Melalui Skema Pembangunan Kawasan Perdesaan akan dilakukan melalui beberapa sesi kegiatan sebagai berikut:

a. Forum Group Discussion (FGD) Laporan Awal

FGD Kajian Pengembangan Kawasan Ekonomi Daerah Berbasis Komoditas Unggulan Melalui Skema Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mempertajam, atau menggali lebih dalam terkait komoditas unggulan dan komoditas pendukung di masing-masing kawasan perdesaan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan di Kabupaten Lampung Timur. Dalam kegiatan sesi FGD menganalisis rencana pengembangan komoditas unggulan pada setiap kawasan perdesaan tersebut. Selanjutnya, dalam FGD ini juga akan dikumpulkan data-data dan dilakukan analisis sosial dan ekonomi terhadap kesiapan, rencana, dan target dari kawasan perdesaan yang berbatasan dengan Kabupaten/Kota lain. Kegiatan FGD ini akan melibatkan OPD terkait, pemerintah kecamatan dan desa, Tim Koordinasi, dan Tim Tenaga Ahli. FGD

ini juga menjadi forum konsolidasi antarlembaga, serta sarana untuk mengharmonisasi visi, arah kebijakan, dan rencana aksi pembangunan kawasan yang mencakup integrasi komoditas unggulan, infrastruktur antardesa, kelembagaan kawasan, dan strategi pengembangan ekonomi lokal.

b. Tahapan analisis

Dalam menentukan komoditas unggulan pada desa perbatasan digunakan analisis *Location Quotient* (LQ), analisis Shift Share dan analisis tipologi klassen. Adapun uraian ketiga analisis ini adalah sebagai berikut:

1) Analisis *Location Quotient* (LQ)

Analisis *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk mengidentifikasi sektor atau komoditas basis dan non-basis dalam wilayah penelitian. Tarigan (2014) mendefinisikan LQ sebagai perbandingan antara peran suatu sektor ekonomi di suatu daerah terhadap besarnya sektor ekonomi yang sama secara nasional atau perbandingan terhadap suatu daerah yang memiliki cakupan administratif yang lebih besar. Secara kuantitatif, nilai LQ dihitung dengan membandingkan peran relatif suatu sektor di wilayah kajian terhadap peran sektor yang sama di wilayah referensi. Rumus *Location Quotient* yang digunakan pada kajian ini sebagai berikut:

$$LQ = \frac{\frac{X_{ij}}{RV_j}}{\frac{X_i}{RV_i}}$$

dengan keterangan:

- LQ = Indeks/Koefisien *Location Quotient* dari sektor i di kecamatan j
- X_{ij} = nilai output sektor i di kecamatan j
- X_i = nilai output sektor i kabupaten Lampung Timur
- RV_j = Total output pada kecamatan j
- RV_i = total output seluruh sektor di kabupaten Lampung Timur

Interpretasi nilai LQ adalah sebagai berikut: nilai LQ lebih besar dari satu ($LQ > 1$) menunjukkan bahwa sektor tersebut merupakan sektor basis karena memiliki tingkat spesialisasi

yang lebih tinggi dibandingkan wilayah referensi. Nilai LQ sama dengan satu ($LQ=1$) menunjukkan bahwa sektor tersebut memiliki tingkat spesialisasi yang sama dengan wilayah referensi, sedangkan nilai LQ kurang dari satu ($LQ<1$) menunjukkan sektor non-basis.

Dalam penelitian ini, analisis LQ digunakan untuk mengidentifikasi sektor atau komoditas unggulan wilayah sebagai dasar awal dalam memahami struktur ekonomi wilayah. Karena bersifat statis, analisis LQ perlu dilengkapi dengan analisis pertumbuhan yang bersifat dinamis.

2) Analisis *Shift Share* (SS)

Analisis *Shift Share* digunakan untuk menganalisis perubahan kinerja sektor ekonomi wilayah dari waktu ke waktu serta untuk mengetahui sumber pertumbuhan sektor tersebut. Pendekatan ini menilai apakah pertumbuhan sektor di wilayah kajian dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi wilayah referensi, struktur ekonomi, atau keunggulan daya saing lokal. Analisis ini juga dapat melihat perkembangan dalam membandingkan besar aktivitas suatu sektor pada wilayah tertentu dan pertumbuhan antarwilayah (Sjafrizal, 2018).

Metode analisis SS diawali dengan mengukur perubahan nilai tambah bruto atau PDRB/output suatu sektor i di suatu wilayah j (D_{ij}) dengan rumus berikut (Soepono, 1993)

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

Di mana:

D_{ij} = perubahan nilai output komoditas i di kecamatan j

N_{ij} = perubahan nilai output komoditas i di kecamatan j yang disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan kabupaten Lampung Timur

M_{ij} = perubahan nilai output komoditas i di kecamatan j yang disebabkan oleh pertumbuhan komoditas i di Lampung Timur

C_{ij} = perubahan nilai output komoditas i di kecamatan j yang disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan komoditas i di kecamatan j

Dengan tiga komponen utama sebagai berikut:

a) Pengaruh pertumbuhan kabupaten lampung timur

$$N_{ij} = Y_{ij} \times r_n$$

b) Pergeseran Proporsional

$$M_{ij} = Y_{ij} (r_{in} - r_n)$$

c) Pengaruh keunggulan kompetitif

$$C_{ij} = Y_{ij} (r_{ij} - r_n)$$

- Y_{ij} = nilai output komoditas i kecamatan j
- r_{ij} = laju pertumbuhan komoditas i di kecamatan j
- r_{in} = laju pertumbuhan komoditas i di Kabupaten Lampung Timur
- r_n = laju pertumbuhan kabupaten Lampung Timur

Jika nilai c_{ij} yang positif menunjukkan bahwa komoditas i di wilayah j tersebut memiliki daya saing yang lebih baik dibandingkan kabupaten Lampung Timur, sedangkan nilai negatif menunjukkan lemahnya daya saing lokal. Dengan demikian, analisis Shift Share memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika pertumbuhan sektor dibandingkan analisis LQ.

3) Analisis Tipologi Klassen

Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengelompokkan sektor atau wilayah ke dalam kategori tertentu berdasarkan tingkat pertumbuhan dan kontribusi ekonomi relatif. Pendekatan ini menekankan bahwa sektor unggulan tidak hanya ditentukan oleh besarnya kontribusi ekonomi, tetapi juga oleh kecepatan pertumbuhannya.

Menurut Tipologi daerah, daerah dibagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu:

Tabel 8. Klasifikasi Daerah menurut Tipologi Klassen

	$y_i > y$	$y_i < y$
$r_i > r$	daerah maju dan tumbuh cepat	daerah berkembang cepat
$r_i < r$	daerah maju tetapi tertekan	daerah relatif tertinggal

Keterangan:

r_i = Laju pertumbuhan kecamatan i

r = Laju pertumbuhan Lampung Timur

y_i = Kontribusi kecamatan i terhadap Lampung Timur

y = Kontribusi rata-rata kecamatan terhadap Lampung Timur

c. *Forum Group Discussion* (FGD) Laporan Akhir/Finalisasi

Kegiatan FGD Laporan Akhir/Finalisasi RPKP bertujuan untuk mempresentasikan hasil akhir penyusunan dokumen kepada seluruh pemangku kepentingan, sekaligus memperoleh masukan akhir sebelum dokumen ditetapkan secara resmi. Finalisasi ini menjadi forum strategis untuk menguji kelayakan substansi, konsistensi perencanaan, dan keselarasan antara rencana kawasan dengan kebijakan daerah dan nasional. Kegiatan ini melibatkan perwakilan OPD teknis terkait, Bappeda, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dalam kawasan perdesaan, Tim Tenaga Ahli, serta unsur akademisi, LSM, dan mitra pembangunan yang relevan.

4.1.3 Tahap Pelaporan

Penyusunan laporan akan dilakukan terkait dengan setiap pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Kajian Pengembangan Kawasan Ekonomi Daerah Berbasis Komoditas Unggulan Melalui Skema Pembangunan Kawasan Perdesaan kepada para pemangku kepentingan agar dapat dimanfaatkan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan. Laporan ini juga

akan memuat dokumen keluaran, data, dan hasil analisis capaian terhadap tujuan kegiatan.

4.2 Output

Secara garis besar metode dan pendekatan yang digunakan pada pekerjaan Pengembangan Kawasan Ekonomi Daerah Berbasis Komoditas Unggulan Melalui Skema Pembangunan Kawasan Perdesaan ialah pendekatan multidisiplin yang menggabungkan metode partisipatif, statistik, spasial, dan strategis, dan secara keseluruhan bersifat aplikatif untuk perencanaan pembangunan kawasan perdesaan. Pendekatan ini dilakukan melalui penelitian secara kualitatif dan kuantitatif.

Kajian kualitatif partisipatif digunakan untuk menggali aspirasi, kebijakan terkait kawasan perdesaan yang berbatasan dengan Kabupaten/Kota di Kabupaten Lampung Timur, pengetahuan lokal, dan kebutuhan masyarakat. Kajian ini dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara mendalam (*In-Dept Interview*), musyawarah antardesa (MAD), dan observasi lapangan terhadap aktivitas ekonomi, kondisi sosial, dan kelembagaan desa.

Kajian kuantitatif digunakan untuk menganalisis objektif dan statistik kawasan perdesaan yang berbatasan dengan Kabupaten/Kota di Kabupaten Lampung Timur. Analisis yang dilakukan mencakup analisis data statistik (Indek Desa Membangun, data ekonomi, dan sosial), analisis LQ, analisis Shift Share, analisis tipologi Klassen, analisis spasial untuk memetakan kawasan, konektivitas antardesa, penilaian potensi komoditas berdasarkan volume produksi, akses pasar, nilai tambah, dan daya dukung sumber daya.

Kegiatan fasilitasi dalam rencana pembangunan ekonomi daerah berbasis komoditas unggulan ini menggunakan pendekatan *participatory appraisal*. Pendekatan ini menitikberatkan pada perencanaan wilayah kawasan perdesaan yang berbatasan dengan Kabupaten/Kota secara partisipatif dengan menggunakan teknik-teknik partisipatif, meliputi: metaplan, FGD, dan *Logical Framework Analysis* (LFA).

Tabel 9. Metodologi

No	Keluaran	Metodologi	Pendekatan
1	Terlaksananya rapat koordinasi rencana pembentukan kawasan perdesaan perbatasan di Kabupaten Lampung Timur	Kualitatif	Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda)
2	Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Ekonomi Daerah Bebas Komoditas Unggulan Perdesaan	Kualitatif dan Kuantitatif	1. Penelitian melalui: Observasi lapang, Wawancara mendalam 2. FGD Penyusunan dokumen perencanaan Pusat Pertumbuhan antar Desa perbatasan, dan mengidentifikasi komoditas unggulan

4.3 Teknik Analisis Data

4.3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan dan wawancara secara langsung terhadap pihak-pihak yang terkait. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari informasi tertulis dan dari literatur-literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, penelusuran

internet, Kabupaten dalam Angka, Badan Pusat Statistik, Kabupaten/Kecamatan dalam Angka, Monografi Desa, dan Data Potensi Desa (Podes) pada tahun terakhir, dan sumber lainnya. Data diupayakan yang paling mutakhir dari yang tersedia (maksimal 3 tahun terakhir). Kebutuhan data dan informasi meliputi:

Tabel 10. Kebutuhan Data dan Informasi

Aspek	Rincian data*)	Wujud Tampilan Data**)
Fisik Dasar lahan	Luas dan batas Wilayah Administrasi	Peta, tabel
	Kondisi iklim (terutama data mengenai curah hujan)	Peta, tabel
	Topografi a. Kemiringan Lereng b. Ketinggian Lahan c. Kecenderungan Bentuk Permukaan Lahan	Peta, tabel
	Jenis Tanah	Peta, tabel
	Penggunaan Lahan	Peta, tabel, grafik
	Kebencanaan	Peta
	Kawasan dengan satwa dan ekosistem yang dilindungi	Peta, tabel
	Data keagrariaan: a. Status tanah b. Rerata kepemilikan tanah c. Rerata penguasaan lahan	Peta, tabel
Ekonomi	Kondisi ekonomi yang diidentifikasi disesuaikan dengan produk unggulan yang akan dikembangkan.	Peta, tabel, grafik, foto
Kependudukan dan sosial budaya	Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Miskin	Tabel, grafik
	Sebaran penduduk	Peta, tabel

Aspek	Rincian data*)	Wujud Tampilan Data**)
	Komposisi Penduduk a. Jenis kelamin b. Struktur umur c. Mata pencaharian d. Tingkat pendidikan	Grafik, tabel
	Kondisi sosial budaya a. Aktivitas sosial/budaya yang rutin dilakukan b. Organisasi masyarakat c. Kearifan lokal d. Seni budaya pertunjukan e. Seni kerajinan local	Tabel, narasi deskriptif, foto
Sarana dan Prasarana serta Pelayanan	a. Pendidikan	Peta sebaran, tabel, foto
	b. Kesehatan	
	c. Pemerintahan	
	d. Sosial budaya	
	e. Ekonomi	
	f. Sarana produksi	
	g. Transportasi	Tabel, foto
	h. Energi	Peta jaringan, tabel, grafik, foto
	i. Air Bersih	
	j. Sanitasi	
	k. Informasi dan telekomunikasi	

Aspek	Rincian data*)	Wujud Tampilan Data**)
	1. Kondisi infrastruktur	
Kelembagaan	Kondisi kelembagaan di aras kabupaten/kota dalam bidang pengembangan ekonomi lokal atau daerah	Tabel, narasi
Status Perkembangan Desa (IDM)	Desa Mandiri	Tabel
	Desa Maju	
	Desa Berkembang	
	Desa Tertinggal	
	Desa Sangat Tertinggal	

Keterangan:

*) Penekanan rincian data disesuaikan dengan masing-masing tema Kawasan;

**) Peta diupayakan menggunakan skala 1:5000, atau sekurang-kurangnya 1:25000. Wawancara mendalam dan/atau konsultasi dengan pemerintah daerah kabupaten lampung timur.

4.3.2 Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan tabel, grafik, dan diagram.

Deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Analisis data deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara, *focus group*, studi kasus. Setelah itu data direduksi, lalu disajikan dengan pendeskripsian, seperti bagan/chart, tabel, dsb (Nazir 2014; Sugioyono 2017). Dalam melakukan studi literatur merujuk pada aturan yang berlaku dalam dokumen resmi pemerintah Indonesia, hasil penelitian, dan buku untuk menggali potensi komoditas unggulan.



BAB V

ARAH PEMBANGUNAN WILAYAH KAWASAN PERDESAAN BERBASIS UNGGULAN DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Kabupaten Lampung Timur akan diproyeksikan menjadi salah satu motor pertumbuhan di bidang pertanian dan perikanan baik di provinsi Lampung maupun Nasional. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 Kabupaten Lampung Timur akan diarahkan menjadi Kawasan Swasembada Pangan dan Air, Kawasan komoditas unggulan Ekonomi Biru Pesisir Timur Lampung dan Kawasan Komoditas Unggulan Kopi dan Kelapa. Hal ini akan menjadikan kabupaten Lampung Timur menjadi tumpuan pertanian baik di Tingkat nasional maupun provinsi Lampung. Sejalan dengan RPJMN 2025-2029, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Lampung 2025-2029, Kabupaten Lampung Timur diarahkan untuk mengembangkan hilirisasi perikanan di Kecamatan Labuhan Maringgai dan mengembangkan hilirisasi Kopi, dan Kelapa.

Arah kebijakan yang disusun oleh pemerintah dan pemerintah provinsi telah sesuai dengan potensi dan peluang yang ada di Lampung Timur. Struktur ekonomi Lampung Timur masih didominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, hal tersebut dapat dilihat dari persentase Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) Lampung Timur 5 tahun terakhir yang kontribusinya lebih dari 30% PDRB berasal dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Tabel 11. Produk Domestik Bruto Regional atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lima Lapangan Usaha yang Memiliki Kontribusi Terbesar Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	2020		2021		2022		2023		2024	
	Nilai	% PDRB	Nilai	% PDRB	Nilai	% PDRB	Nilai	% PDRB	Nilai	% PDRB
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.968	34,4%	9.831	33,9%	9.970	33,7%	9.972	32,5%	9.890	30,8%
Pertambangan dan Penggalian	7.161	24,7%	6.808	23,4%	6.234	21,0%	6.200	20,2%	6.434,4	20,0%
Industri Pengolahan	2.251	7,7%	2.407	8,3%	2.460	8,3%	2.510	8,2%	2.830	8,8%
Konstruksi	1.623	5,6%	1.753	6,0%	1.888	6,3%	2.066	6,7%	2.142	6,6%
Perdagangan Besar dan Eceran	2.565	8,8%	2.685	9,2%	3.202	10,8%	3.648	11,9%	4.067	12,7%
PDRB	28.931		29.001		29.587		30.625		32.039	

Sumber: BPS diolah, 2025

Berdasarkan data dalam tabel di atas memperlihatkan lima lapangan usaha yang memiliki kontribusi paling besar terhadap PDRB Lampung Timur tahun 2020-2024, yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Industri Pengolahan, sektor Konstruksi, serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran. Berdasarkan dari tabel 1 dapat dilihat bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki kontribusi terbesar yaitu dengan Rp9.890,70 miliar atau 30,87% dari PDRB di tahun 2024. Sektor Pertambangan dan Penggalian memiliki kontribusi terbesar kedua yaitu sebesar Rp6.434,43 Miliar atau 20,08% dari PDRB. Dari data ini dapat dipahami bahwa pada 2024 kontribusi sektor primer (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Pertambangan dan Penggalian) sebesar 50,95% dari PDRB. Tren yang sama juga terlihat pada tahun 2020-2023. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Timur masih mengandalkan sumber daya alam dalam mendorong pertumbuhan ekonominya dan masih terdapat banyak ruang pertumbuhan di sektor industri pengolahan untuk memberikan nilai tambah produk.

RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029 menargetkan Kabupaten Lampung Timur untuk mengembangkan komoditas perikanan, kopi dan kelapa. Meskipun demikian hanya komoditas kopi yang memiliki kontribusi yang kecil kepada total produksi di Provinsi Lampung. Untuk lebih lengkap produksi komoditas Lampung Timur dan kontribusinya terhadap produksi Lampung dapat dilihat pada tabel.

Tabel 12. Produksi Komoditas Unggulan Tanaman Pangan, Perkebunan dan Perikanan Lampung Timur dan Kontribusi Produksi di Provinsi Lampung tahun 2022-2024

Komoditas	2022		2023		2024	
	Produksi Lampung Timur (Ton)	% Produksi Lampung	Produksi Lampung Timur (Ton)	% Produksi Lampung	Produksi Lampung Timur (Ton)	% Produksi Lampung
Padi	449.294	16,71%	475.668	17,25%	482.716	17,29%
Kopi	515,0	0,45%	509,5	0,48%	231,40	0,16%
Kelapa	17.735,0	22,57%	17734,0	21,78%	11.433,67	14,13%
Ikan Bandeng	821,33	10,63%	2.741,08	19,58%	2.215,51	16,20%

Sumber: BPS dan Kementerian Kelautan Perikanan diolah, 2025

Perkembangan produksi beberapa komoditas unggulan di Kabupaten Lampung Timur selama periode 2022–2024 beserta kontribusinya terhadap total produksi Provinsi Lampung. Komoditas padi menjadi yang paling dominan dengan tren produksi yang terus meningkat dari 449.294 ton pada 2022 menjadi 482.716 ton pada 2024, seiring dengan kontribusi yang relatif stabil dan cenderung naik dari 16,71% menjadi 17,29% terhadap produksi provinsi. Produksi kopi relatif kecil dan cenderung menurun, baik dari sisi volume maupun kontribusi, di mana produksi turun dari 515,0 ton (0,45%) pada 2022 menjadi 231,40 ton (0,16%) pada 2024. Kelapa menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, terutama pada 2024, dengan produksi berkurang dari sekitar 17,7 ribu ton pada 2022–2023 menjadi 11.433,67 ton pada 2024, yang diikuti oleh penurunan kontribusi dari di atas 22% menjadi 14,13%. Sementara itu, komoditas ikan bandeng mengalami peningkatan produksi yang cukup tajam pada 2023 hingga mencapai 2.741,08 ton dengan kontribusi 19,58%, meskipun pada 2024 sedikit menurun menjadi 2.215,51 ton, namun tetap menunjukkan peran

yang relatif besar dengan kontribusi 16,20% terhadap produksi Provinsi Lampung.

Sebagian potensi komoditas kelapa terletak di perbatasan kabupaten Lampung Timur dengan Kota Metro, Lampung Selatan dan Lampung Tengah yaitu Kecamatan Pekalongan, Kecamatan Way Bungur, Kecamatan Metro Kibang, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Batanghari, Kecamatan Batanghari Nuban, Kecamatan Pasir Sakti, Kecamatan Waway Karya. Berdasarkan data BPS (2025), kontribusi wilayah perbatasan terhadap produksi kelapa mencapai 3.428 ton atau sekitar 30 % dari produksi kelapa Kabupaten Lampung Timur. Bahkan kecamatan sekampung udik dan pekalongan merupakan penghasil kelapa terbesar ke tiga dan ke empat di Lampung Timur, yaitu sebesar 876 ton (Sekampung Udik) dan 815 ton (Pekalongan).

Potensi sumber daya alam di wilayah perbatasan Lampung Timur tidak hanya pada komoditas perkebunan, namun juga pada komoditas padi sawah. Berdasarkan data BPS (2025), wilayah perbatasan memiliki produksi padi sawah sebesar 203.902 ton atau 39% dari produksi padi sawah Kabupaten Lampung Timur. Kecamatan Batanghari merupakan produsen padi sawah terbesar kedua di Lampung Timur yaitu sebesar 45.237 ton dan Kecamatan Pasir Sakti terbesar ketiga dengan total produksi 44.406 ton.

Pada RPJMD Lampung Timur 2025-2029 telah menetapkan beberapa Kawasan strategis kabupaten, salah satunya adalah Kawasan Pembibitan dan Agrobisnis di Kecamatan Pekalongan. Kawasan ini akan menjadi sentra produksi komoditas unggulan Lampung Timur. Beberapa komoditas yang akan dikembangkan di Kawasan ini adalah kopi, kelapa dan Tanaman Pangan. Kecamatan Pekalongan akan dikembangkan komoditas kelapa. Selain itu, Kabupaten Lampung Timur telah menentukan klaster wilayah berdasarkan potensi wilayah. Kecamatan Pekalongan termasuk dalam klaster II bersama Raman Utara, Batanghari Nuban, Sekampung, Batanghari dan Metro Kibang. Potensi klaster ini meliputi tanaman padi, peternakan, perikanan, Perkebunan dan hortikultura. Pusat pertumbuhan Kawasan ini adalah perkotaan Pekalongan. Pertumbuhan Kawasan ini juga didorong oleh Kota Metro. Kawasan ini akan membantu Kota Metro dalam hal penyediaan pemenuhan kebutuhan di sektor agribisnis dan industri pangan lokal. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut perlu langkah strategis dalam mewujudkan pengembangan komoditas unggulan.

Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan salah satu alternatif pengembangan komoditas unggulan dan penambahan nilai ekonomi di Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa) Nomor 5 Tahun 2016 pembangunan Kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan. Melalui pembangunan kawasan perdesaan, desa diharapkan memiliki keterhubungan ataupun kerjasama dengan desa yang memiliki kesamaan potensi ataupun geografis.



BAB VI

DELINIASI DAN POTENSI PRODUK KAWASAN PERDESAAN

6.1 Deliniasi Kawasan Perdesaan

Deliniasi kawasan perdesaan merupakan langkah strategis dalam proses perencanaan pembangunan yang bertumpu pada pengembangan komoditas unggulan. Pada dasarnya, deliniasi tidak hanya dimaknai sebagai penarikan batas wilayah secara administratif, tetapi sebagai upaya sistematis untuk mengidentifikasi ruang-ruang perdesaan yang memiliki kesatuan karakter, potensi, dan permasalahan, sehingga dapat dijadikan fokus intervensi pembangunan secara terarah. Dalam konteks Kabupaten Lampung Timur, deliniasi kawasan perdesaan menjadi semakin penting karena wilayah ini memiliki keragaman karakter agraris, posisi geografis yang strategis, serta keterkaitan yang kuat dengan pusat-pusat pertumbuhan di kabupaten/kota sekitar. Proses penentuan kawasan perdesaan yang akan dikembangkan berbasis komoditas unggulan harus dilakukan secara hati-hati, terukur, dan berbasis data, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kondisi fisik dan lingkungan, hingga dimensi sosial ekonomi dan kelembagaan masyarakatnya.

Pertimbangan pertama dalam deliniasi kawasan perdesaan adalah aspek geografis. Secara geografis, Kabupaten Lampung Timur memiliki beberapa kecamatan yang berada di wilayah perbatasan dengan Kabupaten/Kota lain, seperti Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Lampung Tengah. Letak geografis ini menciptakan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, kedekatan dengan pusat-pusat pertumbuhan tersebut dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi komoditas unggulan yang dihasilkan desa-desa di Lampung Timur. Produk pertanian, perkebunan, maupun hortikultura dari kawasan perdesaan berpotensi mengalir ke pasar kota dengan biaya distribusi yang relatif lebih rendah. Di sisi lain, tanpa perencanaan yang baik, desa-desa perbatasan justru berisiko menjadi kawasan

belakang (*hinterland*) yang hanya berfungsi sebagai penyedia bahan mentah, tanpa memperoleh nilai tambah ekonomi yang memadai. Dalam deliniasi kawasan, perlu dipetakan secara cermat desa-desa yang berada di koridor perbatasan ini, termasuk jaringan jalannya, kedekatannya dengan pasar, serta hubungan fungsionalnya dengan pusat-pusat pelayanan di tingkat kecamatan maupun kota.

Aspek geografis juga mencakup karakter bentang alam dan kesesuaian lahan. Kawasan yang memiliki lahan subur, kontur yang relatif datar hingga landai, ketersediaan sumber air, dan tidak terlalu rentan terhadap bencana menjadi kandidat yang lebih potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan produksi komoditas unggulan. Di beberapa wilayah perdesaan di Lampung Timur, misalnya, terdapat hamparan sawah irigasi dan lahan kering yang cukup luas yang selama ini dimanfaatkan untuk padi, jagung, dan kelapa. Melalui proses deliniasi, hamparan-hamparan lahan yang memiliki kesamaan karakter ini dapat dikelompokkan dalam satu kawasan perdesaan fungsional, sehingga intervensi pembangunan, seperti peningkatan irigasi, penyediaan infrastruktur pascapanen, dan pengembangan akses logistik, dapat dilakukan secara lebih efektif dan terintegrasi. Deliniasi tidak hanya membagi wilayah berdasarkan batas administratif, tetapi juga berdasarkan kesatuan karakter biofisik dan potensi pengembangan komoditas.

Pertimbangan kedua adalah ketersediaan sumber daya alam yang terkait langsung dengan komoditas unggulan. Kabupaten Lampung Timur memiliki basis ekonomi yang kuat di sektor pertanian dan perkebunan, dengan komoditas utama, seperti kelapa, padi sawah, lada, jagung, dan beberapa komoditas hortikultura, termasuk pisang dan jeruk. Dalam proses deliniasi, desa-desa yang menunjukkan produksi signifikan komoditas tertentu dapat dikelompokkan menjadi satu kawasan pengembangan berbasis komoditas tersebut. Misalnya, desa-desa yang secara konsisten menghasilkan kelapa dalam jumlah besar dan memiliki kebun kelapa yang relatif luas dapat ditetapkan sebagai bagian dari kawasan perdesaan pengembangan kelapa. Hal yang sama berlaku untuk padi sawah, di mana desa-desa dengan capaian produktivitas tinggi, sistem irigasi yang sudah berjalan, dan tradisi budidaya padi yang kuat dapat dijadikan inti kawasan lumbung pangan berbasis padi. Pendekatan ini memungkinkan

adanya spesialisasi komoditas di tingkat kawasan, sehingga program-program penguatan kapasitas, penyediaan sarana produksi, dan pengembangan industri hilir dapat diarahkan secara lebih fokus dan memberikan dampak yang lebih besar.

Ketersediaan sumber daya alam tidak hanya mencakup lahan dan tanaman, tetapi juga mencakup faktor iklim lokal, ketersediaan air, dan kualitas lingkungan. Kawasan-kawasan yang memiliki sumber air permukaan dan tanah yang memadai, serta masih relatif terjaga kualitas lingkungannya, memiliki peluang lebih besar untuk menjadi lokasi pengembangan komoditas secara berkelanjutan. Dalam konteks deliniasi, kawasan yang mengalami degradasi lingkungan berat atau konflik pemanfaatan lahan yang tinggi mungkin perlu diperlakukan secara berbeda, misalnya dengan terlebih dahulu melakukan program rehabilitasi atau penataan kembali pemanfaatan ruang sebelum diarahkan pada intensifikasi komoditas unggulan. Deliniasi kawasan perdesaan berbasis komoditas unggulan harus senantiasa mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, agar pembangunan yang direncanakan tidak menimbulkan tekanan ekologis yang berlebihan di masa mendatang.

Aspek berikutnya yang sangat penting dalam deliniasi kawasan perdesaan adalah infrastruktur. Aksesibilitas menjadi kunci utama dalam menentukan kelayakan sebuah kawasan untuk dikembangkan sebagai sentra komoditas unggulan. Desa-desa yang memiliki jaringan jalan yang memadai, baik jalan kabupaten, jalan kecamatan, maupun jalan desa yang terkoneksi dengan baik ke pasar dan pusat pelayanan, tentu akan lebih mudah dikembangkan karena biaya logistik dan distribusi produk relatif lebih rendah. Dalam konteks Lampung Timur, kedekatan dengan jalan-jalan utama yang menghubungkan kabupaten ini dengan Kota Metro, Lampung Selatan, dan Lampung Tengah menjadi salah satu faktor penting dalam penentuan kawasan perdesaan prioritas. Kawasan yang telah memiliki infrastruktur dasar, seperti listrik, jaringan komunikasi, sarana penyimpanan hasil, serta fasilitas pendukung lain, seperti pasar desa dan balai penyuluhan pertanian, memiliki modal awal yang lebih kuat untuk dikembangkan sebagai pusat produksi dan distribusi komoditas unggulan.

Infrastruktur yang diperhitungkan dalam deliniasi tidak hanya menyangkut infrastruktur fisik, tetapi juga infrastruktur

ekonomi dan layanan sosial. Keberadaan pasar lokal, koperasi, unit usaha milik desa, dan lembaga keuangan mikro, misalnya, menjadi indikator bahwa kawasan tersebut memiliki ekosistem ekonomi yang mulai terbentuk. Hal ini akan sangat mendukung pengembangan komoditas unggulan, karena petani dan pelaku usaha di desa memiliki akses yang lebih baik terhadap pembiayaan, informasi pasar, dan jejaring usaha. Di sisi lain, kawasan yang relatif terisolasi, dengan akses jalan yang buruk dan minimnya fasilitas pendukung, memerlukan intervensi infrastruktur terlebih dahulu sebelum dapat berfungsi optimal sebagai kawasan pengembangan komoditas. Deliniasi kawasan perdesaan juga dapat berfungsi sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan infrastruktur di wilayah perdesaan, sehingga investasi yang dilakukan pemerintah daerah lebih tepat sasaran.

Dimensi lain yang tidak dapat dipisahkan dari proses deliniasi adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat di kawasan perdesaan. Analisis terhadap tingkat kemiskinan, struktur mata pencaharian, tingkat pendidikan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan memberikan gambaran mengenai kesiapan sosial kawasan untuk menerima dan mengelola program pengembangan komoditas unggulan. Di sejumlah desa di Lampung Timur, sebagian besar rumah tangga menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan, dengan tingkat pendapatan yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian musim. Dalam konteks ini, kawasan perdesaan yang akan dijadikan prioritas pengembangan perlu menunjukkan adanya basis sosial yang cukup kuat, misalnya sudah adanya kelompok tani, gabungan kelompok tani, kelompok wanita tani, kelompok usaha bersama, atau badan usaha milik desa yang aktif. Kehadiran kelembagaan-kelembagaan lokal tersebut menjadi indikasi adanya kapasitas sosial dan kelembagaan yang dapat mendukung pelaksanaan program secara berkelanjutan.

Tingkat pendidikan dan literasi masyarakat juga menjadi faktor penentu dalam deliniasi. Kawasan yang memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan informasi umumnya lebih cepat dalam mengadopsi teknologi baru, praktik budidaya yang lebih efisien, serta model bisnis yang lebih modern. Hal ini sangat penting dalam pengembangan komoditas unggulan, terutama ketika diarahkan pada peningkatan nilai tambah produk melalui

pengolahan, pengemasan, dan pemasaran berbasis jaringan yang lebih luas. Di sisi lain, kawasan dengan tingkat pendidikan yang relatif lebih rendah memerlukan pendekatan pendampingan dan pemberdayaan yang lebih intensif. Kawasan-kawasan tersebut tetap dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari kawasan pengembangan, namun dengan desain intervensi yang disesuaikan, misalnya melalui penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan sebelum atau bersamaan dengan pengembangan komoditas.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan juga menjadi indikator penting yang harus dipertimbangkan. Kawasan yang masyarakatnya menunjukkan partisipasi aktif dalam musyawarah desa, perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes), maupun kegiatan kolektif lainnya, biasanya lebih siap untuk terlibat dalam program pengembangan kawasan perdesaan berbasis komoditas unggulan. Deliniasi yang dilakukan tanpa memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat berisiko menimbulkan resistensi, sehingga program yang direncanakan tidak berjalan optimal. Proses penentuan kawasan sebaiknya didukung oleh mekanisme partisipatif, di mana masyarakat desa dilibatkan sejak awal untuk mengidentifikasi potensi, masalah, dan harapan mereka terhadap pengembangan komoditas unggulan di wilayahnya.

Dengan mengintegrasikan keempat aspek utama tersebut—geografis, ketersediaan sumber daya alam, infrastruktur, serta kondisi sosial ekonomi—deliniasi kawasan perdesaan di Kabupaten Lampung Timur dapat menghasilkan desain kawasan pengembangan yang lebih komprehensif dan operasional. Kawasan-kawasan yang terpilih tidak hanya memenuhi kriteria fisik dan ekonomi, tetapi juga menunjukkan kesiapan sosial dan kelembagaan untuk mengelola program pengembangan komoditas unggulan secara berkelanjutan. Hasil deliniasi ini selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam penyusunan rencana pengembangan kawasan perdesaan, penetapan klaster komoditas unggulan, dan prioritas intervensi pembangunan, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh pemangku kepentingan lainnya. Pengembangan kawasan perdesaan di Lampung Timur tidak hanya meningkatkan produksi dan nilai tambah komoditas, tetapi juga benar-benar berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan pengurangan kesenjangan antarwilayah.

6.2 Analisis Potensi Produk Unggulan Kawasan Perdesaan

Analisis potensi produk unggulan dalam kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Location Quotient* (LQ), *Shift-Share Analysis*, dan Analisis Tipologi Klassen untuk mengidentifikasi keunggulan struktural dan dinamika pertumbuhan komoditas pertanian di Kabupaten Lampung Timur. Ruang lingkup komoditas unggulan yang dianalisis dibatasi sesuai dengan arah pengembangan wilayah yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), khususnya pada subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, dan subsektor perikanan, serta mempertimbangkan komoditas hortikultura dengan tingkat produksi terbesar di Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan kriteria tersebut, komoditas yang dianalisis meliputi padi, jagung, ubi kayu, kopi, kelapa, kakao, karet, kelapa sawit, pisang, jeruk siam, pepaya, serta perikanan, yang selanjutnya dievaluasi untuk menentukan peran dan kontribusinya sebagai komoditas unggulan dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah. Nilai yang digunakan dalam analisis ini merupakan nilai produksi komoditas pertanian di tingkat kecamatan yang dihitung berdasarkan volume produksi dalam satuan ton pada 2023 dan 2024. Untuk memperoleh nilai ekonomi yang lebih representatif, data produksi tersebut dikonversi ke dalam satuan rupiah dengan mengalikan volume produksi masing-masing komoditas dengan harga komoditas yang mengacu pada Statistik Harga Produsen Tahun 2024 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Penggunaan harga produsen sebagai acuan dimaksudkan untuk menggambarkan nilai output di tingkat produsen secara lebih objektif serta menjaga konsistensi perbandingan antarwilayah dan antarwaktu dalam analisis *Location Quotient* (LQ) dan *Shift-Share*. Analisis *Location Quotient* dan *Shift-Share* dalam kajian ini dilakukan pada tingkat kecamatan dengan pembanding Kabupaten Lampung Timur, sehingga hasil analisis mencerminkan keunggulan relatif dan daya saing komoditas antarkecamatan di dalam wilayah kabupaten.

6.2.1 Hasil Analisis LQ

Analisis *Location Quotient* (LQ) berbasis nilai produksi digunakan dalam kajian ini sebagai salah satu pendekatan untuk mengidentifikasi komoditas unggulan yang memiliki keunggulan relatif di masing-masing wilayah. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat spesialisasi komoditas pertanian pada setiap kecamatan dibandingkan dengan struktur produksi pertanian Kabupaten Lampung Timur secara keseluruhan, sehingga dapat dibedakan antara komoditas basis dan non-basis wilayah. Hasil analisis LQ menjadi dasar dalam penetapan komoditas unggulan di masing-masing kecamatan yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan arah kebijakan pembangunan kawasan perdesaan.

Tabel 13. Hasil Perhitungan LQ Komoditas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura Menurut Kecamatan di Lampung Timur Tahun 2024

Tanaman Pangan			Perkebunan						Hortikultura			Perikanan		
	Padi	Ubi Kayu	Jagung	Kelapa Sawit	Kelapa	Kopi	Karet	Kakao	Pisang	Pepaya	Jeruk Siam	Udang Vanname	Udang Windu	Ikan Bandeng
Metro Kibang	0,132	0,960	2,272	0,929	0,416	0,507	1,026	0,331	0,337	0,304	0,719	0	0	0
Batanghari	2,495	0,071	0,340	1,158	0,917	1,097	0,963	0,406	0,754	1,090	1,120	0	0	0
Sekampung	2,318	0,079	0,587	1,367	0,767	2,860	4,628	0,295	2,241	0,838	0	0	0	0
Marga Tiga	0,338	2,145	1,001	1,239	0,921	1,764	0,721	1,521	0,988	0,226	0,434	0	0	0
Sekampung Udik	0,589	1,309	1,343	0,971	0,975	0,273	0,920	2,623	0,350	0,194	0,591	0	0	0
Jabung	1,226	1,446	0,815	1,122	0,364	0,403	0,167	0,168	0,161	0,596	0,000	0	0	0
Pasir Sakti	1,447	0,001	0,237	1,006	0,298	0	0,203	0,019	0,282	0,009	1,614	9,346	9,346	9,346
Waway Karya	0,982	0,337	0,965	2,424	0,241	0,212	1,093	0,111	0	0	7,302	0	0	0
Marga Sekampung	0,025	0,111	2,764	0,231	0,420	0,722	0,737	0,505	0,022	7,090	0	0	0	0

Tanaman Pangan			Perkebunan						Hortikultura			Perikanan		
Labuhan Maringgai	1,294	0,056	0,008	2,788	0,243	1,083	0,556	0,456	0,920	0,365	2,256	10,459	10,459	10,459
Mataram Baru	1,699	0,830	0,293	1,094	2,161	0	0,497	4,673	0,101	0,627	1,133	0	0	0
Bandar Sribhawono	0,298	1,006	2,055	0,109	0,958	0,612	0,239	1,451	1,558	0,302	0	0	0	0
Melinting	0,562	0,069	2,245	1,374	3,264	7,025	1,746	0,661	1,332	2,505	0,920	0	0	0
Gunung Pelindung	1,568	1,115	0,471	1,249	2,820	1,464	2,617	0,541	4,291	0,355	0,251	0	0	0
Way Jepara	1,060	0,937	0,525	0,779	1,115	0,696	1,820	2,349	10,390	1,514	2,405	0	0	0
Braja Selebah	2,092	0,028	0,626	0,670	1,748	0,739	2,246	0,852	0,286	0,894	2,089	0	0	0
Labuhan Ratu	0,815	1,768	0,324	0,593	3,070	2,810	6,696	3,105	0,174	0,647	1,851	0	0	0
Sukadana	0,817	2,145	0,574	1,002	0,820	1,530	0,984	1,644	0,027	0,081	0,007	0	0	0
Bumi Agung	0,796	2,157	0,678	0,699	1,801	0	0,639	0,505	0,004	0,003	0,005	0	0	0

Tanaman Pangan			Perkebunan						Hortikultura			Perikanan		
Batanghari Nuban	1,026	1,853	0,446	0,350	1,000	2,475	0,220	0,411	0,091	3,968	0	0	0	0
Pekalongan	1,802	0,631	0,740	0,487	3,050	0	1,004	0,982	0,045	0,753	0,115	0	0	0
Raman Utara	2,482	0,247	0,443	1,260	1,550	0,170	1,026	0,055	0,019	0,546	0	0	0	0
Purbolinggo	0,628	0,766	1,875	0,365	0,987	0	0,528	0,622	0,110	1,803	0,181	0	0	0
Way Bungur	0,461	1,951	1,192	0,330	0,895	0	0,918	0,110	0,566	0,534	0,030	0	0	0

Ket:



: Kecamatan Perbatasan

: Nilai LQ>1 (Komoditas Basis)

Sumber: Data olahan peneliti, 2025

Hasil analisis *Location Quotient* (LQ) menunjukkan bahwa komoditas unggulan di Kabupaten Lampung Timur memiliki sebaran keunggulan yang berbeda antarkecamatan dan subsektor. Pada subsektor tanaman pangan, padi, ubi kayu, dan jagung muncul sebagai komoditas basis utama, dengan padi unggul di kecamatan penyangga ketahanan pangan seperti Batanghari, Sekampung, Pasir Sakti, Mataram Baru, Braja Selebah, Pekalongan, dan Raman Utara, sementara ubi kayu dan jagung menunjukkan keunggulan yang lebih luas di kecamatan-kecamatan sentra bahan baku agroindustri, seperti Marga Tiga, Sekampung Udik, Jabung, Sukadana, Bumi Agung, Batanghari Nuban, Way Bungur, Metro Kibang, dan Bandar Sribhawono. Pada subsektor perkebunan, komoditas kelapa sawit, kelapa, kopi, karet, dan kakao berkembang secara spesifik wilayah, dengan keunggulan yang menonjol di kecamatan, seperti Waway Karya, Labuhan Maringgai, Melinting, Gunung Pelindung, Sekampung, dan Labuhan Ratu, sedangkan pada subsektor hortikultura, pisang, pepaya, dan jeruk siam menunjukkan keunggulan relatif yang terkonsentrasi, terutama di Way Jepara, Gunung Pelindung, Pasir Sakti, Labuhan Maringgai, Marga Sekampung, dan Batanghari Nuban. Sementara itu, subsektor perikanan memperlihatkan tingkat spesialisasi yang sangat tinggi dan terlokalisasi di wilayah pesisir, khususnya Kecamatan Pasir Sakti dan Labuhan Maringgai, yang berperan sebagai sentra utama produksi udang vanname, udang windu, dan ikan bandeng yang menjadi penggerak utama ekonomi perikanan Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient* (LQ) yang telah diuraikan sebelumnya, terlihat bahwa basis komoditas di Kabupaten Lampung Timur tidak hanya terbentuk di wilayah inti, tetapi juga berkembang pada kecamatan-kecamatan yang berada di kawasan perbatasan. Kecamatan perbatasan menunjukkan pola keunggulan komoditas yang bersifat selektif dan dipengaruhi oleh keterkaitan fungsional dengan wilayah di sekitarnya, baik sebagai sentra produksi, wilayah penyangga, maupun simpul distribusi. Rekapitulasi komoditas unggulan pada kecamatan perbatasan berdasarkan hasil analisis LQ disajikan pada tabel berikut.

Tabel 14. Komoditas Basis Kecamatan Perbatasan

No	Kecamatan	Komoditas Basis
1	Metro Kibang	Jagung dan Karet
2	Batanghari	Padi, Kelapa Sawit, Kopi, Pepaya dan Jeruk Siam
3	Sekampung Udik	Ubi Kayu, Jagung dan Kakao
4	Pasir Sakti	Padi, Kelapa Sawit, Jeruk Siam, Udang Vanname, Udang Windu dan Ikan Bandeng
5	Waway Karya	Kelapa Sawit, Karet, Jeruk Siam
6	Batanghari Nuban	Padi, Ubi Kayu, Kopi, Pepaya
7	Pekalongan	Padi, Karet dan Kelapa
8	Way Bungur	Ubi Kayu dan Jagung

Sumber: Hasil Analisis Tenaga Ahli, 2025

Kecamatan perbatasan di Kabupaten Lampung Timur menunjukkan karakteristik keunggulan komoditas yang beragam dan mencerminkan peran spesifik masing-masing wilayah dalam struktur ekonomi daerah. Kecamatan Metro Kibang unggul pada komoditas jagung dan karet sebagai basis tanaman pangan dan perkebunan, sementara Kecamatan Batanghari memiliki keunggulan yang lebih beragam meliputi padi, kelapa sawit, kopi, pepaya, dan jeruk siam yang mencerminkan integrasi subsektor tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura. Kecamatan Sekampung Udik menonjol sebagai sentra ubi kayu, jagung, dan kakao, sedangkan Kecamatan Pasir Sakti menunjukkan keunggulan strategis pada padi, jeruk siam, serta komoditas perikanan budidaya berupa udang vanname, udang windu, dan ikan bandeng yang menegaskan perannya sebagai kawasan pesisir berbasis ekonomi perikanan. Selanjutnya, Kecamatan Waway Karya unggul pada kelapa sawit, karet, dan jeruk siam, Kecamatan Batanghari Nuban pada padi, ubi kayu, kopi, dan pepaya, Kecamatan Pekalongan pada padi dan kelapa, serta Kecamatan Way Bungur pada ubi kayu dan jagung, yang secara keseluruhan menunjukkan bahwa kecamatan perbatasan memiliki potensi komoditas unggulan yang dapat diarahkan untuk memperkuat

keterkaitan ekonomi antarwilayah dan mendukung pengembangan wilayah berbasis potensi lokal.

6.2.2 Hasil Analisis *Shift Share*

Analisis *Shift-Share* untuk memahami dinamika pertumbuhan dan daya saing komoditas unggulan di Kabupaten Lampung Timur. Pendekatan ini memungkinkan pemisahan perubahan kinerja komoditas ke dalam komponen pertumbuhan umum, pengaruh struktur subsektor, dan keunggulan kompetitif spesifik wilayah, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai sumber pertumbuhan ekonomi daerah. Analisis *Shift-Share* digunakan untuk melengkapi hasil LQ dalam menilai keberlanjutan dan arah pengembangan komoditas unggulan di masing-masing kecamatan.

Tabel 15. Hasil Perhitungan *Shift Share* Komoditas Tanaman Pangan, Perkebunan, Hortikultura dan Perikanan tahun 2023-2024 di Kecamatan Lampung Timur

Kecamatan	Tanaman Pangan			Perkebunan					Hortikultura			Perikanan			Pertumbuhan Kecamatan
	Padi	Ubi Kayu	Jagung	Kelapa Sawit	Kelapa	Kopi	Karet	Kakao	Pisang	Pepaya	Jeruk Siam	Udang Vanname	Udang Windu	Ikan Bandeng	
Metro Kibang	569	56.295	11.099	85	97	33	378	946	-15.050	1.179	7.456	0	0	0	-14.228
Batanghari	67.186	4.512	-8.060	145	288	99	437	1.516	-46.711	3.735	15.190	0	0	0	-14.744
Sekampung	30.986	3.842	14.253	139	209	250	1.841	1.425	-9.372	2.797	0	0	0	0	-10.373
Marga Tiga	14.839	334.134	81.652	280	560	309	654	8.708	-123.812	-12.163	6.199	0	0	0	230.231
Sekampung Udik	21.419	207.180	64.185	274	684	55	931	14.383	-325.759	-30.678	-60.915	0	0	0	-321.067
Jabung	68.855	322.107	67.478	429	346	110	229	1.251	-89.137	5.004	0	0	0	0	84.182
Pasir Sakti	37.493	-21	40.412	216	-125	0	156	158	-13.979	-329	25.089	69.634	-8.217	-11.417	26.673
Waway Karya	55	41.446	48.319	529	130	33	854	469	-787.350	0	140.307	0	0	0	-382.305

Kecamatan	Tanaman Pangan			Perkebunan					Hortikultura			Perikanan			Pertumbuhan Kecamatan
	Padi	Ubi Kayu	Jagung	Kelapa Sawit	Kelapa	Kopi	Karet	Kakao	Pisang	Pepaya	Jeruk Siam	Udang Vanname	Udang Windu	Ikan Bandeng	
Marga Sekampung	-1.325	5.043	76.034	40	156	157	395	1.466	-103.526	25.348	0	0	0	0	-100.738
Labuhan Maringgai	-20.792	4.935	267	440	94	121	312	2.026	-13.848	397	23.588	56.973	-6.721	-9.342	-61.276
Mataram Baru	13.018	32.536	1.191	82	516	0	234	8.902	-2.442	752	1.919	0	0	0	-7.772
Bandar Sribhawono	11.108	195.504	301.693	55	928	186	302	10.226	-1.095.590	-1.877	0	0	0	0	-430.013
Melinting	-18.897	-2.599	115.072	135	1.196	475	633	2.050	-73.515	-701	2.857	0	0	0	-15.036
Gunung Pelindung	7.971	34.196	-8.439	79	443	66	805	664	-4.937	452	1.432	0	0	0	-43.747
Way Jepara	16.872	80.679	1.954	128	429	77	1.012	7.074	-89.526	-63.088	23.676	0	0	0	-109.204
Braja Selehah	-17.816	1.047	29.016	42	272	33	617	1.635	-9.909	148	5.852	0	0	0	-22.536

Kecamatan	Tanaman Pangan			Perkebunan					Hortikultura			Perikanan			Pertumbuhan Kecamatan
	Padi	Ubi Kayu	Jagung	Kelapa Sawit	Kelapa	Kopi	Karet	Kakao	Pisang	Pepaya	Jeruk Siam	Udang Vanname	Udang Windu	Ikan Bandeng	
Labuhan Ratu	16.094	69.808	-7.603	49	628	46	1.510	4.964	-3.600.486	-972	-13.069	0	0	0	-2.187.800
Sukadana	18.105	213.164	18.187	321	346	188	605	10.102	-720	370	9	0	0	0	90.384
Bumi Agung	11.277	95.282	20.319	56	347	0	206	1.321	-56	-20	-19	0	0	0	49.076
Batanghari Nuban	27.587	233.051	7.413	77	542	386	172	2.977	258	25.068	0	0	0	0	94.163
Pekalongan	-9.386	32.512	28.810	41	636	0	302	1.602	-255	1.536	447	0	0	0	2.262
Raman Utara	60.585	1.617	-13.460	115	350	11	334	178	-11.567	728	0	0	0	0	-57.137
Purbolinggo	-29.149	32.795	99.681	30	208	0	156	1.276	-2.886	3.322	1.375	0	0	0	44.814
Way Bungur	-20.982	77.225	36.891	49	143	0	211	296	-18.733	-6.964	-385	0	0	0	30.457

Kecamatan	Tanaman Pangan			Perkebunan					Hortikultura			Perikanan			Pertumbuhan Kecamatan
	Padi	Ubi Kayu	Jagung	Kelapa Sawit	Kelapa	Kopi	Karet	Kakao	Pisang	Pepaya	Jeruk Siam	Udang Vanname	Udang Windu	Ikan Bandeng	
Total	305.670	2.076.290	1.026.364	3.835	9.424	2.637	13.286	85.614	- 6.438.907	- 45.956	181.007	126.607	- 14.938	-20.759	-3.125.736

Ket:

	= Kecamatan Perbatasan
	= 10 Nilai Shift Share Tertinggi
	= Nilai Shift Share <0

Sumber: Hasil olahan tenaga ahli, 2025

Hasil analisis *Shift-Share* menunjukkan bahwa dinamika pertumbuhan komoditas di Kabupaten Lampung Timur bersifat tidak merata antar subsektor dan antarkecamatan, dengan kecenderungan penguatan pada subsektor tanaman pangan dan perkebunan, sementara subsektor hortikultura secara umum mengalami tekanan pertumbuhan. Pada subsektor tanaman pangan, komoditas ubi kayu dan jagung menjadi pendorong utama pertumbuhan nilai produksi di banyak kecamatan, terutama di Marga Tiga, Sekampung Udik, Jabung, Bandar Sribhawono, Sukadana, Batanghari Nuban, dan Purbolinggo, yang mencerminkan pengaruh struktur komoditas yang kuat serta daya saing wilayah yang relatif baik.

Padi juga menunjukkan kontribusi positif di sejumlah kecamatan seperti Batanghari, Jabung, Sekampung, dan Raman Utara, meskipun di beberapa wilayah lain mengalami perlambatan, menandakan adanya perbedaan kapasitas produksi dan respon wilayah terhadap dinamika pasar. Pada subsektor perkebunan, hampir seluruh komoditas utama, khususnya kakao, karet, kopi, dan kelapa sawit menunjukkan perubahan nilai yang positif di sebagian besar kecamatan. Artinya, subsektor ini masih memiliki daya tahan dan potensi pertumbuhan yang baik di tingkat kabupaten. Komoditas kakao memperlihatkan kontribusi pertumbuhan yang sangat signifikan di kecamatan-kecamatan, seperti Sekampung Udik, Mataram Baru, Bandar Sribhawono, Sukadana, dan Way Jepara, sementara karet dan kopi menunjukkan penguatan di wilayah sentra perkebunan rakyat.

Sebaliknya, subsektor hortikultura, khususnya komoditas pisang, secara konsisten menunjukkan nilai perubahan negatif hampir di seluruh kecamatan, yang mengindikasikan penurunan kinerja. Meskipun demikian, beberapa komoditas hortikultura, seperti pepaya dan jeruk siam masih mencatatkan pertumbuhan positif di kecamatan tertentu, termasuk Batanghari, Pasir Sakti, Waway Karya, Labuhan Maringgai, dan Batanghari Nuban, menunjukkan adanya kantong-kantong pertumbuhan spesifik wilayah. Pada subsektor perikanan, pertumbuhan nilai produksi bersifat sangat terlokalisasi, dengan kontribusi positif yang terkonsentrasi di Kecamatan Pasir Sakti dan Labuhan Maringgai.

Hal ini menegaskan karakter subsektor perikanan sebagai penggerak ekonomi yang berbasis wilayah pesisir.

Berdasarkan hasil analisis LQ dan *Shiftshare* tim tenaga ahli dapat merumuskan komoditas unggulan yang memiliki kontribusi yang besar dan memiliki daya saing. Hal ini dapat dilihat dari nilai $LQ > 1$ dan *Shiftshare* yang bernilai positif. Komoditas unggulan pada kecamatan perbatasan kab/kota lainnya di Lampung Timur dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 16. Komoditas Unggulan Kecamatan Perbatasan

No	Kecamatan	Komoditas Unggulan
1	Metro Kibang	Jagung dan Karet
2	Batanghari	Padi, Kelapa Sawit, Kopi, Pepaya dan Jeruk Siam
3	Sekampung Udik	Ubi Kayu, Jagung dan Kakao
4	Pasir Sakti	Padi, Kelapa Sawit, Jeruk Siam dan Udang Vanname
5	Waway Karya	Kelapa Sawit, Karet, Jeruk Siam
6	Batanghari Nuban	Padi, Ubi Kayu, Kopi, Pepaya
7	Pekalongan	Karet dan Kelapa
8	Way Bungur	Ubi Kayu dan Jagung

Sumber: Hasil Analisis Tenaga Ahli, 2025

Tabel di atas memperlihatkan terdapat komoditas unggulan yang ada di kecamatan perbatasan kab/kota lainnya di Lampung Timur. Terdapat komoditas yang merupakan komoditas basis namun memiliki shift share yang negatif, diantaranya adalah komoditas udang windu dan ikan bandeng di kecamatan Pasir Sakti dan komoditas Padi di kecamatan pekalongan.

Komoditas yang memiliki nilai *shiftshare* negatif memperlihatkan bahwa komoditas ini sedang dalam kondisi tertekan. Misalnya pada komoditas padi di Kecamatan Pekalongan, komoditas ini tertekan dengan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Banyak lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan pemukiman akibat dari tekanan penduduk dan pengaruh pertambahan penduduk di Kota Metro dan Kecamatan Pekalongan.

Sehingga lahan pertanian padi pada kecamatan ini sudah mulai berkurang dan mengakibatkan produksi padi menjadi menurun. Komoditas Udang Windu dan Ikan Bandeng hanya dihasilkan oleh 2 kecamatan yaitu Labuhan Maringgai dan Pasir Sakti, dengan kontribusi terbesar berada di Pasir Sakti. Kedua komoditas ini layak dipertimbangkan untuk dimasukkan menjadi komoditas unggulan, meskipun hanya sebagai komoditas pendukung.

6.2.3 Analisis Tipologi Klassen

Analisis kinerja wilayah pada tingkat kecamatan dilakukan melalui penghitungan laju pertumbuhan dan kontribusi kecamatan terhadap perekonomian Kabupaten Lampung Timur. Pengukuran kedua indikator tersebut bertujuan untuk menggambarkan dinamika perkembangan ekonomi antarkecamatan serta menilai besarnya peran relatif masing-masing kecamatan dalam struktur ekonomi kabupaten. Hasil perhitungan pertumbuhan dan kontribusi selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penentuan kecamatan prioritas pengembangan melalui analisis Tipologi Klassen.

Tabel 17. Klasifikasi Kecamatan Perbatasan Berdasarkan Tipologi Klassen

Kecamatan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kuadran	Keterangan
Metro Kibang	2,51%	-0,02	III	Potensial
Batanghari	3,48%	-0,01	III	Potensial
Sekampung Udik	7,76%	-0,27	II	Maju namun tertekan
Pasir Sakti	5,88%	0,08	I	Maju dan Tumbuh Pesat
Waway Karya	5,99%	-0,37	II	Maju namun tertekan
Batanghari Nuban	5,99%	0,23	I	Maju dan Tumbuh Pesat
Pekalongan	2,31%	0,04	III	Potensial
Way Bungur	1,77%	0,25	III	Potensial
Acuan	4,17%	-0,21		

Sumber: Hasil Analisis Tenaga Ahli, 2025

Berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen, pengelompokan kecamatan menunjukkan variasi kinerja ekonomi yang cukup signifikan di wilayah kajian. Kecamatan Pasir Sakti dan Batanghari Nuban berada pada Kuadran I (maju dan tumbuh cepat), yang ditandai oleh tingkat kontribusi terhadap perekonomian kabupaten di atas rata-rata serta laju pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan acuan kabupaten. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedua kecamatan tersebut berperan sebagai motor pertumbuhan ekonomi wilayah, sehingga layak diprioritaskan sebagai pusat pengembangan kegiatan ekonomi dan investasi, khususnya dalam konteks pembangunan kawasan perdesaan dan penguatan klaster berbasis komoditas unggulan.

Kecamatan Sekampung Udik dan Waway Karya berada pada Kuadran II (maju namun tertekan), dengan kontribusi ekonomi yang relatif tinggi tetapi laju pertumbuhan yang berada di bawah rata-rata kabupaten. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua kecamatan memiliki basis ekonomi yang kuat, namun mengalami perlambatan pertumbuhan sehingga memerlukan strategi intervensi berupa peningkatan produktivitas, efisiensi rantai pasok, serta penguatan nilai tambah komoditas agar tidak mengalami penurunan peran ekonomi di masa mendatang. Sementara itu, Kecamatan Metro Kibang, Batanghari, Pekalongan, dan Way Bungur termasuk dalam Kuadran III (berkembang cepat), yang dicirikan oleh kontribusi ekonomi relatif lebih kecil namun memiliki laju pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan acuan kabupaten. Kecamatan-kecamatan ini menunjukkan potensi perkembangan ekonomi yang menjanjikan dan dapat diarahkan sebagai wilayah pendukung pertumbuhan melalui peningkatan akses infrastruktur, penguatan kapasitas produksi, dan dukungan pengembangan komoditas unggulan lokal.

BAB VII

PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS PRODUK UNGGULAN DAN PENDUKUNG

Pengembangan kawasan ditempatkan sebagai strategi terpadu yang mengaitkan potensi sumber daya alam, kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan ekonomi desa, serta dukungan layanan dasar dan infrastruktur dalam satu kesatuan sistem klaster. Analisis klaster diarahkan untuk mengidentifikasi rantai nilai produk unggulan, isu-isu strategis pada setiap subsistem, serta peran para pemangku kepentingan lintas level pemerintahan dan masyarakat desa, sehingga perencanaan pengembangan kawasan perdesaan dapat dilaksanakan secara terukur, berkelanjutan, dan selaras dengan arah pembangunan daerah.

7.1 Tujuan dan Sasaran Klaster

Pengembangan klaster kawasan perdesaan di Kabupaten Lampung Timur bertujuan untuk membangun struktur ekonomi kawasan yang lebih kuat, terintegrasi, dan berdaya saing dengan bertumpu pada produk unggulan dan produk pendukung perdesaan. Pendekatan klaster dipilih untuk mengatasi fragmentasi pembangunan desa yang selama ini cenderung parsial, dengan cara mengonsolidasikan potensi antardesa dalam satu kesatuan sistem produksi, pengolahan, dan pemasaran. Melalui pendekatan kawasan, pengembangan ekonomi perdesaan selain diarahkan pada peningkatan output komoditas, tetapi pada pembentukan ekosistem ekonomi yang mampu menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat keterkaitan desa-kota secara fungsional.

Secara kebijakan, tujuan pengembangan klaster kawasan perdesaan ini sejalan dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 194 Tahun 2023 yang menempatkan pembangunan kawasan perdesaan sebagai instrumen percepatan pembangunan wilayah melalui sinergi lintas desa, lintas sektor, dan lintas pemangku kepentingan. Klaster diposisikan sebagai wahana integrasi antara pemanfaatan

sumber daya alam, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan ekonomi desa, serta penyediaan layanan dasar, dan infrastruktur pendukung. Pengembangan klaster diharapkan mampu menjawab tantangan ketimpangan antarwilayah perdesaan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tujuan khusus pengembangan klaster kawasan perdesaan meliputi penguatan basis produksi komoditas unggulan yang memiliki keunggulan komparatif dan prospek pasar jangka menengah hingga panjang, peningkatan kapasitas pengolahan dan hilirisasi produk untuk memperbesar nilai tambah di tingkat lokal, serta perbaikan sistem distribusi dan pemasaran agar produk perdesaan memiliki daya saing yang lebih baik. Selain itu, pengembangan klaster juga diarahkan untuk memperkuat peran kelembagaan ekonomi desa dan kerja sama antardesa, termasuk Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerja Sama AntarDesa, sebagai aktor utama dalam pengelolaan kegiatan ekonomi kawasan. Klaster dapat kita pahami sebagai sistem pembangunan ekonomi kawasan yang dikelola secara terencana dan terkoordinasi.

Sasaran pengembangan klaster kawasan perdesaan dirumuskan sebagai kondisi terukur yang ingin dicapai selama periode perencanaan RPKP, yang menjadi acuan bagi penetapan prioritas program dan kegiatan. Sasaran tersebut mencakup meningkatnya produktivitas dan kualitas produk unggulan kawasan, berkembangnya kegiatan pengolahan dan industri berbasis perdesaan, serta menguatnya keterkaitan fungsional antara desa pusat kawasan dan desa-desa pendukung. Di samping itu, sasaran juga diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha, tersedianya sarana dan prasarana pendukung klaster secara memadai, serta terwujudnya tata kelola klaster yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Perumusan sasaran ini menjadi dasar bagi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan kawasan perdesaan sebagaimana diamanatkan dalam Kepmendes 194 Tahun 2023.

7.2 Analisis Klaster Unggulan Dan Pendukung

Pendekatan klaster memungkinkan identifikasi keterkaitan fungsional antarkomoditas, antarwilayah desa, dan antarsubsistem produksi, mulai dari hulu hingga hilir menjadi satu kesatuan sistem ekonomi kawasan. Penetapan klaster unggulan dan pendukung dilakukan dengan mempertimbangkan skala dan konsistensi produksi, karakteristik rantai nilai, serta peluang penciptaan nilai tambah yang dapat dikembangkan di dalam kawasan perdesaan. Klaster unggulan diposisikan sebagai penggerak utama ekonomi kawasan yang memiliki daya dorong paling besar terhadap pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja, sementara klaster pendukung berperan memperkuat stabilitas sistem, memperluas basis usaha, dan menjaga kesinambungan produksi lintas musim dan lintas subsektor.

Berdasarkan pendekatan klaster, kawasan perdesaan Lampung Timur dibagi menjadi tiga klaster strategis, yaitu agroindustri, swasembada pangan, dan perikanan atau minapolitan. Ketiga klaster tersebut membentuk tulang punggung produksi kawasan perdesaan Lampung Timur dan menjadi simpul utama dalam upaya meningkatkan nilai tambah, ketahanan ekonomi, serta integrasi pembangunan antar wilayah desa.

Analisis skala dan signifikansi produksi dilakukan untuk menilai bobot strategis masing-masing komoditas agroindustri dalam struktur ekonomi kawasan perdesaan Kabupaten Lampung Timur. Penilaian ini menjadi dasar awal dalam menentukan komoditas inti dan komoditas pendukung klaster, dengan mempertimbangkan volume produksi, konsistensi antarwaktu, serta implikasinya terhadap peluang pengembangan nilai tambah dan daya ungkit ekonomi kawasan. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa pengembangan klaster tidak bertumpu pada asumsi normatif, melainkan pada kapasitas produksi riil yang tersedia di tingkat kawasan.

7.2.1 Klaster Agroindustri: Kopi, Kelapa sawit, Ubi kayu, Kelapa

Berdasarkan data produksi (BPS,2025), ubi kayu menempati posisi paling signifikan dengan volume panen mencapai 1.320.187 ton pada 2024, jauh melampaui komoditas agroindustri lainnya. Skala produksi ini menunjukkan bahwa ubi kayu merupakan komoditas berbasis massa (*volume-driven commodity*) yang memiliki peran sentral dalam menopang skala ekonomi agroindustri kawasan. Besarnya volume bahan baku memberikan peluang nyata bagi pengembangan industri pengolahan berbasis perdesaan, baik pada tahap pengolahan awal maupun lanjutan, sepanjang didukung oleh sistem pengumpulan, logistik, dan kelembagaan yang memadai. Ubi kayu layak diposisikan sebagai komoditas inti klaster agroindustri di Kabupaten Lampung Timur.

Di luar ubi kayu, kelapa dan kelapa sawit menunjukkan skala produksi yang lebih moderat namun relatif stabil. Produksi kelapa tercatat meningkat dari 11.434 ton pada 2023 menjadi 11.577 ton pada 2024, sementara produksi kelapa sawit berada pada kisaran 7.262–7.379 ton dalam periode yang sama. Stabilitas ini mencerminkan keberlanjutan pasokan bahan baku yang penting bagi pengembangan agroindustri berbasis perkebunan rakyat. Meskipun volumenya tidak sebesar ubi kayu, kedua komoditas ini memiliki signifikansi strategis sebagai penopang diversifikasi klaster agroindustri, khususnya untuk pengembangan produk olahan bernilai tambah dan penguatan ekonomi rumah tangga perdesaan.

Kopi memiliki skala produksi yang relatif kecil, dengan volume 220 ton pada 2023 dan meningkat menjadi 233 ton pada 2024. Secara kuantitatif, kopi belum berperan signifikan sebagai penopang utama volume produksi kawasan. Karakteristik kopi sebagai komoditas bernilai ekonomi tinggi menempatkannya pada posisi strategis yang berbeda. Dalam konteks klaster agroindustri, kopi lebih relevan dikembangkan sebagai komoditas unggulan spesifik berbasis kualitas dan diferensiasi pasar, bukan sebagai penggerak utama skala industri. Kopi tetap memiliki kontribusi penting terhadap peningkatan pendapatan petani dan citra produk

kawasan, meskipun tidak menjadi tulang punggung volume produksi.

Analisis skala dan signifikansi produksi menunjukkan adanya struktur komoditas yang bersifat berlapis dalam klaster agroindustri Kabupaten Lampung Timur. Ubi kayu berperan sebagai penggerak utama skala ekonomi dan hilirisasi, kelapa dan kelapa sawit sebagai komoditas pendukung yang memperkuat stabilitas dan diversifikasi produksi, serta kopi sebagai komoditas spesifik bernilai tambah tinggi. Struktur ini menjadi dasar penting bagi perumusan strategi pengembangan klaster, khususnya dalam penentuan fokus intervensi pada tahapan rantai nilai, penataan kelembagaan ekonomi kawasan, dan penyusunan prioritas program pembangunan agroindustri perdesaan.

Dalam pengembangan klaster agroindustri Kabupaten Lampung Timur, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Selatan diposisikan sebagai pasar utama dan simpul distribusi regional bagi komoditas unggulan, seperti ubi kayu, jagung, kelapa sawit, karet, kopi, kelapa, dan jeruk siam. Kota Metro berfungsi sebagai pusat konsumsi perkotaan dan perdagangan jasa dengan permintaan yang relatif stabil terhadap produk pangan dan hortikultura, sedangkan Lampung Selatan berperan sebagai pusat perdagangan skala besar, kawasan industri pengolahan, serta gerbang logistik Sumatra–Jawa. Struktur pasar ini menciptakan keterkaitan fungsional yang kuat antara wilayah produksi di Lampung Timur dengan pasar perkotaan dan industri di wilayah sekitarnya.

Kecamatan Sekampung Udik memiliki posisi strategis karena berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Timur ditetapkan sebagai salah satu kawasan peruntukan industri. Penetapan ini memperkuat peran Sekampung Udik tidak hanya sebagai sentra produksi bahan baku ubi kayu dan jagung, tetapi juga sebagai lokasi potensial pengembangan kegiatan pengolahan dan hilirisasi agroindustri. Sekampung Udik diarahkan menjadi pusat pengolahan awal dan agregasi bahan baku yang memasok produk antara maupun produk olahan ke Kota Metro dan Lampung Selatan.

Sementara itu, Kota Metro berperan sebagai simpul pemasaran dan distribusi antara, yang menjembatani aliran produk agroindustri dari wilayah produksi dan pengolahan di Lampung Timur menuju pasar yang lebih luas. Produk yang telah melalui pengolahan awal di Sekampung Udik dan kecamatan produsen lainnya dipasarkan melalui jaringan perdagangan di Kota Metro untuk konsumsi perkotaan, UMKM pangan, dan jasa kuliner. Selanjutnya, Lampung Selatan berfungsi sebagai pasar akhir dan simpul hilir lanjutan, terutama bagi komoditas berbasis volume dan industri, dengan dukungan infrastruktur perdagangan dan akses pelabuhan. Pola keterkaitan Lampung Timur–Kota Metro–Lampung Selatan ini membentuk sistem klaster agroindustri regional yang terintegrasi, efisien, dan berdaya saing.

Tabel 18. Deliniasi Klaster Agroindustri

Kecamatan	Peran dalam Klaster	Komoditas	Fungsi Utama dalam Rantai Nilai	Arah Pengembangan	Target Pasar
Sekampung Udik	Pusat Kawasan	Ubi Kayu, Jagung, Kakao	- Sentra produksi utama ubi kayu dan jagung- Penyedia bahan baku kakao rakyat- Pengumpulan hasil panen komoditas pangan dan perkebunan	- Penguatan produktivitas ubi kayu dan jagung- Perbaikan pascapanen (pengeringan jagung, fermentasi kakao)- Integrasi pasokan ke pusat pengolahan kawasan	Industri tapioka Lampung Timur & Lampung Tengah Industri pakan ternak (Lampung Tengah & Lampung Selatan) Pasar regional
Metro Kibang	Hinterland Produksi	Jagung, Karet	- Sentra produksi jagung dan karet rakyat- Penyedia bahan baku	- Peningkatan produktivitas jagung- Peningkatan mutu bokar- Penguatan	Industri pakan ternak Lampung Selatan

Kecamatan	Peran dalam Klaster	Komoditas	Fungsi Utama dalam Rantai Nilai	Arah Pengembangan	Target Pasar
			jagung untuk pakan ternak- Penyedia bokar untuk industri karet	rantai pasok ke pusat kawasan	Industri pengolahan karet regional Pasar tradisional
Batanghari	Hinterland Produksi	Padi, Kelapa Sawit, Kopi, Jeruk Siam	- Sentra produksi padi dan beras- Produksi TBS kelapa sawit rakyat- Produksi kopi dan jeruk siam	- Penguatan penggilingan padi- Peningkatan kualitas TBS- Pengolahan kopi sederhana & pascapanen jeruk	RMU Lampung Timur & Lampung Selatan PKS Lampung Selatan Pasar buah Lampung Selatan

Kecamatan	Peran dalam Klaster	Komoditas	Fungsi Utama dalam Rantai Nilai	Arah Pengembangan	Target Pasar
Waway Karya	Hinterland Perkebunan	Kelapa Sawit, Karet, Jeruk Siam	- Produksi TBS kelapa sawit- Produksi karet rakyat- Produksi jeruk siam	- Penguatan kemitraan dengan industri pengolahan- Peningkatan mutu bahan baku- Perluasan akses pasar jeruk	PKS Lampung Selatan Industri karet regional Pasar buah Lampung Selatan
Pekalongan	Simpul Pemasaran & Perdagangan Agroindustri	Karet dan Kelapa	- Sentra produksi kelapa dan karet rakyat - Pusat pemasaran dan distribusi produk agroindustri- Simpul perdagangan	- Penguatan fungsi perdagangan dan logistik - Pengembangan sentra UMKM olahan kelapa - Peningkatan akses pasar antar kabupaten	Pabrik VCO Lampung Timur Industri Pengolahan Karet di Lampung Selatan Kota Metro dan Lampung Selatan (pasar grosir &

Kecamatan	Peran dalam Klaster	Komoditas	Fungsi Utama dalam Rantai Nilai	Arah Pengembangan	Target Pasar
			antarwilayah dengan Kota Metro dan Lampung Selatan		ritel) Pasar lokal-regional

Dalam penguatan keterkaitan antarwilayah pada pengembangan klaster agroindustri Kabupaten Lampung Timur, peran desa-desa perbatasan menjadi penting sebagai simpul penghubung antara wilayah produksi dan wilayah pasar utama. Pada perbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah, desa-desa Wonosari di Kecamatan Pekalongan, Trisnomulyo, Purwosari, dan Sritejo Kencono di Kecamatan Batanghari Nuban, serta Tanjung Kencono, Tanjung Tambah Subur, dan Tanjung Kali Pasir di Kecamatan Way Bungur berfungsi sebagai koridor distribusi yang memfasilitasi aliran komoditas agroindustri menuju pusat pengolahan dan pasar regional. Pada perbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan, desa-desa Sumber Rejo dan Purwodadi Mekar di Kecamatan Batanghari, Purbosembodo dan Jaya Asri di Kecamatan Metro Kibang, Gunung Agung dan Sindang Anom di Kecamatan Sekampung Udik, serta desa-desa di Kecamatan Waway Karya yang meliputi Tri Tunggal, Jembrana, Tanjung Wangi, Ngesti Karya, Karya Basuki, Marga Batin, Karang Anom, dan Sidorahayu, diposisikan sebagai titik transit dan simpul logistik perdesaan yang memperkuat konektivitas produksi Lampung Timur dengan pasar utama di Kota Metro dan Kabupaten Lampung Selatan.

Saat ini telah beroperasi industri pengolahan yang menjadi bagian dari rantai pasok (supply chain) awal dalam klaster kawasan perdesaan agroindustri yang akan dibentuk. Keberadaan industri-industri tersebut mencerminkan keterkaitan fungsional antara tahapan hulu-hilir, mulai dari penyediaan bahan baku pertanian dan perkebunan lokal (singkong, padi, jagung, kopi, dan sawit), proses pengolahan skala rumah tangga dan UMKM, hingga distribusi produk olahan ke pasar lokal dan regional. Dengan demikian, industri eksisting ini tidak hanya menunjukkan aktivitas ekonomi yang telah berjalan, tetapi juga menjadi entitas penting dalam sistem klaster agroindustri, yang dapat diperkuat melalui peningkatan integrasi rantai pasok, efisiensi logistik, standardisasi produksi, serta pengembangan nilai tambah pada tahap pascapanen dan pengolahan.

Tabel 19. Jenis Industri yang Telah Beroperasi di Klaster Agroindustri

Jenis Industri	Batanghari	Metro Kibang	Selampung Udik	Waway Karya	Pekalongan	Total
Keripik Singkong		2	3	2		7
Klanting		1	7	2	7	17
Opak			1		1	2
Pengolahan Jagung					1	1
Pengolahan Kopi	1	2	1			4
Pengolahan Padi			2		5	7
Tapioka					1	1
Tiwul					1	1
Pengolahan Sawit			1			1
Grand Total	1	5	15	4	16	41

Ket:

 = Informasi tambahan yang diperoleh dari pencarian

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung Timur (2025) dan Pemerintah Provinsi Lampung (2025)

Berdasarkan tabel di atas yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung Timur serta situs Pemerintah Provinsi Lampung, total terdapat 41 unit industri pengolahan yang tersebar di lima kecamatan, dengan konsentrasi tertinggi berada di Kecamatan Pekalongan (16 unit) dan Selampung Udik (15 unit), diikuti oleh Waway Karya (4 unit), Metro Kibang (5 unit), dan Batanghari (1 unit). Secara jenis, industri klanting mendominasi dengan 17 unit yang tersebar relatif merata, terutama di Selampung Udik dan Pekalongan, menunjukkan spesialisasi klaster pada olahan pangan berbasis singkong. Industri keripik singkong dan pengolahan padi masing-masing berjumlah 7 unit, menandakan peran penting komoditas singkong dan padi dalam struktur

ekonomi lokal. Sementara itu, industri lain seperti pengolahan kopi (4 unit), opak, tapioka, tiwul, dan pengolahan jagung masih terbatas dan tersebar sporadis, yang mengindikasikan potensi pengembangan lebih lanjut melalui penguatan rantai nilai, diversifikasi produk, serta dukungan infrastruktur dan kelembagaan dalam klaster tersebut. Berdasarkan situs pemerintah provinsi lampung pada 16 Oktober 2025 telah diresmikan pabrik Kelapa Sawit PT. Pesona Sawit Makmur (PT. PSM) oleh Wakil Gubernur Lampung. Pabrik ini memiliki merupakan mitra dari sebagian besar 250.000 hektare lahan perkebunan sawit yang dikelola oleh masyarakat. Hal ini akan mendorong hilirisasi komoditas kelapa sawit di klaster ini.

7.2.1.1 Pemetaan Rantai Pasok dan Hambatan (*Bottleneck*) Utama

Pemetaan rantai pasok klaster agroindustri dilakukan untuk menelusuri alur pergerakan komoditas unggulan, seperti kopi, kelapa, kelapa sawit, dan ubi kayu, mulai dari tahap penyediaan input dan produksi di tingkat petani hingga pemasaran produk ke konsumen akhir. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi titik-titik kritis yang menghambat terciptanya nilai tambah di kawasan perdesaan Kabupaten Lampung Timur. Dengan memahami posisi dan fungsi setiap subsistem dalam rantai nilai, perencanaan pengembangan klaster dapat diarahkan secara lebih fokus, terukur, dan relevan dengan kapasitas riil kawasan.

a. Subsistem Prasarana dan Logistik

Pada tahap awal rantai nilai, hambatan utama terletak pada keterbatasan prasarana pendukung dan efisiensi logistik bahan baku. Komoditas berbasis volume besar, seperti ubi kayu sangat sensitif terhadap jarak dan waktu angkut, karena keterlambatan distribusi dapat menurunkan kualitas dan meningkatkan biaya produksi. Kelapa dan kelapa sawit juga menghadapi tantangan serupa, di mana keterlambatan penanganan pascapanen berdampak langsung pada mutu bahan baku. Untuk kopi, keterbatasan prasarana lebih terlihat pada minimnya sarana pengeringan dan penyimpanan yang memadai di tingkat petani dan

kelompok. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar produk dijual dalam kondisi mentah tanpa melalui proses penanganan awal yang optimal.

b. Subsistem Produksi dan Budidaya

Pada subsistem produksi, hambatan utama berkaitan dengan variasi produktivitas dan kualitas hasil panen. Ubi kayu diproduksi dalam skala besar, namun belum sepenuhnya didukung oleh keseragaman varietas dan standar mutu yang sesuai dengan kebutuhan industri pengolahan. Kelapa dan kelapa sawit menghadapi persoalan praktik budidaya dan panen yang belum optimal, yang berdampak pada rendemen dan konsistensi pasokan. Kopi sangat bergantung pada praktik budidaya dan panen selektif, tanpa pendampingan teknis yang memadai, potensi nilai tambah berbasis kualitas sulit dikembangkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kuantitas produksi perlu diiringi dengan perbaikan kualitas dan konsistensi hasil.

Selain itu, di Kecamatan Batanghari khususnya Desa Banjarejo menghadapi hambatan struktural dalam pengembangan sektor pertanian, khususnya berupa alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian. Kondisi ini dipengaruhi oleh kedekatan wilayah desa dengan pusat pendidikan tinggi di Kota Metro, yaitu IAIN Metro, Universitas Muhammadiyah Metro, dan STKIP PGRI Metro. Keberadaan tiga kampus tersebut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi non-pertanian di sekitar Banjarejo, sehingga tekanan terhadap pemanfaatan ruang desa semakin tinggi.

Meningkatnya jumlah mahasiswa dan pendatang memicu permintaan kos-kosan, rumah kontrakan, serta jasa penunjang lainnya. Situasi ini menciptakan insentif ekonomi yang kuat bagi pemilik lahan untuk mengalihkan fungsi lahannya dari pertanian menjadi hunian sewa atau usaha jasa, karena dianggap lebih cepat menghasilkan pendapatan dan relatif stabil. Akibatnya, luas lahan pertanian produktif cenderung menyusut, yang pada jangka menengah-panjang berpotensi menurunkan kapasitas produksi pertanian desa serta melemahkan basis ekonomi agraris Banjarejo.

c. Subsistem Pengolahan dan Hilirisasi

Subsistem pengolahan merupakan titik paling krusial dalam rantai nilai klaster agroindustri. Pada sebagian besar komoditas, khususnya ubi kayu dan kelapa, kegiatan pengolahan di tingkat kawasan masih terbatas atau belum terorganisasi secara memadai. Akibatnya, nilai tambah yang seharusnya dapat diciptakan di kawasan perdesaan justru berpindah ke luar wilayah. Pada komoditas kelapa sawit, keterbatasan akses terhadap fasilitas pengolahan skala besar melemahkan posisi tawar petani dalam rantai pasok. Adapun pada kopi, keterbatasan fasilitas pengolahan pascapanen dan peralatan sederhana, seperti pengupasan, fermentasi, dan pengeringan menghambat pengembangan produk berkualitas tinggi. Hambatan pada subsistem ini menjadi penghambat utama peningkatan nilai ekonomi klaster.

d. Subsistem Pemasaran dan Tata Niaga

Pada tahap pemasaran, permasalahan utama terletak pada lemahnya posisi tawar produsen perdesaan dan belum terbangunnya mekanisme pemasaran yang terkoordinasi. Produk agroindustri umumnya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah atau setengah jadi, dengan ketergantungan tinggi pada pedagang perantara. Ubi kayu dan kelapa sangat rentan terhadap fluktuasi harga karena tidak adanya kepastian pasar melalui kontrak jangka menengah. Kopi menghadapi tantangan berbeda, yaitu keterbatasan akses ke pasar yang menghargai kualitas dan diferensiasi produk. Tanpa penguatan sistem pemasaran dan kemitraan usaha, peningkatan produksi tidak secara otomatis meningkatkan pendapatan masyarakat.

e. Subsistem Kelembagaan Ekonomi

Seluruh hambatan dalam rantai nilai pada akhirnya bermuara pada subsistem kelembagaan ekonomi. Lemahnya kelembagaan agregator di tingkat kawasan menyebabkan produksi yang besar dan beragam tidak terkelola secara kolektif. Peran kelompok tani, Badan Usaha Milik Desa, Badan Kerja Sama AntarDesa, dan pelaku usaha lainnya belum terhubung secara efektif dalam satu sistem klaster. Akibatnya, rantai nilai berjalan

secara terfragmentasi dan nilai tambah banyak keluar dari kawasan. Penguatan kelembagaan ekonomi kawasan menjadi kunci untuk menjembatani seluruh subsistem dan memastikan bahwa pengembangan klaster agroindustri berlangsung secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pemetaan rantai nilai menunjukkan bahwa tantangan utama klaster agroindustri Kabupaten Lampung Timur bukan terletak pada ketersediaan bahan baku, melainkan pada keterpaduan sistem dari hulu hingga hilir. Identifikasi hambatan pada setiap subsistem ini menjadi dasar bagi perumusan strategi intervensi dan penentuan prioritas kegiatan pada tahapan perencanaan berikutnya.

7.2.1.2 Analisis Kesiapan Hilirisasi dan Skala Prioritas

Integrasi antara analisis kesiapan hilirisasi dan penetapan skala prioritas dilakukan untuk memastikan bahwa pengembangan klaster agroindustri di Kabupaten Lampung Timur berjalan secara realistis, bertahap, dan berdampak nyata bagi perekonomian kawasan perdesaan. Analisis kesiapan hilirisasi memberikan gambaran mengenai kapasitas riil masing-masing komoditas untuk dikembangkan ke arah peningkatan nilai tambah, sementara skala prioritas berfungsi sebagai instrumen pengambilan keputusan untuk menentukan urutan intervensi yang paling rasional dalam konteks keterbatasan sumber daya dan kelembagaan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kesiapan hilirisasi antarkomoditas bersifat berlapis dan tidak seragam. Ubi kayu memiliki tingkat kesiapan paling tinggi karena ditopang oleh volume produksi yang sangat besar dan kesinambungan bahan baku, sehingga layak dijadikan penggerak utama hilirisasi kawasan. Kelapa menunjukkan kesiapan menengah dengan peluang pengembangan hilirisasi bertahap yang relatif aman dan dapat dikelola oleh pelaku usaha lokal. Kelapa sawit memiliki kesiapan hilirisasi terbatas di tingkat kawasan, sehingga strategi pengembangannya lebih tepat difokuskan pada penguatan rantai pasok dan kemitraan usaha. Sementara itu, kopi memiliki kesiapan hilirisasi yang bersifat selektif dan berbasis kualitas, dengan fokus pada peningkatan mutu dan diferensiasi pasar.

Berdasarkan tingkat kesiapan tersebut, skala prioritas pengembangan klaster agroindustri ditetapkan dengan mempertimbangkan tiga dimensi utama, yaitu besaran dampak ekonomi kawasan, kesiapan pelaksanaan di tingkat perdesaan, serta risiko implementasi. Komoditas dengan kesiapan tinggi dan dampak luas ditempatkan pada prioritas utama, sementara komoditas dengan kesiapan terbatas atau dampak lebih sempit diarahkan sebagai prioritas menengah atau spesifik. Pendekatan ini memungkinkan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan yang lebih fokus, menghindari *over-investment* pada komoditas yang belum siap, sekaligus memastikan kesinambungan hasil pembangunan.

Tabel 20. Arah Strategi Pembangunan Berbasis Komoditas Unggulan

No	Komoditas	Karakteristik Produksi	Kondisi Hilir	Kesiapan Hilirisasi	Skala Prioritas	Arah Strategi Pengembangan
1	Ubi Kayu	Produksi sangat besar dan stabil (1.320.187 ton tahun 2024 dan 843.567 ton pada tahun 2023)	Sudah terdapat industri pengolah ubi kayu namun fluktuasi harga di tingkat petani sangat tinggi	Tinggi	Prioritas Utama	Penguatan kemitraan petani-industri berbasis mutu dan kepastian serap
2	Kelapa	Produsen terbesar ketiga di prov. Lampung (11.578 ton tahun 2024 dan 11.435 ton pada tahun 2023)	Terdapat industri pengolahan kelapa di Kec. Sekampung	Tinggi	Prioritas Menengah Tinggi	Hilirisasi bertahap: penguatan pascapanen, standardisasi bahan baku, dan pengembangan produk olahan skala lokal

No	Komoditas	Karakteristik Produksi	Kondisi Hilir	Kesiapan Hilirisasi	Skala Prioritas	Arah Strategi Pengembangan
3	Kelapa Sawit	Produksi menengah (Produksi 7.262 ton pada 2024 dan 7.433 ton pada 2023)	Terdapat industri pengolahan di Kec. Sekampung Udik	Menengah	Prioritas Menengah	Penguatan rantai pasok, peningkatan kualitas bahan baku, dan kemitraan dengan industri pengolahan
4	Kopi	Produksi menengah (produksi 231 ton pada 2024 dan 233 ton pada 2023)	Sangat terbatas dalam skala kecil	Menengah	Prioritas menengah	Hilirisasi selektif melalui peningkatan mutu pascapanen
5	Kakao	Produsen terbesar keempat di prov Lampung (3.891 ton pada 2024 dan 3.240 ton pada 2023)	Sangat terbatas dalam skala kecil	Menengah	Prioritas menengah	Hilirisasi selektif melalui fermentasi, pengolahan sederhana, dan pengembangan pasar niche

No	Komoditas	Karakteristik Produksi	Kondisi Hilir	Kesiapan Hilirisasi	Skala Prioritas	Arah Strategi Pengembangan
6	Karet	Produksi menengah (produksi 6.694 ton tahun 2024 dan 6.584 ton tahun 2023)	Sangat terbatas dalam skala kecil	Menengah	Prioritas menengah	Penguatan mutu bahan baku, efisiensi rantai pasok, dan kemitraan dengan industri pengolahan
7	Jeruk Siam	Produsen terbesar kedua di Prov Lampung, namun jumlah produksi fluktuatif (37.393 ton tahun 2024 dan 44.930 ton tahun 2023)	Terbatas pada penjualan produk segar	Tinggi	Prioritas Menengah Tinggi	Hilirisasi pascapanen dan olahan ringan (jus, manisan), penguatan rantai distribusi
8	Jagung	Produksi sangat besar dan stabil (789.606 ton tahun 2024 dan 728.397 ton pada tahun 2023)	Sudah terdapat pengolahan jagung namun masih dalam skala kecil	Tinggi	Sangat Tinggi	Penguatan industri pengolahan jagung

7.2.1.3 Pemetaan Aktor dan Pembagian Peran

Pemetaan aktor dan pembagian peran dalam pengembangan klaster agroindustri merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh tahapan rantai nilai, mulai dari produksi bahan baku hingga pemasaran dan penguatan kelembagaan, berjalan secara terkoordinasi dan saling melengkapi. Mengingat pengembangan klaster melibatkan berbagai pelaku dengan kewenangan dan kapasitas yang berbeda, kejelasan peran menjadi prasyarat utama agar intervensi pembangunan kawasan perdesaan tidak tumpang tindih, serta mampu memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia di tingkat desa dan kawasan.

Pemetaan aktor disusun dengan mengacu pada struktur rantai nilai klaster agroindustri dan perbedaan peran antara aktor internal kawasan dan aktor eksternal kawasan. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi yang lebih jelas mengenai siapa melakukan apa pada setiap subsistem, serta bagaimana peran tersebut saling terhubung dalam satu kerangka tata kelola klaster. Tabel berikut menyajikan pembagian peran aktor secara ringkas dan operasional, yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program, koordinasi lintas pemangku kepentingan, serta pengendalian pelaksanaan pengembangan klaster agroindustri di Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 21. Sub Sistem Rantai Nilai

No	Sub-sistem Rantai Nilai	Aktor Utama (Internal Kawasan)	Peran Utama	Aktor Pendukung (Eksternal Kawasan)	Peran Pendukung
1	Produksi & Budidaya	Petani, Kelompok Tani, Gapoktan	Produksi bahan baku, penerapan praktik budidaya, menjaga kontinuitas dan kualitas hasil panen	OPD teknis (Pertanian/ Perkebunan), Penyuluh	Pendampingan teknis, peningkatan produktivitas, penerapan standar mutu
2	Pengumpulan & Pascapanen	BUMDes, BUMDes Bersama/BKAD	Agregasi bahan baku, penanganan pascapanen awal, penerapan grading dan standardisasi	OPD terkait, Pemerintah Desa	Fasilitasi sarana pascapanen, dukungan kebijakan dan pendanaan

No	Sub-sistem Rantai Nilai	Aktor Utama (Internal Kawasan)		Peran Utama	Aktor Pendukung (Eksternal Kawasan)	Peran Pendukung
3	Pengolahan/ Hilirisasi	BUMDes, Bersama, Perdesaan	BUMDes UMKM	Pengelolaan unit pengolahan skala kawasan/desa, pengembangan produk olahan	OPD Perindustrian, Koperasi & UMKM, Swasta	Penyediaan peralatan, pelatihan pengolahan, transfer teknologi
4	Pemasaran & Tata Niaga	BUMDes, UMKM	Koperasi,	Pemasaran produk, pengelolaan kontrak penjualan, penguatan posisi tawar produsen	Offtaker, Swasta, OPD Perdagangan	Akses pasar, kontrak pembelian, promosi dan pengembangan jejaring
5	Kelembagaan & Tata Kelola Klaster	BUMDes Bersama/BKAD		Koordinasi antar desa, pengelolaan klaster, integrasi kegiatan lintas sub-sistem	Bappeda, Dinas PMD	Sinkronisasi perencanaan, penguatan regulasi dan kelembagaan

No	Sub-sistem Rantai Nilai	Aktor Utama (Internal Kawasan)	Peran Utama	Aktor Pendukung (Eksternal Kawasan)	Peran Pendukung
6	Pembiayaan & Investasi	BUMDes, Koperasi	Pengelolaan modal usaha, pembiayaan operasional	Lembaga Keuangan, Perbankan, Pemerintah Daerah	Akses kredit, pembiayaan investasi, dukungan insentif
7	Peningkatan Kapasitas & Inovasi	Kelompok Tani, UMKM	Peningkatan keterampilan teknis dan manajerial	Perguruan Tinggi, Lembaga Pendamping	Pelatihan, inovasi produk, pendampingan berkelanjutan

7.2.2 Klaster Swasembada Pangan: Tanaman Pangan dan Holtikultura

Klaster swasembada pangan di Kabupaten Lampung Timur bertumpu secara fundamental pada produksi padi sebagai penyangga utama ketahanan pangan daerah. Data produksi menunjukkan bahwa padi sawah merupakan komoditas yang paling dominan dalam struktur pangan daerah, dengan total produksi mencapai sekitar 555.369 ton pada 2023 dan 521.603 ton pada 2024. Angka ini jauh melampaui produksi padi ladang yang kontribusinya relatif kecil, yakni 844 ton pada 2023 dan 2.505 ton pada 2024. Dominasi padi sawah ini menegaskan bahwa sistem pangan Lampung Timur sangat bergantung pada keberlanjutan lahan sawah beririgasi sehingga stabilitas produksi padi tidak hanya menjadi isu sektor pertanian, tetapi juga menjadi prasyarat bagi stabilitas sosial dan ekonomi kawasan perdesaan secara keseluruhan.

Produksi padi tersebut tidak tersebar secara merata antarwilayah, melainkan terkonsentrasi pada kecamatan-kecamatan tertentu yang berfungsi sebagai sentra pangan daerah. Konsentrasi produksi ini membentuk struktur spasial pangan yang relatif kuat, namun sekaligus menyimpan potensi kerentanan apabila terjadi gangguan produksi pada wilayah sentra, baik akibat degradasi jaringan irigasi, perubahan iklim, maupun tekanan alih fungsi lahan. Dengan struktur produksi seperti ini, penguatan klaster swasembada pangan tidak dapat hanya mengandalkan peningkatan produktivitas, tetapi juga perlu diarahkan pada pengelolaan risiko produksi, penguatan infrastruktur pendukung, serta pengaturan keterkaitan antar wilayah produksi agar pasokan beras daerah tetap terjaga secara berkelanjutan.

Selain padi sebagai pangan pokok, klaster swasembada pangan Lampung Timur juga ditopang oleh komoditas hortikultura yang berperan penting dalam diversifikasi konsumsi dan pemenuhan kebutuhan pangan segar masyarakat. Data panen hortikultura menunjukkan bahwa sejumlah komoditas memiliki volume produksi yang cukup signifikan. Pada 2023, produksi tomat tercatat sekitar 27.787 kuintal, terung sekitar 15.588 kuintal, semangka sekitar 5.222 kuintal, dan kacang panjang sekitar 4.250 kuintal. Komoditas lain, seperti kangkung dan cabai rawit juga menunjukkan kontribusi yang nyata, masing-masing dengan

produksi sekitar 2.605 kuintal dan 2.069 kuintal. Skala produksi ini menempatkan hortikultura sebagai komponen penting dalam sistem pangan daerah, khususnya dalam menjaga keterjangkauan pangan segar dan variasi konsumsi rumah tangga.

Berbeda dengan padi yang relatif stabil, produksi hortikultura menunjukkan tingkat fluktuasi yang lebih tinggi antar tahun karena sangat dipengaruhi oleh musim, kondisi cuaca, serta dinamika harga pasar. Fluktuasi ini menandakan bahwa hortikultura memiliki karakter yang lebih rentan dalam rantai pasok pangan, meskipun perannya sangat penting dalam menjaga stabilitas harga dan pendapatan petani. Klaster swasembada pangan di Kabupaten Lampung Timur perlu dipahami sebagai suatu sistem terintegrasi yang menghubungkan produksi padi yang bersifat struktural dengan hortikultura yang bersifat dinamis. Pendekatan ini mengarahkan penguatan klaster tidak hanya pada peningkatan volume produksi, tetapi pada upaya menjaga kesinambungan pasokan, mengurangi volatilitas pangan segar, serta memperkuat tata kelola rantai pasok pangan di tingkat kawasan perdesaan. Pemahaman ini menjadi landasan bagi analisis pada bagian selanjutnya, khususnya dalam pemetaan rantai pasok dan identifikasi hambatan utama klaster swasembada pangan.

Dalam klaster swasembada pangan, desa-desa perbatasan Kabupaten Lampung Tengah berperan sebagai simpul hilirisasi dan pasar antara wilayah produksi di Lampung Timur dan pusat industri pangan Lampung Tengah, khususnya untuk komoditas padi, jagung, dan ubi kayu. Hilirisasi padi diarahkan pada penguatan penggilingan dan distribusi beras, sementara hilirisasi jagung difokuskan pada pemenuhan kebutuhan bahan baku pakan ternak. Adapun hilirisasi ubi kayu dikembangkan melalui industri pengolahan tapioka dan produk turunannya. Kabupaten Lampung Tengah berperan sebagai pasar utama karena merupakan sentra produksi unggas berskala besar yang menyerap jagung sebagai bahan pakan, dan memiliki konsentrasi pabrik tapioka terbanyak di Provinsi Lampung, sehingga menjadi pusat permintaan dan pengolahan bagi komoditas padi, jagung, dan ubi kayu dari wilayah sekitarnya.

Dalam pengembangan klaster swasembada pangan, Kecamatan Batanghari Nuban ditetapkan sebagai pusat kawasan dengan peran ganda sebagai sentra produksi utama ubi kayu

sekaligus pusat pengolahan awal dan distribusi komoditas pangan. Sementara itu, Kecamatan Way Bungur berfungsi sebagai wilayah hinterland dengan spesialisasi sebagai sentra produksi utama jagung dan Kecamatan Pekalongan berfungsi sebagai wilayah hinterland dengan spesialisasi sebagai sentra produksi utama padi yang memasok bahan baku ke pusat kawasan.

Ubi kayu yang diproduksi di Batanghari Nuban menjadi basis pengembangan hilirisasi komoditas, baik melalui penanganan pascapanen maupun keterkaitan dengan industri pengolahan di wilayah yang lebih luas. Di sisi lain, jagung dari Way Bungur mengalir ke Batanghari Nuban untuk dikonsolidasikan, ditangani pascapanennya, dan selanjutnya didistribusikan ke pasar antarwilayah. Komoditas padi diproduksi dari Kecamatan Pekalongan sebagai bagian dari sistem pendukung ketahanan pangan kawasan.

Dengan pembagian peran tersebut, Way Bungur–Batanghari Nuban- Pekalongan membentuk struktur klaster pangan yang saling melengkapi, di mana spesialisasi produksi antar kecamatan memperkuat efisiensi rantai nilai dan mendukung pengembangan swasembada pangan secara berkelanjutan.

Tabel 22. Deliniasi Kawasan Perdesaan Klaster Swasembada Pangan

Kecamatan	Peran dalam Klaster	Komoditas	Fungsi Utama dalam Rantai Nilai	Arah Pengembangan	Target Pasar
Batanghari Nuban (Trinomulyodan Purwosari)	Pusat Kawasan	Padi, Ubi Kayu dan Pepaya	- Sentra produksi utama ubi kayu dan padi - Pengumpulan hasil panen jagung dan padi - Pengolahan awal (hilirisasi) komoditas pangan - Pusat distribusi ke pasar antarwilayah	- Penguatan hilirisasi ubi kayu- Pengembangan pengolahan awal jagung dan padi- Penguatan fungsi logistik dan kelembagaan kawasan	- Rice Milling Unit Lampung Timur - Industri Tepung Tapioka di Lampung Timur dan Lampung Tengah - Pasar tradisional - UMKM (Katering/ Buah Potong/Jus)
Way Bungur (Tambah Subur dan Kali Pasir)	Hinterland Produksi Jagung	Ubi Kayu dan Jagung	- Sentra produksi ubi kayu dan jagung	- Peningkatan produktivitas jagung- Perbaikan pascapanen	Peternak Unggas dan Industri Pengolahan Jagung

Kecamatan	Peran dalam Klaster	Komoditas	Fungsi Utama dalam Rantai Nilai	Arah Pengembangan	Target Pasar
			- Penyedia bahan baku jagung bagi pusat kawasan - Produksi padi sebagai komoditas pendukung	(pengeringan, kualitas)- Integrasi pasokan jagung ke pusat kawasan	Pasar tradisional Industri Tepung Tapioka di Lampung Timur dan Lampung Tengah
Pekalongan (Wonosari)	Simpul Pemasaran & Perdagangan	Padi (Pendukung)	- Pusat distribusi ke pasar antar wilayah - Produksi padi sebagai komoditas pendukung	- Penguatan fungsi perdagangan dan logistik - Peningkatan akses pasar antar kabupaten	Rice Milling Unit di Lampung Timur dan Lampung Tengah

7.2.2.1 Pemetaan Rantai Pasok dan Hambatan Klaster Swasembada Pangan

Pemetaan rantai pasok klaster swasembada pangan dilakukan untuk memahami secara menyeluruh alur pergerakan padi dan komoditas hortikultura dari tahap produksi di tingkat petani hingga sampai ke konsumen akhir. Pendekatan rantai pasok ini digunakan untuk mengidentifikasi titik-titik kritis yang memengaruhi kelancaran pasokan, stabilitas harga, serta keberlanjutan produksi pangan di Kabupaten Lampung Timur. Dengan memahami struktur dan fungsi setiap sub-sistem dalam rantai pasok, perencanaan pengembangan klaster swasembada pangan dapat diarahkan secara lebih terukur dan responsif terhadap permasalahan riil di lapangan.

a. Subsistem Produksi dan Ketersediaan Bahan Baku

Pada subsistem produksi, padi sawah menjadi tulang punggung pasokan pangan daerah dengan volume produksi yang sangat besar dan relatif stabil dibanding komoditas lainnya. Namun, konsentrasi produksi di kecamatan tertentu menunjukkan bahwa pasokan beras daerah sangat bergantung pada kinerja wilayah sentra. Ketergantungan ini menjadi hambatan potensial ketika terjadi gangguan pada siklus tanam, ketersediaan air, penurunan kualitas lahan, serta alih fungsi lahan khususnya di kecamatan Pekalongan. Sementara itu, produksi hortikultura menunjukkan karakter yang lebih dinamis dan fluktuatif. Meskipun volumenya signifikan, produksi hortikultura sangat dipengaruhi oleh musim dan kondisi cuaca, sehingga kontinuitas pasokan pangan segar belum sepenuhnya terjamin sepanjang tahun.

b. Subsistem Prasarana dan Sarana Pendukung Produksi

Ketersediaan prasarana dan sarana pendukung menjadi faktor kunci dalam menjaga kelancaran rantai pasok pangan. Pada komoditas padi, jaringan irigasi memegang peranan sentral dalam menentukan stabilitas produksi padi sawah. Hambatan muncul ketika kondisi irigasi tidak optimal, baik akibat kerusakan fisik maupun keterbatasan pengelolaan, yang berdampak langsung pada produktivitas dan jadwal tanam. Untuk hortikultura, tantangan

prasarana lebih banyak berkaitan dengan ketersediaan sarana budidaya, perlindungan tanaman dari cuaca ekstrem, serta akses jalan usaha tani yang memengaruhi kecepatan distribusi hasil panen ke pasar.

c. Subsistem Pascapanen dan Penyimpanan

Tahap pascapanen merupakan salah satu titik kritis dalam rantai pasok swasembada pangan. Pada komoditas padi, kehilangan hasil pascapanen masih menjadi persoalan, terutama terkait proses pengeringan, penyimpanan gabah, dan kualitas beras yang dihasilkan. Keterbatasan fasilitas pascapanen menyebabkan sebagian petani menjual gabah segera setelah panen, sehingga posisi tawar menjadi lemah. Pada komoditas hortikultura, hambatan pascapanen cenderung lebih besar karena sifat produk yang mudah rusak. Minimnya fasilitas penyimpanan dingin, pengemasan, dan penanganan awal menyebabkan tingginya kehilangan hasil dan penurunan mutu sebelum produk sampai ke konsumen.

d. Subsistem Distribusi dan Pemasaran

Distribusi dan pemasaran menjadi tahap yang sangat menentukan stabilitas pasokan dan harga pangan. Rantai distribusi padi relatif lebih mapan, namun masih ditandai oleh ketergantungan petani pada pedagang perantara, terutama pada saat panen raya. Kondisi ini sering kali menekan harga di tingkat petani. Pada hortikultura, permasalahan distribusi lebih kompleks karena produk harus segera diserap pasar dalam waktu singkat. Ketergantungan pada pasar segar dan minimnya alternatif saluran distribusi membuat harga hortikultura sangat fluktuatif dan rentan terhadap kelebihan pasokan musiman. Hambatan pada tahap ini berkontribusi besar terhadap ketidakstabilan pendapatan petani dan harga pangan di tingkat konsumen.

e. Subsistem Kelembagaan dan Tata Kelola Rantai Pasok

Seluruh hambatan dalam rantai pasok padi dan hortikultura pada akhirnya bermuara pada aspek kelembagaan dan tata kelola. Keterbatasan peran kelembagaan ekonomi desa dalam mengelola produksi, pascapanen, dan pemasaran menyebabkan rantai pasok

berjalan secara terfragmentasi. Kelembagaan petani, lumbung pangan, dan BUMDes belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem pengelolaan pangan kawasan. Akibatnya, koordinasi antarpelaku masih lemah dan upaya stabilisasi pasokan serta harga pangan belum berjalan optimal. Penguatan kelembagaan menjadi kunci untuk menjembatani seluruh subsistem rantai pasok dan mengurangi bottleneck secara berkelanjutan.

7.2.2.2 Analisis Kesiapan Hilirisasi dan Skala Prioritas

Analisis kesiapan hilirisasi pada klaster swasembada pangan dilakukan untuk menilai kemampuan sistem pangan berbasis padi dan hortikultura di Kabupaten Lampung Timur dalam mengelola hasil produksi secara lebih efektif di tingkat hilir. Dalam konteks swasembada pangan, hilirisasi tidak dipahami sebagai upaya industrialisasi pertanian, melainkan sebagai penguatan fungsi-fungsi kunci setelah panen, seperti pengeringan, penyimpanan, pengelolaan cadangan, dan distribusi pangan. Fokus utama dari analisis ini adalah sejauh mana sistem pangan kawasan mampu menjaga kesinambungan pasokan, mempertahankan kualitas produk, dan meredam fluktuasi pasokan serta harga yang berdampak langsung pada ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada komoditas padi, kesiapan hilirisasi relatif lebih tinggi karena ditopang oleh skala produksi yang besar dan perannya sebagai pangan pokok utama. Produksi padi sawah yang dominan memberikan dasar yang kuat bagi penguatan fungsi hilir, khususnya pada aspek pascapanen dan penyimpanan gabah maupun beras. Namun demikian, kesiapan ini belum sepenuhnya diikuti oleh kapasitas pengelolaan hasil panen yang memadai di tingkat petani dan kawasan. Kehilangan hasil pascapanen, keterbatasan fasilitas pengeringan dan penyimpanan, serta praktik penjualan gabah segera setelah panen menunjukkan bahwa fungsi hilir padi belum berfungsi optimal sebagai instrumen stabilisasi pasokan dan harga. Penguatan hilirisasi padi lebih relevan diarahkan pada perbaikan sistem pengelolaan hasil panen dan cadangan pangan kawasan, bukan pada diversifikasi produk olahan.

Berbeda dengan padi, hortikultura memiliki karakter produksi yang lebih dinamis dan fluktuatif, sehingga kesiapan hilirisasi berada pada tingkat menengah dan bersifat selektif. Data panen hortikultura menunjukkan volume produksi yang signifikan, namun sangat sensitif terhadap faktor musim, cuaca, dan perubahan harga pasar. Sifat produk hortikultura yang mudah rusak menjadikan tahap pascapanen sebagai titik paling krusial dalam rantai pasok pangan segar. Keterbatasan fasilitas penyimpanan, pengemasan, dan distribusi cepat menyebabkan tingginya kehilangan hasil serta penurunan mutu produk sebelum sampai ke konsumen. Hilirisasi hortikultura tidak diarahkan pada pengolahan lanjutan, tetapi pada penguatan penanganan pascapanen, pengaturan pola tanam, dan perbaikan sistem distribusi agar pasokan pangan segar lebih stabil dan merata.

Jika dilihat secara keseluruhan pada tingkat kawasan, kesiapan hilirisasi klaster swasembada pangan di Kabupaten Lampung Timur masih bersifat parsial dan belum terintegrasi sepenuhnya. Fungsi-fungsi hilir untuk padi dan hortikultura masih berjalan secara terpisah dan belum dikelola dalam satu kerangka sistem pangan kawasan. Ketidadaan pengelolaan terpadu antara produksi, pascapanen, penyimpanan, dan distribusi menyebabkan potensi produksi yang besar belum sepenuhnya berkontribusi pada penguatan ketahanan pangan daerah secara sistemik. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama hilirisasi bukan terletak pada ketersediaan produksi, melainkan pada lemahnya integrasi tata kelola pangan di tingkat kawasan perdesaan.

Tabel 23. Hilirisasi Berdasarkan Komoditas Unggulan

No	Komoditas	Karakter Produksi	Kondisi Hilir	Tingkat Kesiapan Hilirisasi	Dampak terhadap Ketahanan Pangan	Skala Prioritas	Arah Penguatan Hilirisasi
1	Padi Sawah	Produksi sangat besar dan relatif stabil ($\pm$ 555 ribu ton tahun 2023; $\pm$ 521 ribu ton tahun 2024)	Pascapanen dan penyimpanan belum optimal; penjualan gabah segera setelah panen masih dominan	Tinggi	Sangat tinggi (pangan pokok utama)	Prioritas Utama	Penguatan pascapanen (pengeringan), penyimpanan gabah/beras, pengelolaan cadangan pangan kawasan
2	Ubi Kayu	Produksi sangat besar dan stabil (1.320.187 ton tahun 2024 dan 843.567 ton pada tahun 2023)	Sudah terdapat industri pengolah ubi kayu namun fluktuasi harga di tingkat petani sangat tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Prioritas Utama	Penguatan kemitraan petani-industri berbasis mutu dan kepastian serap
3	Jagung	Produksi sangat besar dan stabil	Sudah terdapat	Tinggi	Sangat Tinggi	Prioritas Utama	Penguatan industri

No	Komoditas	Karakter Produksi	Kondisi Hilir	Tingkat Kesiapan Hilirisasi	Dampak terhadap Ketahanan Pangan	Skala Prioritas	Arah Penguatan Hilirisasi
		(789.606 ton tahun 2024 dan 728.397 ton pada tahun 2023)	pengolahan jagung namun masih dalam skala kecil				pengolahan jagung
4	Pepaya	Produksi sangat besar dan stabil (53.196 ton tahun 2024 dan 66.874 ton pada tahun 2023)	Sudah terdapat pengolahan pepaya namun masih bergantung dengan pasar segar	Menengah	Tinggi (pangan segar & stabilitas harga)	Prioritas Menengah	Penguatan penanganan pascapanen, pengaturan pola tanam, distribusi cepat ke pasar

7.2.2.3 Pemetaan Aktor dan Pembagian Peran Klaster Swasembada Pangan

Pemetaan aktor dan pembagian peran dalam klaster swasembada pangan merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa pengembangan sistem pangan berbasis padi dan hortikultura di Kabupaten Lampung Timur berjalan secara terkoordinasi dan berkelanjutan. Mengingat klaster swasembada pangan mencakup rangkaian aktivitas yang panjang, mulai dari produksi, pascapanen, penyimpanan, hingga distribusi pangan, kejelasan peran setiap aktor menjadi prasyarat utama agar intervensi pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif, tidak tumpang tindih, dan selaras dengan kebutuhan kawasan perdesaan.

Berikut merupakan pembagian peran aktor secara ringkas dan operasional. Aspek ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program, koordinasi lintas pemangku kepentingan, serta pengendalian pelaksanaan pengembangan klaster swasembada pangan di Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 24. Pembagian Peran Aktor Secara Ringkas Dan Operasional

No	Sub-sistem Rantai Pasok	Aktor Internal Kawasan	Peran Utama Aktor Internal	Aktor Eksternal Kawasan	Peran Aktor Eksternal
1	Produksi & Budidaya	Petani padi dan hortikultura	Produksi pangan pokok dan pangan segar; menjaga kesinambungan tanam dan panen	OPD teknis pertanian, penyuluh	Pendampingan teknis budidaya, peningkatan produktivitas, adaptasi iklim
2	Pengelolaan Produksi Kolektif	Kelompok Tani, Gapoktan	Konsolidasi produksi, pengaturan pola tanam, pengurangan risiko fluktuasi pasokan	OPD pertanian, pendamping	Fasilitasi kelembagaan, penguatan koordinasi produksi

No	Sub-sistem Rantai Pasok	Aktor Internal Kawasan	Peran Utama Aktor Internal	Aktor Eksternal Kawasan	Peran Aktor Eksternal
3	Pascapanen Padi	Kelompok Tani, BUMDes	Pengeringan, penyimpanan gabah, menjaga kualitas hasil panen	OPD pangan, OPD pertanian	Penyediaan sarana pascapanen, standardisasi mutu
4	Pascapanen Hortikultura	Kelompok Tani, UMKM Desa	Penanganan awal hasil panen, sortasi sederhana, pengemasan	OPD terkait, pendamping	Dukungan sarana pascapanen, pelatihan pengurangan kehilangan hasil
5	Penyimpanan & Cadangan Pangan	Lumbung Pangan Desa, BUMDes	Pengelolaan cadangan beras dan pangan lokal	OPD pangan, pemerintah daerah	Sinkronisasi kebijakan cadangan pangan dan distribusi
6	Distribusi & Tata Niaga	BUMDes, Kelompok Tani	Penyaluran pangan ke pasar lokal dan kawasan	OPD perdagangan, mitra pasar	Fasilitasi akses pasar, stabilisasi distribusi

No	Sub-sistem Rantai Pasok	Aktor Internal Kawasan	Peran Utama Aktor Internal	Aktor Eksternal Kawasan	Peran Aktor Eksternal
7	Kelembagaan & Tata Kelola Klaster	BUMDes Bersama/BKAD	Koordinasi antar desa, pengelolaan klaster pangan kawasan	Bappeda, Dinas PMD	Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
8	Pembiayaan & Dukungan Usaha	BUMDes, Kelompok Tani	Pengelolaan modal usaha skala desa	Lembaga keuangan, pemerintah daerah	Akses pembiayaan, dukungan investasi
9	Peningkatan Kapasitas & Pendampingan	Kelompok Tani, Pengelola BUMDes	Peningkatan kapasitas teknis dan manajerial	Penyuluh, lembaga pendamping	Pelatihan, pendampingan berkelanjutan

7.2.3 Klaster Perikanan atau Minapolitan

Sektor perikanan merupakan salah satu pilar penting perekonomian perdesaan di Kabupaten Lampung Timur, baik dari sisi volume produksi maupun nilai ekonomi yang dihasilkan. Berdasarkan data produksi perikanan menurut tempat penangkapan, total produksi perikanan Kabupaten Lampung Timur menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dalam periode 2019–2023. Pada 2022, total produksi perikanan tercatat mencapai sekitar 220.611 ton, meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada kisaran 53.583 ton. Lonjakan ini mencerminkan besarnya potensi sumber daya perairan yang dimiliki, sekaligus menunjukkan karakter produksi perikanan yang sangat dipengaruhi oleh faktor alam, musim, dan intensitas pemanfaatan sumber daya.

Perikanan tangkap masih menjadi kontributor utama dalam struktur produksi tersebut. Data menunjukkan bahwa pada 2022, produksi perikanan tangkap mencapai sekitar 211.980 ton, dengan kontribusi terbesar berasal dari perikanan laut yang menghasilkan lebih dari 85.400 ton. Selain itu, perairan umum daratan juga memberikan kontribusi yang tidak kecil, terutama dari rawa (sekitar 77.784 ton) dan sungai (sekitar 36.792 ton), sementara waduk menyumbang sekitar 12.000 ton. Komposisi ini menegaskan bahwa aktivitas perikanan di Lampung Timur tersebar pada berbagai ekosistem perairan, yang memerlukan pendekatan pengelolaan berbasis kawasan agar keberlanjutan sumber daya tetap terjaga.

Dari sisi nilai ekonomi, sektor perikanan juga menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah. Data nilai produksi perikanan mencatat bahwa total nilai produksi perikanan Kabupaten Lampung Timur mencapai sekitar Rp423,46 miliar pada 2023, meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai sekitar Rp498,77 miliar. Nilai produksi tersebut didominasi oleh perikanan budidaya, khususnya usaha tambak, yang secara konsisten mencatat nilai ratusan miliar rupiah setiap tahunnya. Pada 2023, nilai produksi perikanan budidaya dari tambak tercatat sekitar Rp399,63 miliar, sementara kolam air tawar menyumbang sekitar Rp22,69 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa

perikanan budidaya menjadi tulang punggung stabilitas ekonomi sektor perikanan di tengah fluktuasi perikanan tangkap.

Pengembangan klaster perikanan melalui pendekatan minapolitan menjadi relevan dan strategis bagi Kabupaten Lampung Timur. Perikanan tangkap menyediakan basis volume produksi yang besar, sementara perikanan budidaya menawarkan kestabilan pasokan dan nilai ekonomi yang lebih terprediksi. Pendekatan minapolitan diarahkan untuk mengintegrasikan kedua subsektor ini dalam satu sistem kawasan yang mencakup penguatan produksi, penanganan pascapanen, distribusi, serta kelembagaan ekonomi perdesaan. Klaster perikanan atau minapolitan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen peningkatan produksi, tetapi juga sebagai strategi penguatan ketahanan ekonomi masyarakat perikanan dan optimalisasi nilai tambah sumber daya perairan secara berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031, Kecamatan Pasir Sakti ditetapkan sebagai kawasan minapolitan, yang diarahkan sebagai pusat pengembangan perikanan budidaya pesisir dengan komoditas unggulan udang vanname, udang windu, dan ikan bandeng. Penetapan ini menegaskan peran Pasir Sakti sebagai simpul produksi dan pengolahan awal perikanan dalam struktur ruang kabupaten. Dalam sistem rantai nilai regional, kawasan minapolitan Pasir Sakti berfungsi sebagai pemasok utama produk perikanan segar dan olahan awal, yang tidak hanya melayani kebutuhan pasar lokal dan regional di Lampung Timur, tetapi juga diarahkan untuk menjangkau pasar yang lebih luas di Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam konteks hilirisasi, Lampung Selatan diposisikan sebagai pasar utama dan simpul distribusi bagi produk perikanan dari kawasan minapolitan Pasir Sakti. Keunggulan Lampung Selatan sebagai gerbang logistik Sumatra-Jawa, wilayah dengan aktivitas perdagangan dan konsumsi yang tinggi, serta kedekatannya dengan fasilitas pelabuhan, menjadikannya tujuan strategis pemasaran bandeng dan udang dari Lampung Timur. Arah pengembangan kawasan minapolitan Pasir Sakti difokuskan pada

penguatan rantai dingin, peningkatan kualitas dan standar produk, serta pengembangan produk perikanan bernilai tambah, sehingga aliran produk menuju Lampung Selatan dapat berlangsung secara efisien dan berdaya saing, sekaligus memperkuat keterkaitan ekonomi antarwilayah pesisir di Provinsi Lampung.

Tabel 25. Deliniasi Kawasan Perdesaan Klaster Minapolitan

Kecamatan	Peran dalam Klaster	Komoditas	Fungsi Utama dalam Rantai Nilai	Arah Pengembangan	Target Pasar
Pasir Sakti (Sumur Kucing dan Labuhan Ratu)	Pusat Kawasan	Udang Vanname, Ikan Bandeng (Pendukung) dan Udang Windu (Pendukung)	- Sentra produksi budidaya tambak (hulu) - Pengumpulan dan konsolidasi hasil panen perikanan - Penanganan pascapanen (grading, icing, sortasi) - Pengolahan awal dan hilirisasi skala UMKM-menengah - Distribusi ke pasar regional	- Penguatan rantai dingin (pabrik es, cold storage skala kawasan) - Pengolahan produk bernilai tambah: bandeng cabut duri/presto, udang beku, produk <i>ready to cook</i> - Pengembangan UMKM olahan perikanan	- Penguatan rantai dingin (pabrik es, cold storage skala kawasan) - Pengolahan produk bernilai tambah: bandeng cabut duri/presto, udang beku, produk <i>ready to cook</i> - Pengembangan UMKM olahan perikanan

Kecamatan	Peran dalam Klaster	Komoditas	Fungsi Utama dalam Rantai Nilai	Arah Pengembangan	Target Pasar
				- Penguatan kelembagaan (koperasi/korporasi petambak) - Standarisasi mutu dan keamanan pangan	- Penguatan kelembagaan (koperasi/korporasi petambak) - Standarisasi mutu dan keamanan pangan

7.2.3.1 Pemetaan Rantai Pasok dan Hambatan Klaster Perikanan atau Minapolitan

Pemetaan rantai pasok klaster perikanan atau minapolitan di Kabupaten Lampung Timur dilakukan untuk memahami alur pergerakan hasil perikanan dari hulu hingga hilir, sekaligus mengidentifikasi titik-titik kritis (*bottleneck*) yang memengaruhi kinerja ekonomi dan keberlanjutan usaha perikanan. Berdasarkan data produksi dan nilai perikanan, struktur rantai pasok di Lampung Timur bersifat majemuk, mencakup perikanan tangkap dan perikanan budidaya dengan karakteristik, risiko, dan kebutuhan dukungan yang berbeda.

a. Subsistem Produksi Perikanan Tangkap

Subsistem produksi perikanan tangkap merupakan hulu utama rantai pasok perikanan di Lampung Timur, dengan kontribusi produksi yang sangat besar terutama pada tahun-tahun tertentu. Data produksi menunjukkan bahwa perikanan laut menjadi sumber utama produksi tangkap, disusul oleh perairan umum daratan seperti sungai, rawa, dan waduk. Pada 2022, total produksi perikanan tangkap tercatat sangat tinggi, mencerminkan intensitas pemanfaatan sumber daya perairan yang signifikan. Kondisi ini menegaskan peran strategis perikanan tangkap sebagai pemasok utama bahan baku perikanan bagi pasar lokal maupun regional. Hambatan utama pada subsistem ini terletak pada tingginya ketergantungan terhadap faktor alam dan musim, yang menyebabkan fluktuasi produksi antartahun. Variasi produksi yang tajam berdampak langsung pada ketidakstabilan pasokan dan harga di tingkat nelayan. Selain itu, keterbatasan sarana penangkapan, teknologi pascatangkap di atas kapal, serta akses terhadap fasilitas penanganan hasil yang memadai turut memperbesar risiko kehilangan mutu dan nilai ekonomi hasil tangkapan.

b. Subsistem Produksi Perikanan Budidaya

Berbeda dengan perikanan tangkap, subsistem perikanan budidaya menunjukkan struktur produksi yang lebih beragam dan relatif terkendali. Data produksi dan nilai menunjukkan bahwa budidaya

tambak merupakan kontributor utama, diikuti oleh kolam air tawar, serta sistem budidaya lain, seperti keramba jaring apung, keramba bambu, dan minapadi. Kontribusi perikanan budidaya terhadap nilai produksi daerah cenderung stabil, menjadikannya penopang penting ekonomi perikanan Lampung Timur. Hambatan pada subsistem budidaya terutama berkaitan dengan keterbatasan sarana produksi dan efisiensi usaha, seperti kualitas pakan, manajemen air, dan teknologi budidaya yang masih berskala kecil. Selain itu, keterbatasan akses pembiayaan dan pendampingan teknis menyebabkan produktivitas antar unit usaha budidaya belum merata. Kondisi ini berdampak pada variasi kualitas dan kuantitas hasil, yang pada gilirannya memengaruhi kelancaran rantai pasok ke tahap berikutnya.

c. Subsistem Pascapanen dan Penanganan Hasil

Subsistem pascapanen merupakan titik kritis dalam rantai pasok klaster perikanan atau minapolitan. Baik pada perikanan tangkap maupun budidaya, hasil perikanan memiliki sifat mudah rusak dan sangat sensitif terhadap waktu serta kondisi penanganan. Data nilai produksi yang tinggi, terutama pada perikanan budidaya, menunjukkan bahwa potensi ekonomi besar dapat hilang apabila penanganan pascapanen tidak dilakukan secara memadai. Bottleneck utama pada tahap ini adalah keterbatasan fasilitas penanganan hasil, seperti penyimpanan dingin, pengemasan, dan pengawetan sederhana. Ketiadaan atau keterbatasan rantai dingin menyebabkan sebagian hasil perikanan harus segera dijual dalam kondisi segar dengan harga yang relatif rendah. Kondisi ini memperlemah posisi tawar pelaku perikanan dan membatasi peluang peningkatan nilai tambah di tingkat kawasan.

d. Subsistem Distribusi dan Pemasaran

Pada tahap distribusi dan pemasaran, rantai pasok perikanan di Lampung Timur masih didominasi oleh pola pemasaran konvensional. Hasil perikanan umumnya disalurkan melalui pedagang pengumpul atau perantara, baik untuk pasar lokal maupun ke luar kawasan. Struktur ini memungkinkan hasil perikanan terserap dengan cepat, tetapi sekaligus menciptakan ketergantungan yang tinggi terhadap aktor perantara. Hambatan

utama pada subsistem ini terletak pada lemahnya posisi tawar pelaku perikanan, terutama nelayan dan pembudidaya skala kecil. Keterbatasan akses informasi pasar, fasilitas penyimpanan, dan alternatif saluran distribusi membuat pelaku usaha sulit menunda penjualan saat harga tidak menguntungkan. Akibatnya, fluktuasi harga di tingkat produsen tidak dapat diantisipasi secara optimal.

e. Subsistem Kelembagaan dan Tata Kelola Rantai Pasok

Subsistem kelembagaan menjadi faktor penentu dalam efektivitas keseluruhan rantai pasok klaster perikanan atau minapolitan. Saat ini, peran kelompok nelayan, kelompok pembudidaya, koperasi, dan BUMDes dalam pengelolaan rantai pasok masih belum terintegrasi secara optimal. Kelembagaan cenderung berfungsi pada tingkat produksi, sementara peran dalam pascapanen, distribusi, dan pengelolaan nilai tambah masih terbatas. Hambatan pada subsistem ini terletak pada belum kuatnya integrasi kelembagaan lintas subsistem, sehingga rantai pasok perikanan berjalan secara terfragmentasi. Kondisi ini menyulitkan upaya konsolidasi produksi, pengelolaan pascapanen bersama, serta pengembangan klaster minapolitan sebagai satu kesatuan sistem kawasan.

7.2.3.2 Analisis Kesiapan Hilirisasi dan Skala Prioritas

Analisis kesiapan hilirisasi dan penetapan skala prioritas dalam klaster perikanan atau minapolitan dilakukan untuk memastikan bahwa pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Lampung Timur berjalan secara realistis, bertahap, dan selaras dengan karakter produksi yang ada. Berangkat dari data produksi dan nilai perikanan, terlihat bahwa subsektor perikanan memiliki struktur yang beragam, baik dari sisi skala usaha, stabilitas produksi, maupun kontribusi ekonomi. Pendekatan hilirisasi tidak dapat diterapkan secara seragam, melainkan perlu disesuaikan dengan kapasitas dan risiko masing-masing subsektor.

Dalam konteks minapolitan, hilirisasi dipahami sebagai penguatan fungsi hilir yang paling relevan bagi sistem perikanan kawasan, seperti penanganan pascatangkap, penyimpanan, pengolahan sederhana, dan distribusi hasil perikanan. Pendekatan ini menempatkan hilirisasi sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok dan nilai tambah, tanpa mendorong

industrialisasi yang melampaui kapasitas produksi dan kelembagaan lokal. Dengan pemahaman tersebut, penilaian kesiapan hilirisasi difokuskan pada aspek stabilitas pasokan, karakter produk, dan potensi penguatan tata kelola di tingkat kawasan.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, skala prioritas pengembangan klaster perikanan atau minapolitan ditetapkan untuk mengarahkan intervensi pembangunan secara lebih terfokus dan berdampak. Penetapan prioritas mempertimbangkan kontribusi subsektor terhadap ekonomi kawasan, tingkat kesiapan sistem hilir, serta risiko implementasi di lapangan. Tabel berikut menyajikan ringkasan analisis kesiapan hilirisasi dan skala prioritas pengembangan klaster perikanan atau minapolitan, yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program, penentuan alokasi sumber daya, dan koordinasi antarpemangku kepentingan di Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 26. Kesiapan Hilirisasi Klaster Minapolitan

No	Komoditas	Karakter Produksi	Kondisi Hilir	Tingkat Kesiapan Hilirisasi	Dampak terhadap Ekonomi Kawasan	Skala Prioritas	Arah Penguatan Hilirisasi
1	Udang Vanname	Produksi sangat besar pada 2024 sebesar 2.773 ton dan 2.153 ton pada 2023	Penanganan pascatangkap terbatas;	Tinggi	Tinggi (penyedia bahan baku dan pendapatan nelayan)	Prioritas Utama	Penguatan penanganan pascatangkap, distribusi cepat, dan fasilitas cold storage
2	Ikan Bandeng	Produksi terbesar di Provinsi Lampung yaitu sebesar 1.134 ton pada 2024 dan 1.508 ton pada 2023	Penanganan hasil masih sederhana dan harga yang diperoleh relatif rendah	Tinggi	Tinggi	Prioritas Menengah	Penguatan penanganan hasil dan pengelolaan distribusi lokal

No	Komoditas	Karakter Produksi	Kondisi Hilir	Tingkat Kesiapan Hilirisasi	Dampak terhadap Ekonomi Kawasan	Skala Prioritas	Arah Penguatan Hilirisasi
3	Udang Windu	Produksi sangat besar pada tahun 2024 sebesar 552 ton dan 646 ton pada tahun 2023	Penanganan pascatangkap terbatas;	Tinggi	Tinggi (penyedia bahan baku dan pendapatan nelayan)	Prioritas Utama	Penguatan penanganan pascatangkap, distribusi cepat, dan fasilitas cold storage

7.2.3.3 Pemetaan Aktor dan Pembagian Peran Klaster Perikanan atau Minapolitan

Mengingat karakter perikanan yang sangat bergantung pada faktor alam, mutu penanganan hasil, dan kecepatan distribusi, kejelasan peran setiap aktor menjadi kunci agar rantai pasok perikanan tidak terfragmentasi dan potensi nilai ekonomi yang besar dapat dikelola secara optimal di tingkat kawasan perdesaan. Dalam kerangka minapolitan, aktor pengembangan klaster dibedakan menjadi aktor internal kawasan dan aktor eksternal kawasan. Aktor internal kawasan merupakan pelaku utama yang secara langsung terlibat dalam kegiatan produksi dan pengelolaan hasil perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Sementara itu, aktor eksternal kawasan berperan sebagai fasilitator, pendukung kebijakan, penyedia sarana prasarana, serta penguat kapasitas sistem perikanan agar klaster minapolitan dapat berkembang secara terarah dan terintegrasi.

Aktor internal kawasan mencakup nelayan tangkap dan pembudidaya ikan sebagai produsen utama hasil perikanan. Kelompok nelayan dan kelompok pembudidaya memiliki peran penting dalam konsolidasi produksi, penerapan praktik usaha yang lebih baik, serta pengelolaan waktu panen agar pasokan lebih terkendali. Dalam konteks minapolitan, penguatan peran kelompok menjadi krusial untuk menjembatani pelaku perikanan skala kecil dengan sistem hilir, khususnya pada tahap penanganan pascapanen dan distribusi. Selain itu, kelembagaan ekonomi desa, seperti koperasi perikanan dan BUMDes, memiliki peran strategis sebagai pengelola fungsi hilir klaster minapolitan. Kelembagaan ini dapat berperan dalam pengelolaan penanganan hasil, penyimpanan sementara, distribusi ke pasar, serta pengembangan unit usaha pengolahan sederhana. Penguatan kelembagaan ekonomi desa menjadi kunci untuk meningkatkan posisi tawar pelaku perikanan dan memastikan bahwa nilai tambah hasil perikanan tidak seluruhnya terserap oleh pihak perantara.

Aktor eksternal kawasan meliputi organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi perikanan, kelautan, pemberdayaan masyarakat desa, dan perdagangan. OPD teknis berperan dalam pendampingan usaha, penguatan kapasitas pelaku

perikanan, serta penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung klaster. Bappeda memiliki peran penting dalam memastikan keterpaduan pengembangan klaster minapolitan dengan dokumen perencanaan daerah dan penganggaran. Selain itu, mitra pasar dan lembaga keuangan berperan dalam membuka akses pasar dan pembiayaan yang lebih berkelanjutan bagi pelaku perikanan.

Tabel 27. Sub-sistem Rantai Pasok Klaster Perikanan

No	Sub-sistem Rantai Pasok	Aktor Internal Kawasan	Peran Utama Aktor Internal	Aktor Eksternal Kawasan	Peran Aktor Eksternal
1	Produksi Perikanan Tangkap	Nelayan dan kelompok nelayan	Melaksanakan kegiatan penangkapan ikan di laut dan perairan umum, menjaga kesinambungan pasokan hasil tangkapan, serta menerapkan praktik penangkapan yang sesuai dengan kondisi sumber daya perairan	OPD perikanan, penyuluh perikanan	Pendampingan teknis penangkapan, penguatan kapasitas nelayan, serta pengelolaan dan pengawasan keberlanjutan sumber daya perikanan
2	Produksi Perikanan Budidaya	Pembudidaya ikan dan kelompok pembudidaya	Mengelola usaha budidaya tambak, kolam, dan sistem budidaya lainnya, menjaga	OPD perikanan, pendamping teknis	Peningkatan kapasitas budidaya, transfer teknologi,

No	Sub-sistem Rantai Pasok	Aktor Internal Kawasan	Peran Utama Aktor Internal	Aktor Eksternal Kawasan	Peran Aktor Eksternal
			kualitas dan kuantitas produksi, serta mengatur siklus panen agar pasokan lebih terkendali		pendampingan manajemen usaha, serta pengendalian penyakit dan kualitas lingkungan budidaya
3	Pascapanen dan Penanganan Hasil	Kelompok nelayan/pembudidaya, BUMDes	Melakukan penanganan awal hasil perikanan, seperti sortasi, pendinginan sementara, dan penyimpanan awal untuk menjaga mutu dan mengurangi kehilangan hasil	OPD perikanan, OPD terkait	Penyediaan dan peningkatan sarana pascapanen, pengembangan fasilitas rantai dingin, serta pendampingan standar mutu penanganan hasil

No	Sub-sistem Rantai Pasok	Aktor Internal Kawasan	Peran Utama Aktor Internal	Aktor Eksternal Kawasan	Peran Aktor Eksternal
4	Pengolahan dan Nilai Tambah	BUMDes dan koperasi perikanan	Mengembangkan pengolahan hasil perikanan skala sederhana, meningkatkan nilai tambah produk, serta mengelola unit usaha pengolahan berbasis kawasan	OPD UMKM, OPD perindustrian	Pelatihan pengolahan, fasilitasi peralatan, peningkatan kualitas produk, serta dukungan standardisasi dan perizinan usaha

No	Sub-sistem Rantai Pasok	Aktor Internal Kawasan	Peran Utama Aktor Internal	Aktor Eksternal Kawasan	Peran Aktor Eksternal
5	Distribusi dan Pemasaran	BUMDes, koperasi perikanan	Mengelola distribusi hasil perikanan ke pasar lokal dan regional, memperpendek rantai pemasaran, serta meningkatkan posisi tawar pelaku perikanan	OPD perdagangan, mitra pasar	Fasilitasi akses pasar, pengembangan jejaring distribusi, promosi produk perikanan, dan dukungan stabilisasi pemasaran

No	Sub-sistem Rantai Pasok	Aktor Internal Kawasan	Peran Utama Aktor Internal	Aktor Eksternal Kawasan	Peran Aktor Eksternal
6	Kelembagaan dan Tata Kelola Klaster	BUMDes Bersama/ koperasi kawasan	Mengkoordinasikan pengelolaan klaster minapolitan lintas desa, menyinergikan kegiatan produksi hingga pemasaran, serta memastikan tata kelola klaster berjalan efektif	Bappeda, Dinas PMD	Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran daerah, penguatan regulasi, serta integrasi klaster minapolitan dalam dokumen perencanaan pembangunan

No	Sub-sistem Rantai Pasok	Aktor Internal Kawasan	Peran Utama Aktor Internal	Aktor Eksternal Kawasan	Peran Aktor Eksternal
7	Pembiayaan dan Dukungan Usaha	BUMDes dan koperasi	Mengelola pembiayaan usaha perikanan skala desa dan kawasan, mendukung kebutuhan modal kerja pelaku perikanan	Lembaga keuangan, pemerintah daerah	Fasilitasi akses pembiayaan, dukungan kredit dan investasi, serta pengembangan skema pembiayaan yang sesuai karakter usaha perikanan
8	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan	Kelompok nelayan dan pembudidaya	Mengikuti dan menerapkan peningkatan kapasitas teknis serta manajerial, memperkuat kelembagaan usaha perikanan	Penyuluh, lembaga pendamping	Pelatihan berkelanjutan, pendampingan teknis dan kelembagaan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia perikanan

7.3 Analisis Skala Prioritas

Analisis *Logical Framework Analysis* (LFA) bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan kekuatan ekonomi lokal berbasis desa dan kecamatan secara terintegrasi. Pendekatan LFA menempatkan komoditas unggulan sebagai fondasi utama pengembangan wilayah dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif, daya saing, dan dinamika pertumbuhan ekonomi lokal. Kerangka ini menggunakan hasil perhitungan *Location Quotient* (LQ), *Shift Share Analysis* (SSA), dan Tipologi Klassen sebagai basis analitis utama dalam mengidentifikasi sektor basis, sektor potensial, dan sektor tertekan. Analisis tersebut diperkaya dengan pendekatan spasial perdesaan untuk menangkap keterkaitan fungsional antar desa, kecamatan, dan wilayah perbatasan. Kerangka LFA dalam RPKP diarahkan untuk menghasilkan kebijakan pembangunan kawasan perdesaan yang berorientasi pada penguatan klaster ekonomi lokal dan pengurangan ketimpangan wilayah.

Wilayah perbatasan Kabupaten Lampung Timur memiliki struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian dalam arti luas yang mencakup tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan perikanan. Struktur ini mencerminkan karakter perdesaan yang kuat dengan ketergantungan tinggi terhadap sumber daya alam dan tenaga kerja lokal. Data produksi pertanian dan perikanan menunjukkan bahwa wilayah perbatasan berperan sebagai penyangga ketahanan pangan dan sumber bahan baku agroindustri regional. Peran tersebut diperkuat oleh posisi geografis Lampung Timur yang berbatasan langsung dengan kabupaten lain dan wilayah pesisir yang terhubung dengan jalur distribusi antarprovinsi. Kondisi ini sejalan dengan temuan BPS yang menunjukkan kontribusi sektor pertanian Lampung Timur sebagai salah satu yang terbesar di Provinsi Lampung.

Hasil analisis *Location Quotient* menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Timur memiliki pola keunggulan komoditas yang tersebar tidak merata antarkecamatan. Komoditas padi, ubi kayu, dan jagung muncul sebagai komoditas basis utama pada subsektor tanaman pangan di sebagian besar kecamatan

perbatasan. Nilai LQ yang lebih besar dari satu pada komoditas tersebut mencerminkan tingkat spesialisasi produksi yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata kabupaten. Kondisi ini mengindikasikan bahwa wilayah perbatasan berperan sebagai lumbung produksi pangan dan pemasok utama kebutuhan regional. Pola serupa juga ditemukan dalam studi regional mengenai keunggulan komparatif wilayah perdesaan berbasis pangan di Asia Tenggara (Todaro & Smith, 2020).

Analisis *Shift Share* menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan Lampung Timur didorong oleh kombinasi pengaruh struktur subsektor dan keunggulan kompetitif lokal. Komoditas ubi kayu dan jagung menunjukkan kontribusi pertumbuhan positif yang signifikan di kecamatan, seperti Sekampung Udik, Jabung, Batanghari Nuban, dan Way Bungur. Nilai *differential shift* yang positif mencerminkan kemampuan wilayah dalam merespons dinamika pasar dan meningkatkan produktivitas. Komoditas perkebunan, seperti kakao, karet, dan kopi menunjukkan ketahanan pertumbuhan di tengah fluktuasi harga global. Temuan ini sejalan dengan literatur yang menyatakan bahwa daya saing komoditas perdesaan sangat dipengaruhi oleh kapasitas adaptasi lokal terhadap perubahan pasar (Porter, 2008).

Tipologi Klassen mengelompokkan kecamatan perbatasan ke dalam beberapa kategori kinerja ekonomi yang berbeda. Kecamatan Pasir Sakti dan Batanghari Nuban berada pada kategori maju dan tumbuh pesat yang ditandai oleh kontribusi dan pertumbuhan di atas rata-rata kabupaten. Kecamatan Sekampung Udik dan Waway Karya berada pada kategori maju namun tertekan yang mencerminkan tingginya kontribusi ekonomi dengan laju pertumbuhan yang melambat. Kecamatan Metro Kibang, Batanghari, Pekalongan, dan Way Bungur berada pada kategori potensial dengan peluang pertumbuhan yang masih terbuka. Klasifikasi ini menjadi dasar dalam penentuan prioritas pengembangan kawasan perdesaan berbasis LFA.

Peta konseptual LFA dengan menempatkan kecamatan perbatasan sebagai simpul utama pengembangan ekonomi wilayah. Kecamatan Pasir Sakti dan Labuhan Maringgai diposisikan sebagai LFA pesisir berbasis perikanan dan hortikultura. Kecamatan

Sekampung Udik, Batanghari Nuban, dan Way Bungur diposisikan sebagai LFA agribisnis pangan dan perkebunan rakyat. Kecamatan Batanghari dan Metro Kibang berperan sebagai LFA penyangga produksi dan distribusi. Struktur ini membentuk jaringan kawasan perdesaan yang saling terhubung dan memperkuat integrasi ekonomi antarwilayah.

Strategi pengembangan kawasan perdesaan diarahkan pada penguatan klaster komoditas unggulan di tingkat desa. Desa-desa di Kecamatan Pasir Sakti diarahkan pada pengembangan perikanan budidaya terpadu berbasis udang dan bandeng. Desa-desa di Kecamatan Sekampung Udik dan Way Bungur diarahkan pada penguatan agroindustri ubi kayu dan jagung skala perdesaan. Desa-desa di Kecamatan Batanghari Nuban diarahkan pada integrasi pertanian pangan dan perkebunan kopi. Strategi ini sejalan dengan pendekatan pembangunan berbasis wilayah fungsional yang direkomendasikan dalam studi pembangunan perdesaan global (OECD, 2019).

LFA Kabupaten Lampung Timur menunjukkan bahwa struktur ekonomi perdesaan dibangun oleh keterkaitan erat antara komoditas basis, dinamika pertumbuhan, dan posisi wilayah perbatasan dalam sistem ekonomi regional. Wilayah perbatasan berfungsi sebagai ruang produksi utama sekaligus koridor distribusi antarkabupaten dan antarprovinsi yang memperkuat peran strategis desa dalam pembangunan wilayah. Hasil integrasi LQ, *Shift Share Analysis*, dan Tipologi Klassen menegaskan bahwa desa-desa pada kecamatan perbatasan memiliki diferensiasi peran ekonomi yang jelas berdasarkan komoditas unggulan dan tingkat kinerja wilayah. Kondisi ini mencerminkan bahwa pembangunan kawasan perdesaan tidak dapat diseragamkan, melainkan harus berbasis karakteristik lokal dan keterkaitan fungsional antarwilayah. Pendekatan LFA memberikan dasar konseptual yang kuat untuk mengarahkan pembangunan desa sebagai bagian dari sistem ekonomi wilayah yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Komoditas unggulan tanaman pangan, seperti padi, ubi kayu, dan jagung menjadi fondasi utama LFA di sebagian besar desa perbatasan Lampung Timur. Produksi padi di desa-desa Kecamatan Batanghari, Pasir Sakti, Batanghari Nuban, dan Pekalongan

menunjukkan tingkat spesialisasi tinggi yang memperkuat ketahanan pangan wilayah. Produksi ubi kayu dan jagung di desa-desa Kecamatan Sekampung Udik, Way Bungur, Metro Kibang, dan Jabung menunjukkan daya saing yang didukung oleh pertumbuhan positif dan kontribusi ekonomi yang signifikan. Pola ini mengindikasikan bahwa desa berperan sebagai unit produksi primer yang menopang rantai nilai agribisnis regional. Temuan ini sejalan dengan kajian empiris yang menegaskan peran desa sebagai simpul utama sistem pangan regional di negara berkembang (Barrett et al., 2022).

Subsektor perkebunan rakyat membentuk LFA berbasis komoditas bernilai tambah menengah hingga tinggi di wilayah perbatasan. Komoditas kakao, kopi, karet, dan kelapa sawit berkembang kuat di desa-desa Kecamatan Sekampung Udik, Waway Karya, Batanghari Nuban, dan Labuhan Ratu. Nilai LQ yang tinggi dan pertumbuhan positif *Shift Share* menunjukkan bahwa komoditas perkebunan memiliki ketahanan struktural terhadap fluktuasi ekonomi. Kondisi ini memperlihatkan potensi pengembangan agroindustri perdesaan dan penguatan rantai pasok lokal. Literatur internasional menegaskan bahwa integrasi perkebunan rakyat dengan pengolahan skala lokal mampu meningkatkan kesejahteraan desa dan mengurangi kesenjangan wilayah perbatasan (Scoones et al., 2021).

Subsektor hortikultura dan perikanan membentuk LFA spesifik wilayah yang bersifat terlokalisasi namun strategis. Desa-desa pesisir Kecamatan Pasir Sakti dan Labuhan Maringgai menjadi LFA perikanan berbasis udang vanname, udang windu, dan ikan bandeng yang memiliki spesialisasi sangat tinggi. Komoditas hortikultura, seperti jeruk siam dan pepaya berkembang di desa-desa Kecamatan Batanghari, Gunung Pelindung, Way Jepara, dan Batanghari Nuban sebagai pelengkap sistem agribisnis pangan. Spesialisasi ini memperkuat diversifikasi ekonomi desa dan meningkatkan resiliensi wilayah perbatasan. Temuan ini konsisten dengan studi yang menunjukkan bahwa diversifikasi berbasis komoditas lokal meningkatkan ketahanan ekonomi perdesaan (OECD, 2023).

Berdasarkan integrasi analisis LFA, arah pengembangan kawasan perdesaan difokuskan pada penguatan klaster desa berbasis komoditas unggulan. Desa-desa di Kecamatan Pasir Sakti diarahkan sebagai klaster perikanan budidaya terpadu dengan dukungan infrastruktur tambak, logistik dingin, dan pengolahan hasil. Desa-desa di Kecamatan Sekampung Udik dan Way Bungur diarahkan sebagai klaster agroindustri ubi kayu dan jagung berbasis pengolahan tepung, pakan, dan bioenergi skala desa. Desa-desa di Kecamatan Batanghari Nuban dan Batanghari diarahkan sebagai klaster pangan dan perkebunan terpadu berbasis padi, kopi, dan hortikultura. Pendekatan klaster ini memperkuat keterkaitan desa-kecamatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan secara inklusif.

7.3.1 Matriks Program dan Indikasi Kegiatan Per Desa

1. Kecamatan Pasir Sakti–Desa Pesisir

Komoditas unggulan, yakni udang vanname, udang windu, ikan bandeng, padi, jeruk siam. Program prioritasnya adalah pengembangan klaster perikanan budidaya pesisir. Indikasi kegiatan, di antaranya Rehabilitasi dan intensifikasi tambak rakyat; pembangunan unit pengolahan hasil perikanan; penguatan kelembagaan kelompok nelayan; peningkatan akses pasar dan logistik dingin.

2. Kecamatan Sekampung Udik–Desa Agribisnis

Komoditas unggulan, yaitu Ubi kayu, jagung, kakao. Program prioritas adalah pengembangan agroindustri perdesaan berbasis pangan dan perkebunan. Indikasi kegiatan, di antaranya pembangunan unit pengolahan ubi kayu dan jagung; peningkatan produktivitas kakao rakyat; penguatan kemitraan petani dan pelaku usaha; pelatihan manajemen usaha desa.

3. Kecamatan Way Bungur–Desa Pangan

Komoditas unggulan, yaitu Ubi kayu dan jagung. Program prioritas adalah Penguatan sentra produksi pangan dan bahan baku agroindustri. Indikasi kegiatan, di antaranya Intensifikasi budidaya tanaman pangan; pembangunan lumbung pangan desa;

peningkatan akses sarana produksi; penguatan kelembagaan BUMDes.

4. Kecamatan Batanghari Nuban–Desa Pangan dan Perkebunan

Komoditas unggulan, yakni Padi, ubi kayu, kopi, pepaya. Program prioritas adalah Integrasi pertanian pangan dan perkebunan rakyat. Indikasi kegiatan di antaranya, peningkatan produktivitas padi dan kopi; pengembangan hortikultura bernilai tambah; penguatan rantai pasok desa; peningkatan kualitas infrastruktur pertanian.

5. Kecamatan Batanghari–Desa Penyangga Perbatasan

Komoditas unggulan, yakni Padi, kelapa sawit, kopi, hortikultura. Program prioritas adalah penguatan desa penyangga ketahanan pangan dan distribusi. Indikasi kegiatan, di antaranya Pengembangan sentra logistik desa; peningkatan produktivitas pertanian; penguatan akses pasar antarwilayah; pengembangan usaha olahan berbasis BUMDes.

6. Kecamatan Metro Kibang–Desa Produksi

Komoditas unggulan, yakni Jagung dan karet. Program prioritas adalah penguatan sentra produksi dan hilirisasi komoditas. Indikasi kegiatan di antaranya intensifikasi produksi jagung; peningkatan kualitas karet rakyat; pembangunan unit pengolahan sederhana; penguatan kemitraan usaha.

Tabel 28. Matriks Program dan Indikasi Kegiatan Per Desa Kabupaten Lampung Timur Berbasis LFA

Kecamatan	Desa (Tipikal Perbatasan)	Tipologi LFA	Komoditas Unggulan	Dasar Analisis (LQ, SSA, Klassen)	Program Prioritas	Indikasi Kegiatan
Pasir Sakti	Desa pesisir perbatasan	LFA Pesisir Perikanan	Udang vanname, padi, jeruk siam	LQ>1 perikanan, SSA positif, Klassen I	Pengembangan klaster perikanan budidaya terpadu	Rehabilitasi tambak rakyat; intensifikasi budidaya; unit pengolahan hasil; penguatan koperasi nelayan; peningkatan logistik dingin
Sekampung Udik	Desa agribisnis	LFA Pangan–Perkebunan	Ubi kayu, jagung, kakao	LQ>1 pangan & kakao, SSA positif, Klassen II	Pengembangan agroindustri perdesaan	Unit pengolahan ubi kayu dan jagung; peningkatan produktivitas kakao; pelatihan

Kecamatan	Desa (Tipikal Perbatasan)	Tipologi LFA	Komoditas Unggulan	Dasar Analisis (LQ, SSA, Klassen)	Program Prioritas	Indikasi Kegiatan
						pascapanen; kemitraan usaha
Way Bungur	Desa perbatasan darat	LFA Pangan	Ubi kayu, jagung	LQ>1 pangan, SSA positif, Klassen III	Penguatan sentra produksi pangan	Intensifikasi budidaya; pembangunan lumbung pangan; penyediaan sarana produksi; penguatan BUMDes
Batanghari Nuban	Desa perbatasan darat	LFA Pangan– Perkebunan	Padi, ubi kayu, kopi, pepaya	LQ>1 pangan & kopi, SSA positif, Klassen I	Integrasi pertanian pangan dan perkebunan	Peningkatan produktivitas padi dan kopi; pengembangan hortikultura; penguatan rantai

Kecamatan	Desa (Tipikal Perbatasan)	Tipologi LFA	Komoditas Unggulan	Dasar Analisis (LQ, SSA, Klassen)	Program Prioritas	Indikasi Kegiatan
						pasok; perbaikan infrastruktur
Batanghari	Desa penyangga	LFA Pangan–Distribusi	Padi, kelapa sawit, kopi, hortikultura	LQ>1 pangan & perkebunan, SSA moderat, Klassen III	Penguatan desa penyangga ketahanan pangan	Sentra logistik desa; peningkatan kapasitas produksi; akses pasar antarwilayah; pengembangan usaha olahan
Metro Kibang	Desa produksi	LFA Pangan–Perkebunan	Jagung, karet	LQ>1 jagung & karet, SSA positif, Klassen III	Penguatan hilirisasi komoditas	Intensifikasi jagung; peningkatan mutu karet; unit pengolahan sederhana;

Kecamatan	Desa (Tipikal Perbatasan)	Tipologi LFA	Komoditas Unggulan	Dasar Analisis (LQ, SSA, Klassen)	Program Prioritas	Indikasi Kegiatan
						kemitraan industri
Pekalongan	Desa perbatasan darat	LFA Pangan	Kelapa dan Karet	LQ>1 padi & kelapa, SSA moderat, Klassen III	Penguatan sentra perkebunan rakyat	Intensifikasi Karet; pengembangan kelapa; penguatan kelembagaan petani
Waway Karya	Desa perbatasan darat	LFA Perkebunan	Kelapa sawit, karet, jeruk siam	LQ>1 perkebunan, SSA negatif, Klassen II	Revitalisasi perkebunan rakyat	Replanting sawit rakyat; peningkatan produktivitas karet; diversifikasi hortikultura; peningkatan nilai tambah

Berdasarkan hasil LFA tersebut dapat pemetaan peran masing-masing desa berdasarkan status wilayah, dan komoditas unggulan, adalah sebagai berikut.

Tabel 29. Peran Desa dalam Kawasan Perdesaan

No	Desa	Kecamatan	Status Wilayah	Komoditas Unggulan	Peran Desa dalam Kawasan Perdesaan
1	Labuhan Maringgai	Labuhan Maringgai	Perbatasan Provinsi (Pesisir)	Udang vanname, udang windu, bandeng	Desa inti produksi perikanan budidaya dan pusat pertumbuhan ekonomi pesisir
2	Sriminosari	Labuhan Maringgai	Perbatasan Provinsi (Pesisir)	Udang, bandeng	Desa pendukung produksi tambak dan distribusi hasil perikanan
3	Pasir Sakti	Pasir Sakti	Perbatasan Provinsi (Pesisir)	Padi, jeruk siam, perikanan	Desa inti kawasan pesisir terpadu pangan dan perikanan

No	Desa	Kecamatan	Status Wilayah	Komoditas Unggulan	Peran Desa dalam Kawasan Perdesaan
4	Mulyosari	Pasir Sakti	Perbatasan Provinsi (Pesisir)	Padi, hortikultura	Desa penyangga ketahanan pangan kawasan pesisir
5	Sidodadi	Sekampung Udik	Perbatasan Kabupaten	Ubi kayu, jagung	Desa inti agroindustri pangan skala perdesaan
6	Gunung Sugih Besar	Sekampung Udik	Perbatasan Kabupaten	Kakao	Desa sentra perkebunan rakyat dan pemasok bahan baku olahan
7	Tambah Subur	Way Bungur	Perbatasan Kabupaten	Jagung, ubi kayu	Desa sentra produksi bahan baku agroindustri
8	Tanjung Qencono	Way Bungur	Perbatasan Kabupaten	Jagung	Desa penyangga produksi dan cadangan pangan wilayah

No	Desa	Kecamatan	Status Wilayah	Komoditas Unggulan	Peran Desa dalam Kawasan Perdesaan
9	Negara Batin	Batanghari Nuban	Perbatasan Kabupaten	Padi, kopi	Desa inti integrasi pertanian pangan dan perkebunan
10	Tulung Balak	Batanghari Nuban	Perbatasan Kabupaten	Pepaya	Desa pendukung hortikultura dan diversifikasi ekonomi
11	Banjarejo	Batanghari	Perbatasan Kabupaten	Padi, kelapa sawit	Desa simpul distribusi hasil pertanian antarwilayah
12	Nuban Jaya	Batanghari	Perbatasan Kabupaten	Padi	Desa penyangga produksi padi dan ketahanan pangan
13	Margototo	Metro Kibang	Perbatasan Kabupaten	Jagung	Desa produksi utama jagung untuk pasar regional

No	Desa	Kecamatan	Status Wilayah	Komoditas Unggulan	Peran Desa dalam Kawasan Perdesaan
14	Kibang	Metro Kibang	Perbatasan Kabupaten	Karet	Desa sentra perkebunan karet rakyat
15	Adirejo	Pekalongan	Perbatasan Kabupaten	Padi, kelapa	Desa penyangga pangan dan perkebunan tradisional
16	Tulus Rejo	Pekalongan	Perbatasan Kabupaten	Kelapa	Desa produksi kelapa dan bahan baku olahan
17	Sumberrejo	Waway Karya	Perbatasan Kabupaten	Kelapa sawit, karet	Desa inti perkebunan rakyat dan basis ekonomi wilayah
18	Karang Anom	Waway Karya	Perbatasan Kabupaten	Jeruk siam	Desa pendukung hortikultura dan peningkatan nilai tambah

BAB VIII

PETA JALAN KAWASAN PERDESAAN

Peta jalan pengembangan kawasan terintegrasi mencakup pengembangan komoditas unggulan, peta jalan pengembangan kawasan, penataan ruang partisipatif dan inklusif, dan pembentukan pusat pertumbuhan antardesa.

8.1 Peta Jalan Kawasan Perdesaan Klaster Agroindustri

Pengembangan klaster agroindustri Kabupaten Lampung Timur periode 2026–2030 diarahkan dengan menetapkan ubi kayu, jagung, kelapa, dan jeruk siam sebagai komoditas inti yang dikembangkan secara konsisten sepanjang periode perencanaan. Keempat komoditas tersebut dipilih berdasarkan kontribusi produksi yang signifikan, sebaran wilayah yang luas, serta keterkaitannya yang kuat dengan perekonomian perdesaan. Komoditas lainnya, yaitu kelapa sawit, karet, dan kopi, diposisikan sebagai komoditas pendukung yang berperan memperkuat stabilitas ekonomi kawasan dan mendukung diversifikasi kegiatan agroindustri.

Tabel 30. Peta Jalan Kawasan Perdesaan Klaster Agroindustri

Tahun	Tahapan Pengembangan	Fokus Komoditas	Indikasi Kegiatan	Stakeholder	Target Pasar
2026	Pembentukan Kawasan & Fondasi Klaster	Ubi Kayu, Jagung (<i>inti</i>)	- Penetapan kawasan perdesaan klaster agroindustri- Penguatan produksi dan agregasi bahan baku - Pembentukan dan penguatan koperasi/korporasi petani - Pendataan sentra produksi dan rantai pasok - Penyusunan SOP produksi dan pascapanen dasar	- Pemkab Lampung Timur (Bappeda, PMD, Dinas Pertanian) - Pemerintah Kecamatan & Desa - Koperasi /Gapoktan/Bumdes/Bumdesma	Pasar lokal & regional awal

Tahun	Tahapan Pengembangan	Fokus Komoditas	Indikasi Kegiatan	Stakeholder	Target Pasar
2027	Penguatan Pascapanen & Logistik	Ubi Kayu, Jagung, Kelapa (<i>inti</i>)	-Pengembangan unit pascapanen (pengeringan, sortasi, gudang) - Penguatan logistik dan pengumpulan bahan baku - Pelatihan mutu dan standar bahan baku - Fasilitasi kemitraan pasokan dengan industri - Dukungan distribusi dan transportasi hasil	- Dinas Pertanian - Dinas PMD - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Koperasi/Gapoktan/Bumdes/Bumdesma - Pelaku logistik	Industri tapioka Lampung Timur & Lampung Tengah Industri pakan ternak Pasar regional

Tahun	Tahapan Pengembangan	Fokus Komoditas	Indikasi Kegiatan	Stakeholder	Target Pasar
2028	Hilirisasi Awal & Diversifikasi Produk	Kelapa, Jeruk Siam (<i>inti</i>) Kopi (<i>pendukung</i>)	-Pengembangan UMKM olahan kelapa dan jeruk siam - Penguatan kemasan, branding, dan pemasaran - Pelatihan pengolahan kopi skala kecil -Pendampingan teknis dan manajemen usaha	- Dinas Koperasi & UMKM - Dinas PMD - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - UMKM/Pelaku Usaha/Bumdes/Bumdesma - Perguruan Tinggi/Pendamping	Kota Metro Lampung Selatan
2029	Integrasi Rantai Nilai & Kemitraan Industri	Ubi Kayu, Jagung (<i>inti</i>) Kelapa	- Penguatan kontrak kemitraan dengan industri pengolahan	- Dinas Pertanian - Dinas PMD - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri pengolahan regional

Tahun	Tahapan Pengembangan	Fokus Komoditas	Indikasi Kegiatan	Stakeholder	Target Pasar
		Sawit, Karet (pendukung)	- Integrasi logistik antarwilayah - Peningkatan kualitas dan kontinuitas pasokan - Penguatan peran koperasi dan Bumdes/Bumdesma sebagai agregator - Konsolidasi dan agregasi pasokan	- UMKM/Pelaku Usaha/Bumdes/Bumdesma - Industri Pengolahan	Lampung Selatan
2030	Konsolidasi & Daya Saing Berkelanjutan	Seluruh Komoditas Inti (Ubi Kayu, Jagung,	- Evaluasi dan penyempurnaan tata kelola klaster - Perluasan akses pasar regional–nasional	- Pemkab Lampung Timur (Lintas OPD) - Pelaku usaha/Koperasi/Bumdes/Bumdesma	Kota Metro Lampung Selatan

Tahun	Tahapan Pengembangan	Fokus Komoditas	Indikasi Kegiatan	Stakeholder	Target Pasar
		Kelapa, Jeruk Siam)	- Replikasi UMKM unggulan - Peningkatan daya saing dan keberlanjutan klaster	- Lembaga Pembiayaan	Pasar regional–nasiona

Dalam implementasinya, roadmap pengembangan klaster disusun secara bertahap dengan fokus intervensi tahunan yang berbeda, tanpa mengubah kedudukan komoditas inti. Tahap awal difokuskan pada pembentukan kawasan dan penguatan fondasi klaster melalui peningkatan produksi dan agregasi bahan baku ubi kayu dan jagung sebagai komoditas berbasis volume. Tahap selanjutnya diarahkan pada penguatan pascapanen dan pengolahan awal, serta pengembangan hilirisasi komoditas kelapa dan jeruk siam yang memiliki potensi nilai tambah tinggi dan dapat dikembangkan melalui skala UMKM.

Pada tahap lanjut, pengembangan klaster diarahkan pada integrasi rantai nilai dan konsolidasi daya saing, dengan memperkuat kemitraan antara wilayah produksi, pelaku pengolahan, dan pasar regional. Seluruh komoditas inti kemudian dikonsolidasikan dalam satu sistem produksi, pengolahan, dan pemasaran yang terintegrasi, dengan orientasi pasar ke Kota Metro dan Kabupaten Lampung Selatan sebagai pasar utama dan simpul distribusi regional. Melalui pendekatan ini, klaster agroindustri Lampung Timur diharapkan mampu berkembang secara fokus, bertahap, dan berkelanjutan, dengan komoditas inti sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi perdesaan.

8.2 Peta Jalan Kawasan Perdesaan Klaster Swasembada Pangan

Pengembangan klaster swasembada pangan Kabupaten Lampung Timur periode 2026–2030 diarahkan untuk menjamin ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan melalui penetapan ubi kayu, jagung, dan padi sebagai komoditas inti. Ketiga komoditas tersebut memiliki peran strategis dalam sistem pangan kawasan, baik sebagai sumber pangan pokok, bahan baku industri pangan, maupun penopang ketahanan pangan perdesaan. Sementara itu, pepaya diposisikan sebagai komoditas pendukung yang berfungsi melengkapi sistem pangan dan meningkatkan diversifikasi konsumsi serta pendapatan masyarakat.

Tabel 31. Peta Jalan Kawasan Perdesaan Klaster Swasembada Pangan

Tahun	Tahapan Pengembangan	Fokus Komoditas	Indikasi Kegiatan	Stakeholder	Target Pasar
2026	Pembentukan Kawasan & Fondasi Swasembada Pangan	Ubi Kayu, Jagung (<i>inti</i>)	- Penetapan kawasan swasembada pangan - Pendataan dan penataan sentra produksi ubi kayu dan jagung - Pembentukan dan penguatan kelembagaan pusat–hinterland - Penyusunan SOP produksi dan pascapanen dasar	- Pemkab Lampung Timur (Bappeda, Dinas Pertanian) - Dinas PMD - Pemerintah Kecamatan & Desa - BUMDes /BUMDesma/Koperasi/Gapoktan	Pasar lokal & tradisional

Tahun	Tahapan Pengembangan	Fokus Komoditas	Indikasi Kegiatan	Stakeholder	Target Pasar
2027	Penguatan Produksi & Pascapanen Pangan	Jagung, Padi (<i>inti</i>)	- Peningkatan produktivitas jagung - Pengembangan sarana pascapanen (pengeringan, gudang) - Stabilisasi produksi dan pasokan padi - Penguatan kemitraan dengan RMU	- Dinas Pertanian - Dinas Ketahanan Pangan - Dinas PMD - BUMDes /BUMDesma/Koperasi/Gapoktan - Rice Milling Unit	- Peternak unggas - Rice Milling Unit Lampung Timur & Tengah
2028	Hilirisasi Awal Pangan & Diversifikasi	Ubi Kayu (<i>inti</i>), Pepaya (<i>pendukung</i>)	- Pengembangan pengolahan pangan berbasis ubi kayu	- Dinas Koperasi & UMKM - Dinas Perindustrian & Perdagangan - Dinas PMD	• UMKM pangan • Pasar tradisional

Tahun	Tahapan Pengembangan	Fokus Komoditas	Indikasi Kegiatan	Stakeholder	Target Pasar
			- Fasilitasi peralatan pengolahan sederhana - Pengembangan UMKM pangan berbasis pepaya - Pelatihan mutu dan keamanan pangan	- BUMDes /BUMDesma • UMKM pangan	
2029	Integrasi Distribusi & Logistik Pangan	Ubi Kayu, Jagung, Padi (<i>inti</i>)	- Penguatan distribusi pusat-hinterland - Pengembangan sarana logistik pangan • Integrasi pasokan dengan	- Dinas Perdagangan - Dinas Perhubungan - Dinas PMD - BUMDes /BUMDesma -Koperasi /Gapoktan - Pelaku logistik	- Industri tepung tapioka Lampung Timur & Tengah - Pasar regional

Tahun	Tahapan Pengembangan	Fokus Komoditas	Indikasi Kegiatan	Stakeholder	Target Pasar
			Lampung Tengah • Fasilitasi kontrak pasokan antarwilayah		
2030	Konsolidasi Ketahanan & Swasembada Pangan	Seluruh Komoditas Inti (Ubi Kayu, Jagung, Padi)	- Evaluasi tata kelola kawasan pangan - Stabilisasi pasokan dan harga pangan - Penguatan cadangan pangan kawasan - Replikasi praktik baik pengelolaan pangan	- Pemkab Lampung Timur lintas sektor - BUMDes /BUMDesma	- Pasar regional - Konsumsi masyarakat

Tahap awal pengembangan klaster difokuskan pada pembentukan kawasan dan penguatan fondasi produksi pangan berbasis volume, khususnya ubi kayu dan jagung, serta pengumpulan hasil panen padi dari wilayah *hinterland*. Tahap berikutnya diarahkan pada peningkatan produktivitas dan perbaikan pascapanen jagung dan padi untuk mengurangi kehilangan hasil dan menjaga kualitas beras kawasan. Pada tahap hilirisasi awal, pengembangan difokuskan pada pengolahan pangan berbasis ubi kayu, sementara pepaya dikembangkan secara selektif melalui UMKM pangan sebagai bentuk diversifikasi dan nilai tambah non-pokok.

Pada tahap lanjut, klaster swasembada pangan diarahkan pada integrasi distribusi dan logistik kawasan agar aliran pangan dari wilayah produksi ke pusat pengolahan dan pasar dapat berjalan efisien dan stabil. Konsolidasi akhir difokuskan pada penguatan kelembagaan pangan kawasan serta stabilisasi pasokan dan harga pangan, dengan keterhubungan ke pasar regional dan industri pengolahan di Lampung Timur dan Lampung Tengah. Melalui pendekatan ini, klaster swasembada pangan Lampung Timur diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan kawasan secara berkelanjutan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat perdesaan.

8.3 Peta Jalan Kawasan Perdesaan Klaster Minapolitan

Pengembangan kawasan perdesaan klaster minapolitan Kabupaten Lampung Timur dipusatkan di Kecamatan Pasir Sakti, khususnya Desa Sumur Kucing dan Labuhan Ratu, dengan komoditas inti udang vanname, ikan bandeng, dan udang windu. Kawasan ini diarahkan sebagai pusat produksi perikanan budidaya tambak yang terintegrasi, mulai dari kegiatan hulu hingga hilirisasi awal. Penetapan Pasir Sakti sebagai pusat kawasan bertujuan memperkuat basis produksi perikanan pesisir sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil perikanan bagi masyarakat perdesaan.

Tabel 32. Peta Jalan Kawasan Perdesaan Klaster Minapolitan

Tahun	Tahapan Pengembangan	Fokus Komoditas	Indikasi Kegiatan	Stakeholder	Target Pasar
2026	Pembentukan Kawasan Minapolitan & Fondasi Hulu	Udang Vanname, Bandeng	- Penetapan kawasan perdesaan klaster minapolitan - Pendataan dan penataan sentra tambak budidaya - Pembentukan dan penguatan kelembagaan petambak (koperasi/keompok usaha) - Penyusunan SOP budidaya dan panen	- Bappeda - Dinas Perikanan - Dinas PMD - Pemerintah Kecamatan & Desa - BUMDes/BUMDesma -Koperasi/Kelompok Petambak	Pasar lokal & regional awal
2027	Penguatan Pascapanen & Rantai Dingin	Udang Vanname, Udang Windu	- Pengadaan sarana pascapanen (grading, icing, sortasi) - Pengembangan pabrik es dan fasilitas penyimpanan dingin skala kawasan	- Dinas Perikanan-Dinas Perindustrian & Perdagangan-Dinas PMD-BUMDes/BUMDesma	- Pasar tradisional - Kota Metro - Lampung Selatan

Tahun	Tahapan Pengembangan	Fokus Komoditas	Indikasi Kegiatan	Stakeholder	Target Pasar
			- Pelatihan mutu dan keamanan pangan	- Koperasi/Kelompok Petambak	
2028	Hilirisasi Awal & Pengembangan UMKM	Bandeng, Udang Vanname	- Pengembangan unit pengolahan skala UMKM –menengah - Produksi olahan dasar (bandeng presto/cabut duri, udang beku, ready-to-cook) - Fasilitasi peralatan, kemasan, dan branding produk	- Dinas Koperasi & UMKM - Dinas Perindustrian & Perdagangan - Dinas PMD - BUMDes/BUMDesma - UMKM olahan perikanan	- Kota Metro - Lampung Selatan
2029	Integrasi Rantai Nilai & Distribusi Regional	Udang Vanname, Bandeng, Udang Windu	- Penguatan distribusi dan logistik produk perikanan - Integrasi rantai dingin dari tambak ke pasar	- Dinas Perdagangan - Dinas Perhubungan - Dinas PMD	- Pasar regional-Lampung Selatan

Tahun	Tahapan Pengembangan	Fokus Komoditas	Indikasi Kegiatan	Stakeholder	Target Pasar
			- Fasilitasi kontrak pasokan dengan pedagang besar/ritel	- BUMDes/BUMDesma - Koperasi/Kelompok Petambak - Pelaku logistik	
2030	Konsolidasi & Daya Saing Minapolitan	Seluruh Komoditas Inti	- Evaluasi dan penguatan tata kelola kawasan minapolitan - Stabilisasi produksi dan mutu produk - Replikasi UMKM unggulan dan perluasan pasar	- Pemkab Lampung Timur lintas sektor - BUMDes/BUMDesma	Pasar regional–nasional

Pada tahap awal pengembangan, fokus diarahkan pada pembentukan kawasan dan penguatan fondasi produksi, termasuk penataan sentra tambak, konsolidasi hasil panen, serta penguatan kelembagaan petambak melalui koperasi atau korporasi. Tahap berikutnya menitikberatkan pada peningkatan penanganan pascapanen melalui *grading, icing, dan sortasi*, serta pembangunan infrastruktur rantai dingin seperti pabrik es dan *cold storage* skala kawasan. Langkah ini penting untuk menurunkan kehilangan hasil, menjaga mutu produk, dan memperpanjang umur simpan komoditas perikanan.

Pada tahap lanjut, kawasan minapolitan Pasir Sakti diarahkan pada pengembangan hilirisasi bernilai tambah melalui pengolahan produk perikanan skala UMKM hingga menengah, seperti bandeng cabut duri atau presto, udang beku, dan produk siap masak. Distribusi produk difokuskan ke **Kota Metro dan Kabupaten Lampung Selatan** sebagai pasar utama dan simpul distribusi regional, sebelum diperluas ke pasar yang lebih luas. Melalui pendekatan bertahap ini, kawasan perdesaan klaster minapolitan diharapkan mampu berkembang secara berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan petambak, dan memperkuat daya saing sektor perikanan Lampung Timur.

BAB IX

PENUTUP

9.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kondisi eksisting, potensi komoditas unggulan, serta perumusan tahapan pengembangan kawasan yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, maka pada bagian ini disajikan kesimpulan yang merangkum temuan utama dan implikasi strategis dari pengembangan kawasan perdesaan berbasis komoditas unggulan:

1. Komoditas unggulan yang dapat dikembangkan pada kawasan perdesaan yang berbatasan dengan Kabupaten/Kota lain adalah:
 - a. Metro Kibang : Jagung (LQ: 2,272 dan *Shift-Share*: 11.098.542.024) dan Karet (LQ: 1,026 dan *Shift Share*: 378.319.856)
 - b. Batanghari: Padi (LQ: 2,495 dan *Shift Share*: 67.185.743.772,59), Kelapa Sawit (LQ: 1,158 dan *Shift Share*: 144.942.034,59), Kopi (LQ: 1,097 dan *Shift Share*: 99.343.215,35), Pepaya (LQ:1,090 dan *Shift Share*: 3.734.680.894,75) dan Jeruk Siam (LQ: 1,120 dan *Shift Share*: 15.190.412.625,41)
 - c. Sekampung Udik: Ubi Kayu (LQ: 1,309 dan *Shift Share*: 207.179.641.441,34), Jagung (LQ: 1,001 dan *Shift Share*: 64.184.937.726,60) dan Kakao (LQ: 2,623 dan *Shift Share*: 14.383.122.740,14)
 - d. Pasir Sakti: Padi (LQ: 1,447 dan *Shift Share*: 37.492.678.866,73), Jeruk Siam (LQ: 1,614 dan *Shift Share*: 25.089.020.883,41), Udang Vanname (LQ: 9,346 dan *Shift Share*: 14.383.122.740,14)
 - e. Waway Karya: Kelapa Sawit (LQ: 2,424 dan *Shift Share*: 528.652.265,31), Karet (LQ: 1,093 dan *Shift Share*: 853.626.352,26), Jeruk Siam (LQ:7,302 dan *Shift Share*: 140.306.775.304,58)
 - f. Batanghari Nuban: Padi (LQ: 1,026 dan *Shift Share*: 27.587.112.694,70), Ubi Kayu (LQ: 1,853 dan *Shift Share*: 233.050.914.164,70), Kopi (LQ: 2,475 dan *Shift*

- Share*: 386.334.726,37), Pepaya (LQ: 3,968 dan *Shift Share*: 25.067.619.747,14)
- g. Pekalongan: Kelapa (LQ: 3,050 dan *Shift Share*: 636.425.475,54) dan Karet (LQ: 1,004 dan *Shift Share*: 302.325.999,76)
- h. Way Bungur Ubi Kayu (LQ: 1,951 dan *Shift Share*: 77.224.880.828,21) dan Jagung (LQ: 1,192 dan *Shift Share*: 36.890.777.710,92)
2. Komoditas Ikan Bandeng dan Udang Windu merupakan komoditas yang memiliki kontribusi yang besar di Kecamatan Pasir Sakti namun, memiliki pertumbuhan yang cenderung menurun, sedangkan keunggulan komoditas pisang tidak berbasis di kecamatan perbatasan
 3. Klaster kawasan perdesaan yang cocok dikembangkan di kecamatan perbatasan adalah klaster swasembada pangan, klaster agroindustri dan klaster minapolitan

Pendekatan analisis tipologi klassen menunjukkan hasil bahwa beberapa wilayah di Lampung Timur memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Disisi lain daerah Lampung Timur juga menghadapi tantangan besar, seperti keterbatasan akses pasar dan infrastruktur yang belum memadai. Sebagian besar komoditas unggulan yang ada, masih bergantung pada produksi konvensional dengan teknologi yang terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas komoditas unggulan dengan dukungan teknologi yang lebih modern.

Banyak sektor ekonomi lokal yang belum sepenuhnya terhubung secara sistematis. Sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan masih terpisah dengan sektor industri pengolahan. Adanya *missmatch* antara hulu-hilir yang menjadi tantangan besar bagi Kabupaten Lampung Timur dalam pembentukan kawasan perdesaan ini. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, diperlukan sinergi dan integrasi antara sektor agar dapat bekerja lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Perlu penguatan kebijakan pembangunan kawasan perdesaan yang berbasis pada komoditas unggulan, salah satunya dengan

melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Kerjasama antardesa dan antarkecamatan di daerah perbatasan harus didorong untuk menciptakan kawasan yang saling mendukung dan terintegrasi. Hal ini akan memperkuat daya saing produk unggulan, baik di pasar regional, nasional maupun internasional.

Beberapa kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, antara lain: peningkatan infrastruktur yang terintegrasi antar sektor, serta pemberdayaan masyarakat lokal dalam mengolah sumber daya yang dimiliki. Inovasi dan diversifikasi produk juga perlu ditingkatkan, agar pembangunan kawasan perdesaan dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan. Pembangunan kawasan perdesaan dalam hal ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung Timur.

9.2 Rekomendasi

Beberapa langkah dalam pengembangan kawasan ekonomi berbasis komoditas unggulan di Kabupaten Lampung Timur agar dapat berjalan, antara lain:

1. Integrasi kebijakan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan hingga Desa

Koordinasi penyusunan kebijakan yang lebih efektif dan efisien, antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini mulai dari pemerintah desa, kecamatan hingga kabupaten, serta provinsi dan nasional. Kebijakan yang bersifat vertikal ini untuk memaksimalkan potensi komoditas unggulan. Beberapa kebijakan yang harus dikoordinasikan secara vertikal dalam pembangunan kawasan perdesaan di Lampung timur, antara lain: pembangunan infrastruktur desa-desa perbatasan, kerjasama pemasaran, dan mempermudah akses modal bagi pelaku usaha lokal. Tiga hal ini harus menjadi prioritas bagi pemerintah untuk meluncurkan pembangunan kawasan perdesaan daerah perbatasan Kabupaten Lampung Timur.

2. Penguatan Kerjasama Antardesa dan Antarkabupaten

Desa-desa perbatasan akan selalu bersinggungan dengan program pemerintah daerah lainnya, sehingga memerlukan kerjasama yang kuat. Pada aspek ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus mendorong terbentuknya kerjasama antardesa melalui badan usaha milik desa (BUMDes) bersama dan koperasi pertanian. Kedua lembaga ekonomi ini yang dapat memperkuat posisi tawar petani dan nelayan dalam proses pemasaran produk di lingkup kawaasan perdesaan.

3. Penguatan konektivitas antardesa

Dalam penguatan konektivitas antardesa, diperlukan adanya pembangunan infrastruktur dasar, seperti: jalan, jembatan, pasar, dan fasilitas distribusi produk. Kerjasama pemasaran hasil olahan produk unggulan dengan *rest area* jalan tol sekitar kabupaten dan perbatasan kabupaten harus difaslitiasi. Hal ini sangat penting untuk menjaga kualitas dan meningkatkan daya saing produk.

4. Perencanaan yang partisipatif

Optimalisasi peran dan partisipasi masyarakat antardesa pada tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan berbasis komoditas unggulan. Hal ini bertujuan untuk memastikan kebijakan yang diterapkan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

5. Diversifikasi komoditas Unggulan

Pengembangan produk unggulan yang memiliki keunikan dan ciri khas daerah untuk menjadi produk-produk turunan dengan nilai tambah tinggi harus dipantau secara berkala. Agar produk-produk tersebut mampu bersaing di pasar regional, nasional maupun internasional.

6. Peningkatan Akses Pembiayaan

Mempermudah akses pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah (UKM) antardesa yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Bantuan modal maupun insentif

pembiayaan dapat bekerjasama dengan bank daerah (BPD) agar dapat mendorong pengusaha lokal.

7. Pengendalian Alih Fungsi Lahan

Mengembangkan kecamatan yang memiliki tingkat alih fungsi lahan yang tinggi melalui pendekatan hibrida, yaitu bukan sepenuhnya menjadi simpul ekonomi non pertanian, namun juga tidak dipertahankan secara kaku sebagai wilayah agraris murni. Kebijakan yang disarankan adalah pengendalian alih fungsi lahan melalui zonasi, dengan mempertahankan lahan pertanian produktif sebagai penyangga komoditas unggulan kawasan perdesaan, sekaligus mengarahkan perkembangan fungsi non pertanian seperti lahan pemukiman dan perdagangan pada zona tertentu yang terkendali. Pendekatan ini memungkinkan kecamatan menangkap manfaat ekonomi dari keberadaan kawasan pendidikan di sekitarnya tanpa mengorbankan keberlanjutan lahan pertanian dan fungsi strategis desa dalam sistem pembangunan kawasan perdesaan berbasis komoditas unggulan

DAFTAR PUSTAKA

- Abreu, I., Mesias, F. J., Escribano, M., & Rodríguez, C. (2020). The assessment of rural development: Identification of an integrated set of indicators. *Journal of Rural Studies*, 79, 52–64.
- Aginta, & Someya. (2022). Struktur ekonomi daerah dan efektivitas kebijakan moneter di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(2), 123-140.
- Ambrose, B. W., Fuerst, F., Mansley, N., & Wang, Z. (2019). Size effects and economies of scale in European real estate companies. *Global Finance Journal*, 41, 1–17.
- Anderson, J. E. (2003). *Public policymaking: An introduction* (5th ed.). Boston, MA: Houghton Mifflin.
- Anggarawati, S., & Suwarnata, A. A. E. (2021). *Nilai strategis komoditas unggulan kawasan perdesaan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat*. AGRI: Jurnal Ilmu Pertanian dan Teknologi Pertanian, 1(2), 45–55. Universitas Nusa Bangsa.
- Badan Pusat Statistik. (2025). Kabupaten Lampung Timur Dalam Angka 2025.
- Badan Pusat Statistik. (2025). Provinsi Lampung Dalam Angka 2025.
- Birkland, T. A. (2019). *An Introduction to the Policy Process* (6th ed.). Routledge.
- Buchholz, W., & Sandler, T. (2021). *Global public goods: A survey*. *Journal of Economic Literature*, 59(2), 488–545. <https://doi.org/10.1257/jel.20201407>
- Cairney, P. (2019). *Policy Analysis in 750 Words: William Dunn (2017) Public Policy Analysis 6th Ed.* [Blog post]. <https://paulcairney.wordpress.com/2019/12/13/policy->

analysis-in-750-words-william-dunn-2017-public-policy-analysis/

- Chin, M. (2021, December). *What are global public goods?* *Finance & Development Magazine*. International Monetary Fund.
- Dewi, D. N. A. M. (2020). *Economic development strategy through rural areas: A case study in Toba Samosir, North Sumatera, Indonesia*. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 8(2), 27–34.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy* (14th ed.). Boston, MA: Pearson.
- Easton, D. (1953). *The Political System: An Inquiry into the State of Political Science*. Knopf.
- Ferreira, H., Marques, C. S., & Farinha, L. (2025). *Regional smart specialisation strategies: A systematic literature review*. *Journal of the Knowledge Economy*. <https://doi.org/10.1007/s13132-025-02736-3>
- Fischer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (2007). *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods*. CRC Press.
- Fitrianti, A. A. (2022). Perencanaan pembangunan infrastruktur perdesaan: Kajian pustaka terstruktur. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 17(4), 373–390.
- Halonen-Akatwijuka, M., & Pafilis, E. (2020). *Common ownership of public goods*. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 180, 555–578. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2020.10.002>
- Helper, S., Gray, J. V., Hughes, M. M., & Roman, A. (2021). Public policy and operations management. *Journal of Operations Management*, 67, 780–802. <https://doi.org/10.1002/joom.1160>
- Hidayah, U., Amo, F. M., & Klau, A. D. (2024). Social and economic development of rural border area in Malaka and Belu Regencies (Border of Indonesia–Timor Leste). *Jurnal*

- Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning, 8(2), 145–162.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2003). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford University Press.
- Kaul, I., Grunberg, I., & Stern, M. A. (Eds.). (1999). *Global Public Goods: International Cooperation in the 21st Century*. Oxford University Press.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2024, Oktober 10). *Data Indeks Desa Membangun tahun 2024* [Data set]. DATA.GO.ID. <https://data.go.id/dataset/dataset/data-indeks-desa-membangun-tahun-2024>
- Kielesińska, A. (2021). *Development concepts and theories in regional and quality aspect. Conference Quality Production Improvement – CQPI*, 3(1), 205–215. <https://doi.org/10.2478/cqpi-2021-0019>
- Koutras, N. (2019). The potential of public policy on open access repositories. *Erasmus Law Review* (posted to SSRN).
- Kuswara, K. (2008). Pengembangan permukiman di kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan NKRI: Studi kasus Kabupaten Nunukan. *Jurnal Permukiman*, 3(2), 67–78.
- Li, Y., Taeihagh, A., de Jong, M., & Klinke, A. (2020). Toward a commonly shared public policy perspective for analyzing risk coping strategies. *Risk Analysis*. Available at SSRN
- Liu, D., Chen, Y., & Zhu, J. (2024). An integrated framework for measuring sustainable rural development. *Ecological Indicators*, 161, 107–119.
- Liu, X., Zhou, J., & Wang, Y. (2021). Multi-dimension evaluation of rural development degree based on WA method. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 234, 285–292.
- Lowi, T. J. (1964). *American Business, Public Policy, Case-Studies, and Political Theory*. World Publishing.

- Mladenović, M. (2025). New frontiers in determining criteria and strategies for rural area development. *Urban Sciences*, 6(4), 141–153.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Nasution, P. A., & Kurniawan, B. (2023). Implementasi kebijakan kerjasama antar desa di Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Kampung Batik di Desa Klampar Kec. Proppo Kab. Pamekasan. *Publika*, 11(2), 1915-1926. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n2.p1915-1926>
- Nazir M. 2014. Metode Penelitian. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Nicholson, B. (2022). *Digital public goods platforms for development*. Taylor & Francis Online.
- OECD. (2024). *Regional Development – Policy guidance*. Organisation for Economic Co-operation and Development. <https://www.oecd.org/en/topics/policy-issues/regional-development.html>
- Ogonjo, F. A. (2024, February 12). *Contextualizing digital public goods for digital development*. Centre for Intellectual Property and Information Technology Law.
- Paidi, et al. (2025). *Efficiency analysis of regional government expenditure on development: Evidence from Indonesia*. *Economics*, 13(3), 105–124. <https://doi.org/10.2478/eoik-2025-0058>
- Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. (2025). *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2029*. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
- Pemerintah Provinsi Lampung. (2025). Peresmian Pabrik Kelapa Sawit Oleh Wakil Gubernur Lampung. <https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/wagub-jihan-nurlela-resmikan-pabrik-kelapa-sawit-pt-pesona-sawit-makmur-di-sekampung-udik-lampung-timur->

diharapkan-serap-tenaga-kerja-dan-perkuat-perekonomian-daerah diakses pada tanggal 17 Desember 2025.

- Putri, R. A. (2025). Village governance model that empowers communities in border areas. *Jurnal Sosiologi*, 12(1), 21–34.
- Ramadhani, F. (2024). Determinants of successful rural development: A multi-dimensional analysis. *Sodality Journal of Rural Sociology*, 8(2), 112–128.
- Reed, M. S., et al. (2023). *Improving the evidence base for delivery of public goods from public funding. Emerald Open Research*. <https://doi.org/10.35241/emeraldopenres.14959.1>
- Resti, R., Yuwono, T., & Alfirdaus, L. K. (2025). Pembangunan setengah-setengah wilayah perbatasan: Studi kasus Kabupaten Kapuas Hulu. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 21(1), 89–103.
- Rodionov, D., Rudskaia, I., Krasnova, D., & Zhogova, E. (2024). *The role of higher education in regional development. International Journal of Technology*, 15(5), 1573–1581. <https://doi.org/10.14716/ijtech.v15i5.6211>
- Samuelson, P. A. (1954). The pure theory of public expenditure. *Review of Economics and Statistics*, 36(4), 387–389.
- Setiawan, I., Nawawi, N., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Village development model of growth center in border district in Sanggau Regency, West Kalimantan Province. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 51(1), 55–70.
- Sjafrizal. (2018). *Ekonomi regional: Teori dan aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Smith, K. B., & Larimer, C. (2009). *The Public Policy Theory Primer* (2nd ed.). Westview Press.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.

- Sujito, A., & Ghofur, M. (2025). The nurturing food sovereignty from the peripheral side: The Village Law and the soul of agriculture in rural development in Indonesia. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 13(1), 1–15.
- Tarigan, R. (2014). *Ekonomi regional: Teori dan aplikasi* (Edisi revisi). Jakarta: Bumi Aksara.
- Treib, O., Meyer, J., & Maggetti, M. (2021). *Implementing Public Policy: Patterns, Principles, and Perspectives*. Oxford University Press.
- Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2024). *Policy Analysis: Concepts and Practice* (6th ed.). Routledge

Lampiran 1. Data Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Perkebunan Hortikultura dan Perikanan Tahun 2024

Kecamatan	Tanaman Pangan			Perkebunan					Hortikultura			Perikanan Budidaya		
	Padi	Ubi Kayu	Jagung	Kelapa Sawit	Kelapa	Kopi	Karet	Kakao	Pisang	Pepaya	Jeruk Siam	Udang Vanname	Udang Windu	Ikan Bandeng
Metro Kibang	1.727	31.789	45023	172	121	3	170	30	91	406	712			
Batanghari	45.237	3.247	9336	297	369	9	221	51	282	2015	1537			
Sekampung	34.029	2.936	13042	284	250	19	860	30	679	1254	0			
Marga Tiga	11.847	190.458	53156	615	717	28	320	370	715	808	1151			
Sekampung Udik	23.826	134.085	82260	556	876	5	471	736	292	801	1808			
Jabung	67.207	200.655	67619	870	443	10	116	64	182	3335	0			
Pasir Sakti	44.406	80	11022	437	203	0	79	4	179	28	3749	2.773,17	552	1134
Waway Karya	30.673	26.660	45612	1.071	167	3	432	24	0	0	17256			

Marga Sekampung	530	6.045	89707	70	200	7	200	75	10	15500	0			
Labuhan Maringgai	29.035	3.195	286	885	121	11	158	71	426	836	3831	2.268,96	451	928
Mataram Baru	17.563	21.718	4581	160	496	0	65	335	22	661	886			
Bandar Sribhawono	15.087	128.824	157360	78	1.075	14	153	509	1626	1559	0			
Melinting	7.598	2.354	45981	263	980	43	299	62	372	3456	942			
Gunung Pelindung	14.205	25.563	6463	160	567	6	300	34	802	328	172			
Way Jepara	23.553	52.693	17671	245	550	7	512	362	4764	3433	4044			
Braja Selebah	18.769	631	8503	85	348	3	255	53	53	818	1418			
Labuhan Ratu	9.612	52.800	5780	99	804	15	1000	254	42	779	1652			
Sukadana	20.066	133.354	21327	348	447	17	306	280	14	203	12			
Bumi Agung	8.861	60.760	11423	110	445	0	90	39	1	3	4			

Batanghari Nuban	32.088	146.580	21090	155	694	35	87	89	59	12650	0			
Pekalongan	21.697	19.235	13479	83	815	0	153	82	11	925	105			
Raman Utara	32.319	8.134	8726	232	448	1	169	5	5	725	0			
Purbolinggo	7.420	22.922	33545	61	259	0	79	51	27	2174	162			
Way Bungur	4.248	45.469	16614	43	183	0	107	7	108	501	21			
Total	521.603	1.320.187	789.606	7.379	11.578	236	6.602,00	3.617,00	10.760,88	53.196,00	39.463,08	5.042,13	1.002,77	2.061,55

Lampiran 2. Data Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Perkebunan Hortikultura dan Perikanan Tahun 2023

Kecamatan	Tanaman Pangan			Perkebunan					Hortikultura			Perikanan Budidaya		
	Padi	Ubi Kayu	Jagung	Kelapa Sawit	Kelapa	Kopi	Karet	Kakao	Pisang	Pepaya	Jeruk Siam	Udang Vanname	Udang Windu	Ikan Bandeng
Metro Kibang	1.926	4.801	59.802	172	120	3	164	21	1.201	71	21			
Batanghari	40.166	3.539	16.392	298	369	9	221	38	3.727	960	176			
Sekampung	34.060	3.785	13.071	285	245	18	840	9	1.100	462	-			
Marga Tiga	11.061	36.516	44.198	629	717	28	317	333	9.860	4.311	879			
Sekampung Udik	23.902	94.785	92.348	556	876	5	471	736	25.043	9.624	11.579			
Jabung	65.762	112.131	70.242	870	443	10	116	64	6.911	1.927	-			
Pasir Sakti	45.025	412	119	437	309	-	79	2	1.169	123	2.155	2.153,71	646	1508
Waway Karya	36.183	18.225	46.302	1.071	167	3	432	24	60.128	-	6.338			
Marga Sekampung	886	14.854	98.382	67	200	5	200	75	7.912	8.353	-			

Labuhan Maringgai	38.350	2.262	304	883	121	11	158	55	1.299	730	2.498	1.762,12	529	1233
Mataram Baru	18.164	17.867	6.061	158	448	-	50	276	199	451	1.089			
Bandar Sribhawono	15.618	99.798	107.737	68	1.042	13	153	502	84.589	2.113	-			
Melinting	12.682	17.020	21.112	260	819	43	293	41	5.825	3.688	1.039			
Gunung Pelindung	15.194	31.125	12.449	160	567	6	270	34	831	200	59			
Way Jepara	24.474	39.068	24.397	241	550	7	512	362	9.536	21.593	2.815			
Braja Selebah	25.651	268	924	85	348	3	239	38	787	782	1.341			
Labuhan Ratu	8.177	66.317	11.155	99	804	18	1.066	254	274.985	1.065	4.433			
Sukadana	20.117	76.753	23.347	258	448	17	306	164	63	98	18			
Bumi Agung	8.238	39.505	8.430	109	445	-	86	25	5	9	9			
Batanghari Nuban	32.438	87.454	27.160	155	694	35	87	58	14	5.559	-			

Pekalongan	27.448	6.725	8.085	83	815	-	153	82	26	492	98			
Raman Utara	26.221	32.714	17.604	232	448	1	169	3	886	522	-			
Purbolinggo	14.488	22.662	9.342	61	257	-	79	44	236	1.238	51			
Way Bungur	9.139	14.983	9.434	26	183	-	107	3	1.492	2.507	88			
Total	555.370	843.569	728.397	7.263	11.435	235	6.568	3.243	497.821	66.874	34.685	3.915,83	1.174,76	2.741,08

Lampiran 3. Acuan Harga Komoditas

Komoditas	Harga (Rp/ton)	Sumber
Padi	6.000.000	Harga Pembelian Pemerintah (Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024)
Ubi Kayu	1.832.240	Statistik harga produsen pertanian Tahun 2024 (BPS, 2025)
Jagung	3.694.490	
Kelapa Sawit	2.152.620	
Kelapa (asumsi 100 butir=100kg)	3.457.730	
Kopi	50.929.210	
Karet	9.043.000	
Kakao	59.460.710	
Pisang (asumsi 10 sisir=10kg)	7.418.800	
Pepaya	3.510.730	
Jeruk Siam	10.675.320	
Udang Vanname	41.000.000	https://app.jala.tech/harga_udang/lampung?region_id=18&size=100&duration=1t_month&supplier=all&next=1

Komoditas	Harga (Rp/ton)	Sumber
Udang Windu	160.000.000	https://www.blibli.com/p/udang-tiger-windu-murah-segar/ps--ATS-70075-00121?ds=ATS-70075-00121-00001&source=SEARCH&sid=ab3e18efcdf90ef5&cnc=false&pickupPointCode=P-P-3240853&pid1=ATS-70075-00121&logistics=EXPRESS&logistics=INSTANT
Ikan Bandeng	26.810.000	https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/960c0f48ba6e065/harga-ikan-bandeng-nasional-sebulan-terakhir-naik-rp680?utm_source=chatgpt.com

Lampiran 4. Nilai Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Perkebunan Hortikultura dan Perikanan Tahun 2024 (Dalam Rupiah)

Kecamatan	Tanaman Pangan			Perkebunan					Hortikultura			Perikanan			Total	Kontribusi
	Padi	Ubi Kayu	Jagung	Kelapa Sawit	Kelapa	Kopi	Karet	Kakao	Pisang	Pepaya	Jeruk Siam	Udang Vanname	Udang Windu	Ikan Bandeng		
Metro Kibang	10.362.000.000	58.245.077.360	166.337.023.270	370.250.640	418.385.330	152.787.630	1.537.310.000	1.783.821.300	675.333.364	1.423.952.088	7.604.564.202	-	-	-	248.910.505.184	0,025095
Batanghari	271.422.000.000	5.949.283.280	34.491.758.640	639.328.140	1.275.902.370	458.362.890	1.998.503.000	3.032.496.210	2.093.793.086	7.074.296.487	16.409.621.515	-	-	-	344.845.345.618	0,034767
Sekampung	204.174.000.000	5.379.456.640	48.183.538.580	611.344.080	864.432.500	967.654.990	7.776.980.000	1.783.821.300	5.036.348.824	4.403.333.103	-	-	-	-	279.180.910.017	0,028147
Marga Tiga	71.082.000.000	348.964.765.920	196.384.310.440	1.323.861.300	2.479.192.410	1.426.017.880	2.893.760.000	22.000.462.700	5.302.958.240	2.837.371.986	12.290.495.916	-	-	-	666.985.196.792	0,067245
Sekampung Udik	142.956.000.000	245.675.900.400	303.908.747.400	1.196.856.720	3.028.971.480	254.646.050	4.259.253.000	43.763.082.560	2.168.923.274	2.812.972.413	19.297.936.094	-	-	-	769.323.289.390	0,077563
Jabung	403.242.000.000	367.648.117.200	249.817.719.310	1.872.779.400	1.531.774.390	509.292.100	1.048.988.000	3.805.485.440	1.353.382.009	11.708.284.550	-	-	-	-	1.042.537.822.399	0,105108
Pasir Sakti	266.436.000.000	146.579.200	40.720.668.780	940.694.940	701.919.190	-	714.397.000	237.842.840	1.326.206.944	97.598.294	40.020.173.382	113.699.970.000	88.243.200.000	30.398.518.500	583.683.769.070	0,058847
Waway Karya	184.038.000.000	48.847.518.400	168.513.077.880	2.305.456.020	577.440.910	152.787.630	3.906.576.000	1.427.057.040	-	-	184.213.535.426	-	-	-	593.981.449.306	0,059885
Marga Sekampung	3.180.000.000	11.075.890.800	331.421.614.430	150.683.400	691.546.000	356.504.470	1.808.600.000	4.459.553.250	72.407.488	54.416.315.000	-	-	-	-	407.633.114.838	0,041097
Labuhan Maringgai	174.210.000.000	5.854.006.800	1.056.624.140	1.905.068.700	418.385.330	560.221.310	1.428.794.000	4.221.710.410	3.160.631.364	2.936.023.499	40.894.001.701	93.027.360.000	72.200.000.000	24.871.637.000	426.744.464.254	0,043024

Kecamatan	Tanaman Pangan			Perkebunan					Hortikultura			Perikanan			Total	Kontribusi
	Padi	Ubi Kayu	Jagung	Kelapa Sawit	Kelapa	Kopi	Karet	Kakao	Pisang	Pepaya	Jeruk Siam	Udang Vanname	Udang Windu	Ikan Bandeng		
Mataram Baru	105.378.000.000	39.792.588.320	16.924.458.690	344.419.200	1.715.034.080	-	587.795.000	19.919.337.850	160.246.080	2.320.592.530	9.462.603.648	-	-	-	196.605.075.398	0,019822
Bandar Sribhawono	90.522.000.000	236.036.485.760	581.364.946.400	167.904.360	3.717.059.750	713.008.940	1.383.579.000	30.265.501.390	12.062.991.056	5.474.632.362	-	-	-	-	961.708.109.018	0,096959
Melinting	45.588.000.000	4.313.092.960	169.876.344.690	566.139.060	3.388.575.400	2.189.956.030	2.703.857.000	3.686.564.020	2.757.827.618	12.131.327.515	10.051.774.559	-	-	-	257.253.458.852	0,025936
Gunung Pelindung	85.230.000.000	46.837.551.120	23.877.488.870	344.419.200	1.960.532.910	305.575.260	2.712.900.000	2.021.664.140	5.948.712.848	1.149.764.075	1.838.290.104	-	-	-	172.226.898.527	0,017364
Way Jepara	141.318.000.000	96.546.222.320	65.285.332.790	527.391.900	1.901.751.500	356.504.470	4.630.016.000	21.524.777.020	35.346.501.660	12.052.336.090	43.173.129.144	-	-	-	422.661.962.894	0,042613
Braja Selehah	112.614.000.000	1.156.143.440	31.414.248.470	182.972.700	1.203.290.040	152.787.630	2.305.965.000	3.151.417.630	392.083.580	2.870.021.775	15.137.603.760	-	-	-	170.580.534.025	0,017198
Labuhan Ratu	57.672.000.000	96.742.272.000	21.354.152.200	213.109.380	2.780.014.920	763.938.150	9.043.000.000	15.103.020.340	314.557.120	2.733.454.378	17.639.898.768	-	-	-	224.359.417.256	0,02262
Sukadana	120.396.000.000	244.336.532.960	78.792.388.230	749.111.760	1.545.605.310	865.796.570	2.767.158.000	16.648.998.800	102.379.440	710.922.825	131.306.436	-	-	-	467.046.200.331	0,047087
Bumi Agung	53.166.000.000	111.326.902.400	42.202.159.270	236.788.200	1.538.689.850	-	813.870.000	2.318.967.690	6.676.920	10.883.263	41.847.254	-	-	-	211.662.784.847	0,02134
Batanghari Nuban	192.528.000.000	268.569.739.200	77.916.794.100	333.656.100	2.399.664.620	1.782.522.350	786.741.000	5.292.003.190	434.444.928	44.410.734.500	-	-	-	-	594.454.299.988	0,059933
Pekalongan	130.182.000.000	35.243.136.400	49.798.030.710	178.667.460	2.818.049.950	-	1.383.579.000	4.875.778.220	82.979.278	3.246.547.568	1.122.243.015	-	-	-	228.931.011.601	0,023081
Raman Utara	193.914.000.000	14.903.440.160	32.238.119.740	499.407.840	1.549.063.040	50.929.210	1.528.267.000	297.303.550	37.094.000	2.545.279.250	-	-	-	-	247.562.903.790	0,024959

Kecamatan	Tanaman Pangan			Perkebunan					Hortikultura			Perikanan			Total	Kontribusi
	Padi	Ubi Kayu	Jagung	Kelapa Sawit	Kelapa	Kopi	Karet	Kakao	Pisang	Pepaya	Jeruk Siam	Udang Vanname	Udang Windu	Ikan Bandeng		
Purbolinggo	44.520.000.000	41.998.605.280	123.931.667.050	131.309.820	895.552.070	-	714.397.000	3.032.496.210	198.823.840	7.631.273.801	1.727.266.776	-	-	-	224.781.391.847	0,022662
Way Bungur	25.488.000.000	83.310.120.560	61.380.256.860	92.562.660	632.764.590	-	967.601.000	416.224.970	797.521.000	1.758.875.730	224.715.486	-	-	-	175.068.642.856	0,01765
Total	3.129.618.000.000	2.418.899.428.880	2.917.191.470.940	15.884.182.980	40.033.597.940	12.019.293.560	59.701.886.000	215.069.388.070	79.832.823.963	186.756.793.080	421.281.007.186	206.727.330.000	160.443.200.000	55.270.155.500	9.918.728.558.098	

Lampiran 5. Nilai Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Perkebunan Hortikultura dan Perikanan Tahun
2023 (Dalam Rupiah)

Kecamatan	Tanaman Pangan			Perkebunan					Hortikultura			Perikanan			Total	Kontribusi
	Padi	Ubi Kayu	Jagung	Kelapa Sawit	Kelapa	Kopi	Karet	Kakao	Pisang	Pepaya	Jeruk Siam	Udang Vanname	Udang Windu	Ikan Bandeng		
Metro Kibang	11.556.000.000	8.796.584.240	220.937.890.980	370.250.640	414.927.600	152.787.630	1.483.052.000	1.248.674.910	8.909.236.920	247.506.465	228.451.848	-	-	-	254.345.363.233	0,020172
Batang hari	240.996.000.000	6.484.297.360	60.560.080.080	641.480.760	1.275.902.370	458.362.890	1.998.503.000	2.259.506.980	27.650.609.480	3.369.247.581	1.878.856.320	-	-	-	347.572.846.821	0,027566
Sekampung	204.360.000.000	6.935.028.400	48.290.678.790	613.496.700	847.143.850	916.725.780	7.596.120.000	535.146.390	8.162.905.640	1.620.552.968	-	-	-	-	279.877.798.518	0,022197
Marga Tiga	66.366.000.000	66.906.075.840	163.289.069.020	1.353.997.980	2.479.192.410	1.426.017.880	2.866.631.000	19.800.416.430	73.150.851.760	15.133.001.665	9.387.876.408	-	-	-	422.159.130.393	0,033482
Sekampung Udik	143.412.000.000	173.668.868.400	341.178.762.520	1.196.856.720	3.028.971.480	254.646.050	4.259.253.000	43.763.082.560	185.789.750.280	33.788.318.739	123.611.665.344	-	-	-	1.053.952.175.093	0,08359
Jabung	394.572.000.000	205.450.903.440	259.508.366.580	1.872.779.400	1.531.774.390	509.292.100	1.048.988.000	3.805.485.440	51.267.617.400	6.763.421.345	-	-	-	-	926.330.628.095	0,073468
Pasir Sakti	270.150.000.000	754.882.880	439.644.310	940.694.940	1.068.438.570	-	714.397.000	118.921.420	8.671.093.440	430.064.425	23.009.584.728	88.302.110.000	103.379.200.000	40.418.487.900	538.397.519.613	0,042701
Waway Karya	217.098.000.000	33.392.574.000	171.062.275.980	2.305.456.020	577.440.910	152.787.630	3.906.576.000	1.427.057.040	446.077.606.400	-	67.662.313.224	-	-	-	943.662.087.204	0,074843

Kecamatan	Tanaman Pangan			Perkebunan					Hortikultura			Perikanan			Total	Kontribusi
	Padi	Ubi Kayu	Jagung	Kelapa Sawit	Kelapa	Kopi	Karet	Kakao	Pisang	Pepaya	Jeruk Siam	Udang Vanname	Udang Windu	Ikan Bandeng		
Marga Sekampung	5.316.000.000	27.216.092.960	363.471.315.180	144.225.540	691.546.000	254.646.050	1.808.600.000	4.459.553.250	58.694.578.080	29.326.180.909	-	-	-	-	491.382.737.969	0,038972
Labuhan Maringgai	230.100.000.000	4.144.526.880	1.123.124.960	1.900.763.460	418.385.330	560.221.310	1.428.794.000	3.270.339.050	9.636.279.320	2.561.779.681	26.669.084.424	72.246.920.000	84.582.400.000	33.069.866.900	471.712.485.315	0,037412
Mataram Baru	108.984.000.000	32.736.632.080	22.392.303.890	340.113.960	1.549.063.040	-	452.150.000	16.411.155.960	1.474.115.560	1.582.637.084	11.625.423.480	-	-	-	197.547.595.054	0,015668
Bandar Sribhawono	93.708.000.000	182.853.887.520	398.033.269.130	146.378.160	3.602.954.660	672.265.572	1.383.579.000	29.849.276.420	627.547.389.440	7.417.119.271	-	-	-	-	1.345.214.119.173	0,106691
Melintang	76.092.000.000	31.184.724.800	77.998.072.880	559.681.200	2.831.880.870	2.189.956.030	2.649.599.000	2.437.889.110	43.213.026.240	12.946.167.948	11.087.387.352	-	-	-	263.190.385.430	0,020874
Gunung Pelindung	91.164.000.000	57.028.470.000	45.992.706.010	344.419.200	1.960.532.910	305.575.260	2.441.610.000	2.021.664.140	6.167.248.440	703.550.292	626.641.284	-	-	-	208.756.417.536	0,016557
Way Jepara	146.844.000.000	71.581.952.320	90.134.472.530	518.781.420	1.901.751.500	356.504.470	4.630.016.000	21.524.777.020	70.747.160.560	75.807.192.890	30.045.688.140	-	-	-	514.092.296.850	0,040773
Braja Selebah	153.906.000.000	491.040.320	3.413.708.760	182.972.700	1.203.290.040	152.787.630	2.161.277.000	2.259.506.980	5.836.369.960	2.745.741.933	14.310.266.460	-	-	-	186.662.961.783	0,014804

Kecamatan	Tanaman Pangan			Perkebunan					Hortikultura			Perikanan			Total	Kontribusi
	Padi	Ubi Kayu	Jagung	Kelapa Sawit	Kelapa	Kopi	Karet	Kakao	Pisang	Pepaya	Jeruk Siam	Udang Vanname	Udang Windu	Ikan Bandeng		
Labuhan Ratu	49.062.000.000	121.508.660.080	41.212.035.950	213.109.380	2.780.014.920	916.725.780	9.639.838.000	15.103.020.340	2.040.055.008.600	3.737.874.231	47.323.693.560	-	-	-	2.331.551.980.841	0,184918
Sukadana	120.702.000.000	140.629.916.720	86.255.258.030	555.375.960	1.549.063.040	865.796.570	2.767.158.000	9.751.556.440	465.900.640	344.402.613	188.953.164	-	-	-	364.075.381.177	0,028875
Bumi Agung	49.428.000.000	72.382.641.200	31.144.550.700	234.635.580	1.538.689.850	-	777.698.000	1.486.517.750	35.610.240	31.596.570	93.942.816	-	-	-	157.153.882.706	0,012464
Batanghari Nuban	194.628.000.000	160.236.716.960	100.342.348.400	333.656.100	2.399.664.620	1.782.522.350	786.741.000	3.448.721.180	100.153.800	19.514.743.778	-	-	-	-	483.573.268.188	0,038353
Pekalongan	164.688.000.000	12.321.814.000	29.869.951.650	178.667.460	2.818.049.950	-	1.383.579.000	4.875.778.220	191.405.040	1.726.225.941	1.040.843.700	-	-	-	219.094.314.961	0,017377
Raman Utara	157.326.000.000	59.939.899.360	65.037.801.960	499.407.840	1.549.063.040	50.929.210	1.528.267.000	178.382.130	6.574.540.560	1.832.952.133	-	-	-	-	294.517.243.233	0,023359
Purbolinggo	86.928.000.000	41.522.222.880	34.513.925.580	131.309.820	888.636.610	-	714.397.000	2.616.271.240	1.747.869.280	4.347.688.032	543.373.788	-	-	-	173.953.694.230	0,013796
Way Bungur	54.834.000.000	27.452.451.920	34.853.818.660	55.968.120	632.764.590	-	967.601.000	178.382.130	11.065.140.200	8.799.995.818	939.428.160	-	-	-	139.779.550.598	0,011086
Total	3.332.220.000.000	1.545.620.864.560	2.691.055.432.530	15.634.479.060	39.539.142.550	11.978.550.192	59.394.424.000	192.831.082.530	3.693.231.467.280	234.777.962.312	370.273.474.200	160.549.030.000	187.961.600.000	73.488.354.800	12.608.555.864.014	

Lampiran 6. Pertumbuhan Komoditas Tanaman Pangan, Perkebunan Hortikultura dan Perikanan Tahun
2023-2024

Kecamatan	Tanaman Pangan			Perkebunan					Hortikultura			Perikanan			Pertumbuhan Kecamatan
	Padi	Ubi Kayu	Jagung	Kelapa Sawit	Kelapa	Kopi	Karet	Kakao	Pisang	Pepaya	Jeruk Siam	Udang Vanname	Udang Windu	Ikan Bandeng	
Metro Kibang	- 0,10	5,62	- 0,25	-	0,01	-	0,04	0,43	- 0,92	4,75	32,29	-	-	-	- 0,02
Batanghari	0,13	- 0,08	- 0,43	- 0,00	-	-	-	0,34	- 0,92	1,10	7,73	-	-	-	- 0,01
Sekampung	- 0,00	- 0,22	- 0,00	- 0,00	0,02	0,06	0,02	2,33	- 0,38	1,72	-	-	-	-	- 0,00
Marga Tiga	0,07	4,22	0,20	- 0,02	-	-	0,01	0,11	- 0,93	- 0,81	0,31	-	-	-	0,58
Sekampung Udik	- 0,00	0,41	- 0,11	-	-	-	-	-	- 0,99	- 0,92	- 0,84	-	-	-	- 0,27
Jabung	0,02	0,79	- 0,04	-	-	-	-	-	- 0,97	0,73	-	-	-	-	0,13
Pasir Sakti	- 0,01	- 0,81	91,62	-	- 0,34	-	-	1,00	- 0,85	- 0,77	0,74	0,29	- 0,15	- 0,25	0,08
Waway Karya	- 0,15	0,46	- 0,01	-	-	-	-	-	- 1,00	-	1,72	-	-	-	- 0,37

Kecamatan	Tanaman Pangan			Perkebunan					Hortikultura			Perikanan			Pertumbuhan Kecamatan
	Padi	Ubi Kayu	Jagung	Kelapa Sawit	Kelapa	Kopi	Karet	Kakao	Pisang	Pepaya	Jeruk Siam	Udang Vanname	Udang Windu	Ikan Bandeng	
Marga Sekampung	- 0,40	- 0,59	- 0,09	0,04	-	0,40	-	-	- 1,00	0,86	-	-	-	-	- 0,17
Labuhan Maringgai	- 0,24	0,41	- 0,06	0,00	-	-	-	0,29	- 0,67	0,15	0,53	0,29	- 0,15	- 0,25	- 0,10
Mataram Baru	- 0,03	0,22	- 0,24	0,01	0,11	-	0,30	0,21	- 0,89	0,47	- 0,19	-	-	-	- 0,00
Bandar Sribhawono	- 0,03	0,29	0,46	0,15	0,03	0,06	-	0,01	- 0,98	- 0,26	-	-	-	-	- 0,29
Melinting	- 0,40	- 0,86	1,18	0,01	0,20	-	0,02	0,51	- 0,94	- 0,06	- 0,09	-	-	-	- 0,02
Gunung Pelindung	- 0,07	- 0,18	- 0,48	-	-	-	0,11	-	- 0,04	0,63	1,93	-	-	-	- 0,17
Way Jepara	- 0,04	0,35	- 0,28	0,02	-	-	-	-	- 0,50	- 0,84	0,44	-	-	-	- 0,18
Braja Selehah	- 0,27	1,35	8,20	-	-	-	0,07	0,39	- 0,93	0,05	0,06	-	-	-	- 0,09
Labuhan Ratu	0,18	- 0,20	- 0,48	-	-	- 0,17	- 0,06	-	- 1,00	- 0,27	- 0,63	-	-	-	- 0,90

Kecamatan	Tanaman Pangan			Perkebunan					Hortikultura			Perikanan			Pertumbuhan Kecamatan
	Padi	Ubi Kayu	Jagung	Kelapa Sawit	Kelapa	Kopi	Karet	Kakao	Pisang	Pepaya	Jeruk Siam	Udang Vanname	Udang Windu	Ikan Bandeng	
Sukadana	- 0,00	0,74	- 0,09	0,35	- 0,00	-	-	0,71	- 0,78	1,06	- 0,31	-	-	-	0,28
Bumi Agung	0,08	0,54	0,36	0,01	-	-	0,05	0,56	- 0,81	- 0,66	- 0,55	-	-	-	0,35
Batanghari Nuban	- 0,01	0,68	- 0,22	-	-	-	-	0,53	3,34	1,28	-	-	-	-	0,23
Pekalongan	- 0,21	1,86	0,67	-	-	-	-	-	- 0,57	0,88	0,08	-	-	-	0,04
Raman Utara	0,23	- 0,75	- 0,50	-	-	-	-	0,67	- 0,99	0,39	-	-	-	-	- 0,16
Purbolinggo	- 0,49	0,01	2,59	-	0,01	-	-	0,16	- 0,89	0,76	2,18	-	-	-	0,29
Way Bungur	- 0,54	2,03	0,76	0,65	-	-	-	1,33	- 0,93	- 0,80	- 0,76	-	-	-	0,25
Total	- 0,06	0,57	0,08	0,02	0,01	0,00	0,01	0,12	- 0,98	- 0,20	0,14	0,29	- 0,15	- 0,25	- 0,21

Lampiran 7. Perubahan Nilai Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Perkebunan Hortikultura dan Perikanan yang Disebabkan oleh Pertumbuhan Nilai Produksi Kab. Lampung Timur Tahun 2023-2024

Kecamatan	Tanaman Pangan			Perkebunan					Hortikultura			Perikanan		
	Padi	Ubi Kayu	Jagung	Kelapa Sawit	Kelapa	Kopi	Karet	Kakao	Pisang	Pepaya	Jeruk Siam	Udang Vanname	Udang Windu	Ikan Bandeng
Metro Kibang	- 2.465.281.883,38	- 1.876.606.071,52	- 47.133.452.750,57	- 78.986.863,54	- 88.517.955,62	- 32.594.719,30	- 316.384.668,37	- 266.384.184,31	- 1.900.638.661,62	- 52.801.419,54	- 48.736.431,47	-	-	-
Batang hari	- 51.412.519.277,21	- 1.383.317.826,94	- 12.919.493.620,40	- 136.849.333,35	- 272.192.713,54	- 97.784.157,90	- 426.347.632,38	- 482.028.523,98	- 5.898.801.195,53	- 718.773.366,40	- 400.822.987,81	-	-	-
Sekampung	- 43.596.833.306,33	- 1.479.473.855,60	- 10.302.019.345,55	- 130.879.395,99	- 180.724.159,40	- 195.568.315,81	- 1.620.506.838,01	- 114.164.650,42	- 1.741.421.200,25	- 345.718.230,62	-	-	-	-
Marga Tiga	- 14.158.090.816,24	- 14.273.307.083,46	- 34.835.028.003,57	- 288.853.123,07	- 528.894.784,86	- 304.217.380,14	- 611.548.413,87	- 4.224.092.065,45	- 15.605.526.964,16	- 3.228.376.154,89	- 2.002.748.497,06	-	-	-
Sekampung Udik	- 30.594.583.373,10	- 37.049.386.896,33	- 72.784.858.275,80	- 255.329.628,66	- 646.181.076,06	- 54.324.532,17	- 908.641.334,17	- 9.336.131.411,92	- 39.635.177.006,17	- 7.208.180.171,10	- 26.370.508.752,79	-	-	-
Jabung	- 84.175.424.306,83	- 43.829.559.551,32	- 55.361.827.164,73	- 399.526.577,22	- 326.778.786,18	- 108.649.064,34	- 223.784.277,63	- 811.837.514,08	- 10.937.100.067,53	- 1.442.864.322,56	-	-	-	-

Kecamatan	Tanaman Pangan			Perkebunan					Hortikultura			Perikanan		
	Padi	Ubi Kayu	Jagung	Kelapa Sawit	Kelapa	Kopi	Karet	Kakao	Pisang	Pepaya	Jeruk Siam	Udang Vanname	Udang Windu	Ikan Bandeng
Pasir Sakti	- 57.632.04 4.028,69	- 161.041.8 04,10	- 93.790.85 7,79	- 200.681. 740,51	- 227.933. 735,73	-	- 152.404.8 09,76	- 25.369.92 2,31	- 1.849.834. 680,40	- 91.747.14 7,42	- 4.908.715 .158,71	- 18.837.79 7.858,03	- 22.054.24 6.181,94	- 8.622.617 .339,35
Waway Karya	- 46.314.27 5.382,35	- 7.123.754. 562,28	- 36.493.31 3.421,91	- 491.830. 993,34	- 123.187. 488,24	- 32.594.7 19,30	- 833.403.5 16,69	- 304.439.0 67,78	- 95.163.29 5.399,81	-	- 14.434.63 7.848,64	-	-	-
Marga Sekampung	- 1.134.080. 866,39	- 5.806.104. 267,11	- 77.540.60 6.476,48	- 30.768.1 38,71	- 147.529. 926,04	- 54.324.5 32,17	- 385.834.9 61,43	- 951.372.0 86,81	- 12.521.51 9.556,37	- 6.256.256 .706,80	-	-	-	-
Labuhan Maringgai	- 49.088.03 7.501,40	- 884.166.4 09,87	- 239.600.1 74,51	- 405.496. 514,58	- 89.255.6 05,25	- 119.513. 970,77	- 304.809.6 19,53	- 697.672.8 63,66	- 2.055.741. 158,77	- 546.513.4 16,13	- 5.689.409 .023,61	- 15.412.68 8.041,38	- 18.044.25 9.118,46	- 7.054.910 .328,35
Mataram Baru	- 23.249.93 7.762,07	- 6.983.820. 179,11	- 4.777.028. 479,34	- 72.557.7 00,23	- 330.467. 034,33	-	- 96.458.74 0,36	- 3.501.049 .279,47	- 314.478.2 26,38	- 337.629.5 02,52	- 2.480.092 .237,10	-	-	-
Bandar Sribhawanono	- 19.991.05 5.272,41	- 39.008.85 9.138,89	- 84.913.82 8.952,01	- 31.227.3 64,66	- 768.630. 914,67	- 143.416. 764,92	- 295.163.7 45,49	- 6.367.850 .501,06	- 133.876.8 78.690,72	- 1.582.319 .986,65	-	-	-	-

Kecamatan	Tanaman Pangan			Perkebunan					Hortikultura			Perikanan		
	Padi	Ubi Kayu	Jagung	Kelapa Sawit	Kelapa	Kopi	Karet	Kakao	Pisang	Pepaya	Jeruk Siam	Udang Vanname	Udang Windu	Ikan Bandeng
Melinting	- 16.232.97 2.401,37	- 6.652.746. 373,11	- 16.639.60 1.593,09	- 119.398. 747,22	- 604.135. 047,14	- 467.190. 976,65	- 565.248.2 18,49	- 520.083.4 07,46	- 9.218.785. 974,00	- 2.761.851 .272,19	- 2.365.311 .108,77	-	-	-
Gunung Pelindung	- 19.448.33 4.857,79	- 12.166.08 2.894,43	- 9.811.784. 777,96	- 73.476.1 52,13	- 418.247. 340,33	- 65.189.4 38,60	- 520.877.1 97,93	- 431.288.6 79,35	- 1.315.680. 672,33	- 150.090.8 43,62	- 133.683.5 76,05	-	-	-
Way Jepara	- 31.326.74 3.932,44	- 15.270.82 8.161,27	- 19.228.70 2.163,07	- 110.673. 454,15	- 405.707. 296,61	- 76.054.3 45,04	- 987.737.5 01,26	- 4.591.955 .939,01	- 15.092.73 9.116,41	- 16.172.21 3.504,82	- 6.409.751 .700,01	-	-	-
Braja Selebah	- 32.833.30 5.083,40	- 104.755.3 48,30	- 728.258.4 25,16	- 39.034.2 05,82	- 256.702. 071,31	- 32.594.7 19,30	- 461.072.7 78,91	- 482.028.5 23,98	- 1.245.093. 209,34	- 585.758.7 26,54	- 3.052.859 .177,07	-	-	-
Labuhan Ratu	- 10.466.56 7.996,06	- 25.921.86 7.287,06	- 8.791.907. 719,35	- 45.463.3 69,13	- 593.070. 302,68	- 195.568. 315,81	- 2.056.500 .344,42	- 3.221.980 .134,00	- 435.212.0 67.653,50	- 797.413.7 78,47	- 10.095.72 9.005,55	-	-	-
Sukadana	- 25.749.77 9.671,85	- 30.001.07 1.819,95	- 18.401.13 5.770,84	- 118.480. 295,31	- 330.467. 034,33	- 184.703. 409,37	- 590.327.4 90,99	- 2.080.333 .629,83	- 99.392.21 2,47	- 73.472.61 3,57	- 40.310.03 9,12	-	-	-

Kecamatan	Tanaman Pangan			Perkebunan					Hortikultura			Perikanan		
	Padi	Ubi Kayu	Jagung	Kelapa Sawit	Kelapa	Kopi	Karet	Kakao	Pisang	Pepaya	Jeruk Siam	Udang Vanname	Udang Windu	Ikan Bandeng
Bumi Agung	- 10.544.64 8.055,71	- 15.441.64 1.919,49	- 6.644.175. 891,90	- 50.055.6 28,64	- 328.254. 085,44	-	- 165.909.0 33,41	- 317.124.0 28,94	- 7.596.857, 00	- 6.740.606 ,75	- 20.041.14 9,39	-	-	-
Batang hari Nuban	- 41.520.67 1.720,22	- 34.183.85 9.066,64	- 21.406.38 4.012,33	- 71.180.0 22,38	- 511.928. 843,36	- 380.271. 725,18	- 167.838.2 08,22	- 735.727.7 47,13	- 21.366.16 0,32	- 4.163.148 .519,79	-	-	-	-
Pekalongan	- 35.133.46 6.840,63	- 2.628.655. 661,53	- 6.372.261. 220,17	- 38.115.7 53,92	- 601.184. 448,62	-	- 295.163.7 45,49	- 1.040.166 .814,91	- 40.833.10 6,39	- 368.261.8 15,42	- 222.046.8 25,64	-	-	-
Raman Utara	- 33.562.90 5.640,79	- 12.787.18 8.299,06	- 13.874.74 1.684,58	- 106.540. 420,59	- 330.467. 034,33	- 10.864.9 06,43	- 326.030.5 42,41	- 38.054.88 3,47	- 1.402.569. 724,31	- 391.030.0 87,11	-	-	-	-
Purbolinggo	- 18.544.65 4.167,41	- 8.858.080. 981,64	- 7.362.976. 415,43	- 28.012.7 83,00	- 189.575. 954,96	-	- 152.404.8 09,76	- 558.138.2 90,93	- 372.879.0 64,60	- 927.507.4 88,74	- 115.919.8 30,00	-	-	-
Way Bungur	- 11.697.92 8.936,77	- 5.856.527. 550,43	- 7.435.486. 994,56	- 11.939.8 74,72	- 134.989. 882,33	-	- 206.421.7 04,37	- 38.054.88 3,47	- 2.360.565. 046,05	- 1.877.333 .875,39	- 200.411.4 93,91	-	-	-
Total	- 710.874.1 43.080,86	- 329.732.7 03.009,40	- 574.092.2 64.191,10	- 3.335.35 8.080,89	- 8.435.02 3.521,37	- 2.555.42 5.993,21	- 12.670.82 0.133,36	- 41.137.32 9.033,76	- 787.889.9 81.604,44	- 50.086.00 3.557,03	- 78.991.73 4.842,69	- 34.250.48 5.899,40	- 40.098.50 5.300,40	- 15.677.52 7.667,70

Lampiran 8. Perubahan Nilai Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Perkebunan Hortikultura dan Perikanan yang Disebabkan oleh Pertumbuhan Nilai Produksi Komoditas Kab. Lampung Timur Tahun 2023-2024

Kecamatan	Tanaman Pangan			Perkebunan					Hortikultura			Perikanan		
	Padi	Ubi Kayu	Jagung	Kelapa Sawit	Kelapa	Kopi	Karet	Kakao	Pisang	Pepaya	Jeruk Siam	Udang Vanname	Udang Windu	Ikan Bandeng
Metro Kibang	1.762.666.596,28	6.846.691.965,27	65.699.409.734,18	84.900.270,43	93.706.818,48	33.114.405,12	324.061.855,95	410.388.012,97	-6.816.016.355,79	2.176.779,45	80.207.130,79	-	-	-
Batanghari	36.759.743.772,59	5.046.957.480,75	18.008.506.811,86	147.094.654,59	288.148.466,84	99.343.215,35	436.693.110,76	742.606.880,61	-21.154.113.214,82	29.631.989,25	659.647.430,81	-	-	-
Sekampung	31.171.559.848,99	5.397.777.356,50	14.360.004.425,20	140.677.773,68	191.318.087,74	198.686.430,70	1.659.829.018,27	175.880.576,99	-6.245.035.220,48	14.252.502,07	-	-	-	-
Marga Tiga	10.122.977.788,89	52.075.360.092,42	48.556.612.010,16	310.478.314,55	559.898.240,44	309.067.781,10	626.387.855,71	6.507.581.348,46	-55.964.097.319,84	133.092.309,73	3.295.988.356,01	-	-	-
Sekampung Udik	21.875.003.626,26	135.172.609.441,34	101.454.952.846,60	274.445.060,24	684.059.774,93	55.190.675,20	930.689.842,39	14.383.122.740,14	-142.138.545.424,07	297.162.815,58	43.398.804.152,73	-	-	-
Jabung	60.185.088.631,51	159.909.688.972,58	77.168.956.532,37	429.437.414,40	345.934.338,24	110.381.350,39	229.214.483,48	1.250.706.325,23	-39.222.317.450,84	59.483.200,26	-	-	-	-
Pasir Sakti	41.206.678.866,73	587.551.987,02	130.735.255,65	215.705.919,65	241.295.057,60	-	156.102.967,19	39.084.572,66	-6.633.824.562,12	3.782.347,28	8.078.432.229,41	44.235.904.132,56	6.919.079.332,54	1.397.365.690,22
Waway Karya	33.114.519.965,24	25.990.618.843,36	50.868.099.219,29	528.652.265,31	130.408.655,72	33.114.405,12	853.626.352,26	469.014.871,96	-341.271.905.605,08	-	23.755.553.102,18	-	-	-
Marga Sekampung	810.863.242,11	21.183.245.668,00	108.083.999.338,96	33.071.616,97	156.178.030,81	55.190.675,20	395.197.385,30	1.465.671.474,88	-44.904.317.595,55	257.919.032,80	-	-	-	-
Labuhan Maringgai	35.097.748.684,93	3.225.831.540,39	333.979.140,48	435.854.295,30	94.487.708,64	121.419.485,43	312.205.934,39	1.074.825.748,24	-7.372.240.523,39	22.530.439,26	9.363.245.520,79	36.192.881.766,84	5.661.025.967,86	1.143.305.942,08
Mataram Baru	16.623.611.658,75	25.480.076.097,36	6.658.709.113,39	77.989.783,30	349.838.789,01	-	98.799.346,33	5.393.671.027,55	-1.127.772.878,59	13.919.037,98	4.081.568.478,16	-	-	-
Bandar Sribhawono	14.293.523.832,11	142.321.633.982,45	118.361.548.217,98	33.565.223,19	813.687.540,50	145.703.382,52	302.325.999,76	9.810.227.738,52	-480.105.457.837,40	65.232.368,12	-	-	-	-

Kecamatan	Tanaman Pangan			Perkebunan					Hortikultura			Perikanan		
	Padi	Ubi Kayu	Jagung	Kelapa Sawit	Kelapa	Kopi	Karet	Kakao	Pisang	Pepaya	Jeruk Siam	Udang Vanname	Udang Windu	Ikan Bandeng
Melinting	11.606.509.747,65	24.272.171.891,03	23.193.972.414,10	128.337.618,10	639.549.036,15	474.639.806,68	578.964.169,47	801.233.739,60	-33.060.148.279,81	113.859.459,78	3.892.669.441,15	-	-	-
Gunung Pelindung	13.905.480.926,18	44.387.270.864,18	13.676.665.525,92	78.976.995,75	442.764.717,34	66.228.810,23	533.516.470,16	664.437.735,28	-4.718.256.638,00	6.187.611,38	220.007.410,16	-	-	-
Way Jepara	22.398.495.471,06	55.714.759.779,02	26.802.924.639,39	118.959.099,85	429.489.584,72	77.266.945,27	1.011.705.306,38	7.074.307.652,08	-54.125.152.112,68	666.712.038,99	10.548.736.897,87	-	-	-
Braja Sebah	23.475.680.613,23	382.194.010,98	1.015.120.808,57	41.956.528,99	271.749.773,60	33.114.405,12	472.260.875,44	742.606.880,61	-4.465.117.884,17	24.148.357,60	5.024.189.664,81	-	-	-
Labuhan Ratu	7.483.553.872,14	94.574.478.454,62	12.255.056.947,67	48.867.016,12	627.835.683,84	198.686.430,70	2.106.402.063,67	4.963.740.728,26	-1.560.745.149.129,53	32.874.001,20	16.614.869.663,62	-	-	-
Sukadana	18.410.988.534,41	109.457.227.329,75	25.649.378.266,01	127.350.405,65	349.838.789,01	187.648.295,67	604.651.999,51	3.204.934.958,40	- 356.437.527,81	3.028.965,45	66.339.542,76	-	-	-
Bumi Agung	7.539.380.799,65	56.337.964.192,43	9.261.329.454,85	53.803.078,36	347.496.118,54	-	169.934.875,68	488.557.158,29	- 27.243.632,70	277.886,74	32.982.371,54	-	-	-
Batanghari Nuban	29.687.112.694,70	124.717.891.924,70	29.838.399.524,77	76.508.964,63	541.937.766,90	386.334.726,37	171.910.862,61	1.133.452.607,24	- 76.622.716,96	171.629.025,14	-	-	-	-
Pekalongan	25.120.286.985,76	9.590.502.700,78	8.882.307.075,03	40.969.316,55	636.425.475,54	-	302.325.999,76	1.602.467.479,20	- 146.434.525,76	15.181.878,83	365.429.684,68	-	-	-
Raman Utara	23.997.342.066,95	46.653.339.085,97	19.340.028.911,42	114.516.643,84	349.838.789,01	11.038.135,04	333.941.790,58	58.626.859,00	- 5.029.855.686,99	16.120.518,48	-	-	-	-
Purbolinggo	13.259.352.879,98	32.318.211.480,29	10.263.266.876,30	30.109.979,63	200.688.769,59	-	156.102.967,19	859.860.598,60	- 1.337.208.304,96	38.237.215,26	190.773.035,39	-	-	-
Way Bungur	8.363.971.974,75	21.367.212.188,21	10.364.339.510,92	12.833.761,81	142.902.898,19	-	211.430.601,14	58.626.859,00	- 8.465.391.285,42	77.394.544,39	329.823.715,41	-	-	-
Total	508.272.143.080,86	1.203.011.267.329,40	800.228.302.601,10	3.585.062.000,89	8.929.478.911,37	2.596.169.361,21	12.978.282.133,36	63.375.634.573,76	-2.825.508.661.712,77	2.064.834.325,03	129.999.267.828,29	80.428.785.899,40	12.580.105.300,40	- 2.540.671.632,30

Lampiran 9. Perubahan Nilai Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Perkebunan Hortikultura dan Perikanan yang Disebabkan oleh Pertumbuhan Nilai Produksi Komoditas i di Kecamatan j Tahun 2023-2024

Kecamatan	Tanaman Pangan			Perkebunan					Hortikultura			Perikanan		
	Padi	Ubi Kayu	Jagung	Kelapa Sawit	Kelapa	Kopi	Karet	Kakao	Pisang	Pepaya	Jeruk Siam	Udang Vanname	Udang Windu	Ikan Bandeng
Metro Kibang	1.271.281.883,38	51.325.099.191,52	- 7.467.414.959,43	78.986.863,54	91.975.685,62	32.594.719,30	370.642.668,37	801.530.574,31	- 6.333.264.894,38	1.229.247.042,54	7.424.848.785,47	-	-	-
Batanghari	81.838.519.277,21	848.303.746,94	- 13.148.827.819,60	134.696.713,35	272.192.713,54	97.784.157,90	426.347.632,38	1.255.017.753,98	- 19.658.015.198,07	4.423.822.271,90	14.931.588.182,41	-	-	-
Sekampung	43.410.833.306,33	- 76.097.904,40	10.194.879.135,55	128.726.775,99	198.012.809,40	246.497.525,81	1.801.366.838,01	1.362.839.560,42	- 1.385.135.615,35	3.128.498.365,12	-	-	-	-
Marga Tiga	18.874.090.816,24	296.331.997.163,47	67.930.269.423,57	258.716.443,07	528.894.784,86	304.217.380,14	638.677.413,87	6.424.138.335,45	- 52.242.366.555,84	- 9.067.253.524,11	4.905.368.005,06	-	-	-
Sekampung Udik	30.138.583.373,10	109.056.418.896,33	35.514.843.155,80	255.329.628,66	646.181.076,06	54.324.532,17	908.641.334,17	9.336.131.411,92	- 143.985.649.999,83	- 23.767.166.155,40	- 77.943.220.497,41	-	-	-
Jabung	92.845.424.306,83	206.026.773.311,32	45.671.179.894,73	399.526.577,22	326.778.786,18	108.649.064,34	223.784.277,63	811.837.514,08	- 38.977.135.323,67	6.387.727.527,56	-	-	-	-

Kecamatan	Tanaman Pangan			Perkebunan					Hortikultura			Perikanan		
	Padi	Ubi Kayu	Jagung	Kelapa Sawit	Kelapa	Kopi	Karet	Kakao	Pisang	Pepaya	Jeruk Siam	Udang Vanname	Udang Windu	Ikan Bandeng
Pasir Sakti	53.918.04 4.028,69	- 447.261.87 5,90	40.374.81 5.327,79	200.681.74 0,51	- 138.585 .644,27	-	152.404. 809,76	144.291 .342,31	- 5.495.051. 815,20	- 240.718. 983,58	21.919.303.81 2,71	44.235.65 7.858,03	6.918.24 6.181,94	- 1.397.352. 060,65
Waway Karya	13.254.27 5.382,35	22.578.698. 962,28	33.944.11 5.321,91	491.830.99 3,34	123.187 .488,24	32.594. 719,30	833.403. 516,69	304.439 .067,78	- 350.914.3 11.000,19	-	130.985.860.0 51,04	-	-	-
Marga Sekampung	- 1.001.919. 133,61	- 10.334.097. 892,89	45.490.90 5.726,48	37.225.998. 71	147.529 .926,04	156.182 .952,17	385.834. 961,43	951.372 .086,81	- 46.100.65 1.035,63	31.346.3 90.797,8 0	-	-	-	-
Labuhan Maringgai	- 6.801.962. 498,60	2.593.646.3 29,87	173.099.3 54,51	409.801.75 4,58	89.255. 605,25	119.513 .970,77	304.809. 619,53	1.649.0 44.223, 66	- 4.419.906. 797,23	920.757. 234,13	19.914.326.30 0,21	36.193.12 8.041,38	5.661.85 9.118,46	- 1.143.319. 571,65
Mataram Baru	19.643.93 7.762,07	14.039.776. 419,11	- 690.816.7 20,66	76.862.940, 23	496.438 .074,33	-	232.103. 740,36	7.009.2 31.169, 47	- 999.391.2 53,62	1.075.58 4.948,52	317.272.405,1 0	-	-	-
Bandar Sribhawono	16.805.05 5.272,41	92.191.457. 378,89	268.245.5 06.222,01	52.753.564, 66	882.736 .004,67	184.160 .132,92	295.163. 745,49	6.784.0 75.471, 06	- 481.607.5 19.692,88	- 360.166. 922,35	-	-	-	-
Melinting	- 14.271.02 7.598,63	- 20.218.885. 466,89	108.517.8 73.403,09	125.856.60 7,22	1.160.8 29.577, 14	467.190 .976,65	619.506. 218,49	1.768.7 58.317, 46	- 31.236.41 2.648,00	1.947.01 0.839,19	1.329.698.315 ,57	-	-	-

Kecamatan	Tanaman Pangan			Perkebunan					Hortikultura			Perikanan		
	Padi	Ubi Kayu	Jagung	Kelapa Sawit	Kelapa	Kopi	Karet	Kakao	Pisang	Pepaya	Jeruk Siam	Udang Vanname	Udang Windu	Ikan Bandeng
Gunung Pelindung	13.514.334.857,79	1.975.164.014,43	- 12.303.432.362,04	73.476.152,13	418.247.340,33	65.189.438,60	792.167.197,93	431.288.679,35	1.097.145.080,73	596.304.626,62	1.345.332.396,05	-	-	-
Way Jepara	25.800.743.932,44	40.235.098.161,27	- 5.620.437.576,93	119.283.934,15	405.707.296,61	76.054.345,04	987.737.501,26	4.591.955.939,01	- 20.307.919.783,59	- 47.582.643.295,18	19.537.192.704,01	-	-	-
Braja Selebah	- 8.458.694.916,60	769.858.468,30	28.728.798.135,16	39.034.205,82	256.702.071,31	32.594.719,30	605.760.778,91	1.373.939.173,98	- 4.199.193.170,66	710.038.568,54	3.880.196.477,07	-	-	-
Labuhan Ratu	19.076.567.996,06	1.155.479.207,06	- 11.065.976.030,65	45.463.369,13	593.070.302,68	42.780.685,81	1.459.662.344,42	3.221.980.134,00	- 1.604.528.383.826,50	- 207.006.074,53	- 19.588.065.786,45	-	-	-
Sukadana	25.443.779.671,85	133.707.688.059,95	10.938.265.970,84	312.216.095,31	327.009.304,33	184.703.409,37	590.327.490,99	8.977.775.989,83	- 264.128.987,53	439.992.825,57	- 17.336.688,88	-	-	-
Bumi Agung	14.282.648.055,71	54.385.903.119,49	17.701.784.461,90	52.208.248,64	328.254.085,44	-	202.081.033,41	1.149.573.968,94	- 21.336.463,00	- 13.972.700,25	- 32.054.412,21	-	-	-

Kecamatan	Tanaman Pangan			Perkebunan					Hortikultura			Perikanan		
	Padi	Ubi Kayu	Jagung	Kelapa Sawit	Kelapa	Kopi	Karet	Kakao	Pisang	Pepaya	Jeruk Siam	Udang Vanname	Udang Windu	Ikan Bandeng
Batanghari Nuban	39.420.67 1.720,22	142.516.88 1.306,64	- 1.019.170. 287,67	71.180.022, 38	511.928 .843,36	380.271 .725,18	167.838. 208,22	2.579.0 09.757, 13	355.657.2 88,32	29.059.1 39.241,7 9	-	-	-	-
Pekalongan	627.466.8 40,63	25.549.978. 061,53	26.300.34 0.280,17	38.115.753, 92	601.184 .448,62	-	295.163. 745,49	1.040.1 66.814, 91	- 67.592.65 5,61	1.888.58 3.441,92	303.446.140,6 4	-	-	-
Raman Utara	70.150.90 5.640,79	- 32.249.270. 900,94	- 18.924.94 0.535,42	106.540.42 0,59	330.467 .034,33	10.864. 906,43	326.030. 542,41	156.976 .303,47	- 5.134.876. 835,69	1.103.35 7.204,11	-	-	-	-
Purbolinggo	- 23.863.34 5.832,59	9.334.463.3 81,64	96.780.71 7.885,43	28.012.783, 00	196.491 .414,96	-	152.404. 809,76	974.363 .260,93	- 1.176.166. 375,40	4.211.09 3.257,74	1.299.812.818 ,00	-	-	-
Way Bungur	- 17.648.07 1.063,23	61.714.196. 190,43	33.961.92 5.194,56	48.534.414, 72	134.989 .882,33	-	206.421. 704,37	275.897 .723,47	- 7.907.054. 153,95	- 5.163.78 6.212,61	- 514.301.180,0 9	-	-	-
Total	508.272.1 43.080,86	1.203.011.2 67.329,40	800.228.3 02.601,10	3.585.062.0 00,89	8.929.4 78.911, 37	2.596.1 69.361, 21	12.978.2 82.133,3 6	63.375. 634.573 ,76	- 2.825.508. 661.712,7 7	2.064.83 4.325,03	129.999.267.8 28,29	80.428.78 5.899,40	12.580.1 05.300,4 0	- 2.540.671. 632,30

Lampiran 8. Perubahan Nilai Produksi di Kabupaten Lampung Timur (*Shift Share*) Tahun 2023-2024

Kecamatan	Tanaman Pangan			Perkebunan					Hortikultura			Perikanan		
	Padi	Ubi Kayu	Jagung	Kelapa Sawit	Kelapa	Kopi	Karet	Kakao	Pisang	Pepaya	Jeruk Siam	Udang Vannam e	Udang Windu	Ikan Bandeng
Metro Kibang	568.666.596,28	56.295.185.085,27	11.098.542.024,18	84.900.270,43	97.164.548,48	33.114.405,12	378.319.855,95	945.534.402,97	- 15.049.919.911,79	1.178.622.402,45	7.456.319.484,79	-	-	-
Batanghari	67.185.743.772,59	4.511.943.400,75	- 8.059.814.628,14	144.942.034,59	288.148.466,84	99.343.215,35	436.693.110,76	1.515.596.110,61	- 46.710.929.608,42	3.734.680.894,75	15.190.412.625,41	-	-	-
Sekampung	30.985.559.848,99	3.842.205.596,50	14.252.864.215,20	138.525.153,68	208.606.737,74	249.615.640,70	1.840.689.018,27	1.424.555.486,99	- 9.371.592.036,08	2.797.032.636,57	-	-	-	-
Marga Tiga	14.838.977.788,89	334.134.050.172,42	81.651.853.430,16	280.341.634,55	559.898.240,44	309.067.781,10	653.516.855,71	8.707.627.618,46	- 123.811.990.839,84	- 12.162.537.369,27	6.198.607.864,01	-	-	-

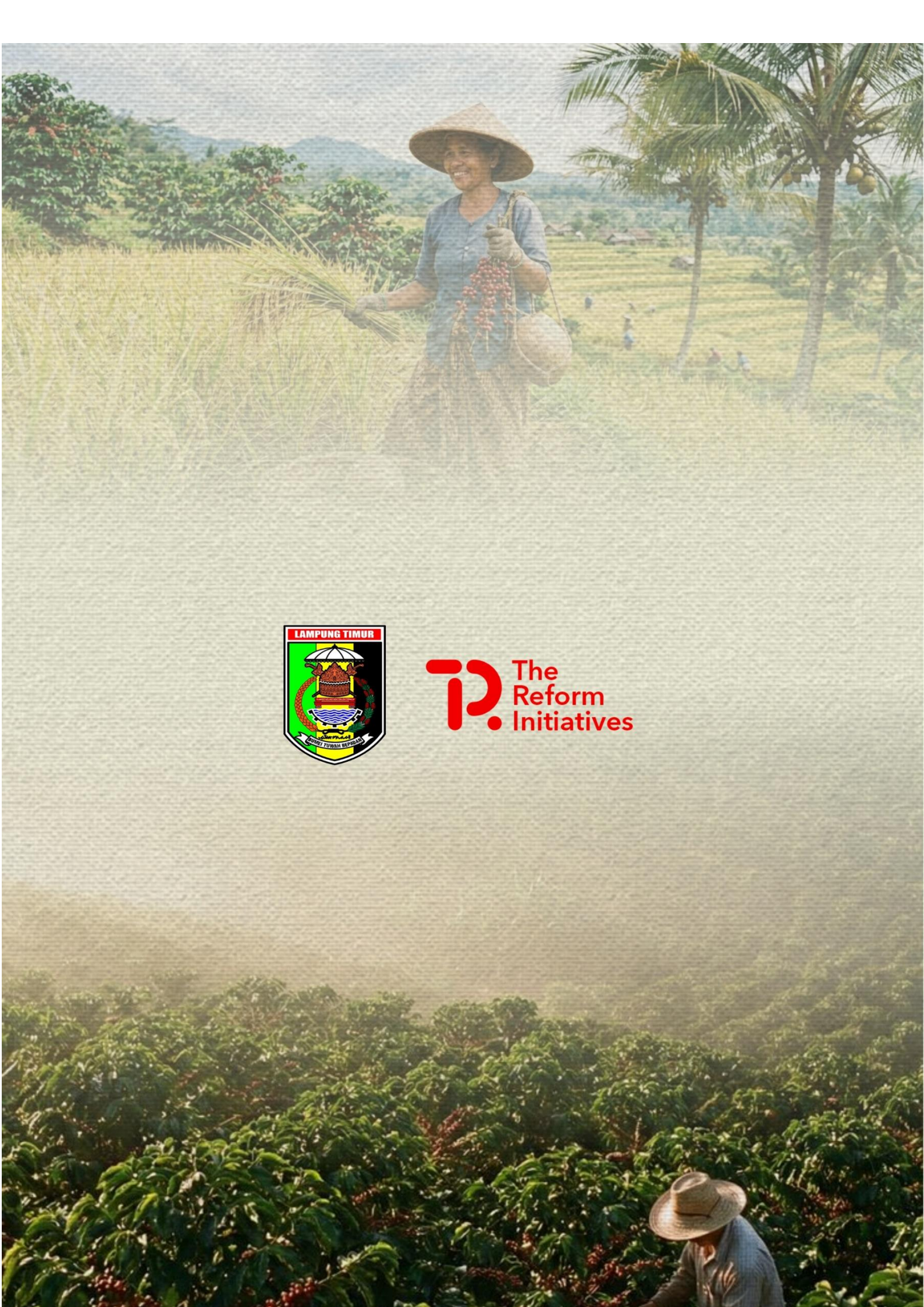
Kecamatan	Tanaman Pangan			Perkebunan					Hortikultura			Perikanan		
	Padi	Ubi Kayu	Jagung	Kelapa Sawit	Kelapa	Kopi	Karet	Kakao	Pisang	Pepaya	Jeruk Siam	Udang Vanname	Udang Windu	Ikan Bandeng
Sekampung Udik	21.419.003.626,26	207.179.641.441,34	64.184.937.726,60	274.445.060,24	684.059.774,93	55.190.675,20	930.689.842,39	14.383.122.740,14	- 325.759.372.430,07	- 30.678.183.510,92	- 60.914.925.097,47	-	-	-
Jabung	68.855.088.631,51	322.106.902.732,58	67.478.309.262,37	429.437.414,40	345.934.338,24	110.381.350,39	229.214.483,48	1.250.706.325,23	- 89.136.552.842,04	5.004.346.405,26	-	-	-	-
Pasir Sakti	37.492.678.866,73	- 20.751.692,98	40.411.759.725,65	215.705.919,65	- 125.224.322,40	-	156.102.967,19	158.005.992,66	- 13.978.711.057,72	- 328.683.783,72	25.089.020.883,41	69.633.764.132,56	- 8.216.920.667,46	- 11.417.335.090,22
Waway Karya	54.519.965,24	41.445.563.243,36	48.318.901.119,29	528.652.265,31	130.408.655,72	33.114.405,12	853.626.352,26	469.014.871,96	- 787.349.512.005,08	-	140.306.775.304,58	-	-	-

Kecamatan	Tanaman Pangan			Perkebunan					Hortikultura			Perikanan		
	Padi	Ubi Kayu	Jagung	Kelapa Sawit	Kelapa	Kopi	Karet	Kakao	Pisang	Pepaya	Jeruk Siam	Udang Vannam e	Udang Windu	Ikan Bandeng
Marga Sekampung	- 1.325.136.757,89	5.043.043.508,00	76.034.298.588,96	39.529.476,97	156.178.030,81	157.049.095,20	395.197.385,30	1.465.671.474,88	- 103.526.488.187,55	25.348.053.123,80	-	-	-	-
Labuhan Maringgai	- 20.792.251.315,07	4.935.311.460,39	267.478.320,48	440.159.535,30	94.487.708,64	121.419.485,43	312.205.934,39	2.026.197.108,24	- 13.847.888.479,39	396.774.257,26	23.588.162.797,39	56.973.321.766,84	- 6.721.374.032,14	- 9.341.535.842,08
Mataran Baru	13.017.611.658,75	32.536.032.337,36	1.190.863.913,39	82.295.023,30	515.809.829,01	-	234.444.346,33	8.901.852.917,55	- 2.441.642.358,59	751.874.483,98	1.918.748.646,16	-	-	-
Bandar Sribhawono	11.107.523.832,11	195.504.232.222,45	301.693.225.487,98	55.091.423,19	927.792.630,50	186.446.750,52	302.325.999,76	10.226.452.708,52	- 1.095.589.856.221,00	- 1.877.254.540,88	-	-	-	-

Kecamatan	Tanaman Pangan			Perkebunan					Hortikultura			Perikanan		
	Padi	Ubi Kayu	Jagung	Kelapa Sawit	Kelapa	Kopi	Karet	Kakao	Pisang	Pepaya	Jeruk Siam	Udang Vanname	Udang Windu	Ikan Bandeng
Melinting	- 18.897. 490.252 ,35	- 2.599.45 9.948,97	115.072. 244.224, 10	134.79 5.478,1 0	1.196.2 43.566, 15	474.63 9.806,6 8	633.222 .169,47	2.049.9 08.649, 60	- 73.515.3 46.901,8 1	- 700.980 .973,22	2.857.0 56.647, 95	-	-	-
Gunung Pelindung	7.971.4 80.926, 18	34.196.3 51.984,1 8	- 8.438.55 1.614,08	78.976. 995,75	442.76 4.717,3 4	66.228. 810,23	804.806 .470,16	664.437 .735,28	- 4.936.79 2.229,60	452.401 .394,38	1.431.6 56.230, 16	-	-	-
Way Jepara	16.872. 495.471 ,06	80.679.0 29.779,0 2	1.953.78 4.899,39	127.56 9.579,8 5	429.48 9.584,7 2	77.266. 945,27	1.011.7 05.306, 38	7.074.3 07.652, 08	- 89.525.8 11.012,6 8	- 63.088. 144.761 ,01	23.676. 177.901 ,87	-	-	-
Braja Selehah	- 17.816. 319.386 ,77	1.047.29 7.130,98	29.015.6 60.518,5 7	41.956. 528,99	271.74 9.773,6 0	33.114. 405,12	616.948 .875,44	1.634.5 17.530, 61	- 9.909.40 4.264,17	148.428 .199,60	5.851.5 26.964, 81	-	-	-

Kecamatan	Tanaman Pangan			Perkebunan					Hortikultura			Perikanan		
	Padi	Ubi Kayu	Jagung	Kelapa Sawit	Kelapa	Kopi	Karet	Kakao	Pisang	Pepaya	Jeruk Siam	Udang Vannam e	Udang Windu	Ikan Bandeng
Labuhan Ratu	16.093.553.872,14	69.808.090.374,62	- 7.602.826.802,33	48.867.016,12	627.835.683,84	45.898.800,70	1.509.564.063,67	4.963.740.728,26	- 3.600.485.600.609,53	- 971.545.851,80	- 13.068.925.128,38	-	-	-
Sukadana	18.104.988.534,41	213.163.843.569,75	18.186.508.466,01	321.086.205,65	346.381.059,01	187.648.295,67	604.651.999,51	10.102.377.318,40	- 719.958.727,81	369.549.177,45	8.692.814,76	-	-	-
Bumi Agung	11.277.380.799,65	95.282.225.392,43	20.318.938.024,85	55.955.698,36	347.496.118,54	-	206.106.875,68	1.321.007.098,29	- 56.176.952,70	- 20.435.420,26	- 19.113.190,06	-	-	-
Batanghari Nuban	27.587.112.694,70	233.050.914.164,70	7.412.845.224,77	76.508.964,63	541.937.766,90	386.334.726,37	171.910.862,61	2.976.734.617,24	257.668.411,04	25.067.619.747,14	-	-	-	-
Pekalongan	- 9.385.713.014,24	32.511.825.100,78	28.810.386.135,03	40.969.316,55	636.425.475,54	-	302.325.999,76	1.602.467.479,20	- 254.860.287,76	1.535.503.505,33	446.828.999,68	-	-	-

Kecamatan	Tanaman Pangan			Perkebunan					Hortikultura			Perikanan		
	Padi	Ubi Kayu	Jagung	Kelapa Sawit	Kelapa	Kopi	Karet	Kakao	Pisang	Pepaya	Jeruk Siam	Udang Vanname	Udang Windu	Ikan Bandeng
Raman Utara	60.585.342.066,95	1.616.879.885,97	- 13.459.653.308,58	114.516.643,84	349.838.789,01	11.038.135,04	333.941.790,58	177.548.279,00	- 11.567.302.246,99	728.447.635,48	-	-	-	-
Purbolinggo	- 29.148.647.120,02	32.794.593.880,29	99.681.008.346,30	30.109.979,63	207.604.229,59	-	156.102.967,19	1.276.085.568,60	- 2.886.253.744,96	3.321.822.984,26	1.374.666.023,39	-	-	-
Way Bungur	- 20.982.028.025,25	77.224.880.828,21	36.890.777.710,92	49.428.301,81	142.902.898,19	-	211.430.601,14	296.469.699,00	- 18.733.010.485,42	- 6.963.725.543,61	- 384.888.958,59	-	-	-
Total	305.670.143.080,86	2.076.289.831.649,40	1.026.364.341.011,10	3.834.765.920,89	9.423.934.301,37	2.636.912.729,21	13.285.744.133,36	85.613.940.113,76	- 6.438.907.305.029,96	- 45.956.334.906,97	181.006.800.813,89	126.607.085.899,40	- 14.938.294.699,60	- 20.758.870.932,30



TR The
Reform
Initiatives